

**PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ETNIK JAWA MUSLIM
DAN ETNIK LAMPUNG MUSLIM
DALAM MEMBANGUN HARMONI SOSIAL
Studi Kasus Transmigran Bagelen di Lampung**

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi pada Program Doktor
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh :

**T A U H I D I
NPM 1870031002**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kajian pemberdayaan masyarakat sejalan dengan dinamika sosial yang menimbulkan banyak perubahan. Tidak saja terjadi di bidang struktur pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri, melainkan juga perubahan fungsi kelembagaan sosial, transmigrasi, perilaku ekonomi, politik, dan keagamaan dikalangan warga yang lebih rasional. Dalam praktiknya, dinamika sosial terindikasi dari semakin cerdas dan kritisnya masyarakat terhadap berbagai persoalan kehidupan sosial dan pluralitas budaya lokal yang dinamis.¹ Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menyerap informasi dan kultur yang berkembang secara cepat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Pemberdayaan masyarakat adalah inti dari pengembangan masyarakat. Dimana dalam proses pengembangan masyarakat, peran partisipasi masyarakat adalah pusatnya. Pengembangan masyarakat tidak dapat dicapai tanpa partisipasi masyarakat.²

¹D. Adamson, & Bromiley, *Community empowerment in practice, (Lessons from Communities First, 2008)*. <https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/2157-community-wales-empowerment.pdf>. Lihat: G. Laverack, *Using a domains approach to build community empowerment*, (Jounal: Community Development, 41 (1), 2006), h. 4-12.

²A. A. Samah, & F. Aref, *The theoretical and conceptual framework and application of community empowerment and participation in processes of community development in Malaysia*. (The Journal of American Science, 7(2), 2011), h. 186-195.

Namun membuat konsep pemberdayaan masyarakat beroperasi dalam konteks program secara efektif terkadang sulit.³ Selain itu, pencapaian program pemberdayaan masyarakat mempunyai segelintir hambatan termasuk masalah kapasitas masyarakat, kapasitas kelembagaan, budaya organisasi dan kerangka peraturan.⁴ Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi peran modal sosial dan mekanisme yang tepat dalam rangka pengembangan kapabilitas meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.⁵

Pemberdayaan masyarakat mencakup kapasitas dalam pemberdayaan komunitas sosial, keagamaan, budaya lokal dan pembangunan daerah. Dimensi-dimensi ini dapat lebih efektif, jika adanya homogenitas dalam sistem sosialnya. Faktor-faktor ini yang menyebabkan suatu komunitas yang berbeda-beda menjadi berhasil. Pengorganisasian komunitas, pengembangan berbasis komunitas dan penyediaan layanan berbasis komunitas adalah strategi pemberdayaan masyarakat yang cukup mumpuni. Pengorganisasian masyarakat berpusat pada mobilisasi warga untuk mengatasi masalah bersama. Sementara banyak faktor makro ekonomi dan struktur sosial dapat mendorong atau menghambat mobilisasi. Penelitian ini

³G. Laverack, *An identification and interpretation of the organizational aspects of community empowerment*, (Journal: Community development journal, 36 [2], 2001), h. 134-145.

⁴S. Ansari., K. Munir, & T. Gregg, *Impact at the bottom of the pyramid; The role of social capital in capability development and community empowerment*, (Journal: of Management Studies, 49 [4], 2012), h. 813-842

⁵D. Adamson, *Community empowerment; Identifying the barriers to purposeful citizen participation*, (International Journal of Sociology and Social Policy, 2010), Vol. 30 No. 3/4, pp. 114-126. <https://doi.org/10.1108/01443331011033319>. Lihat: R. Eversole, *Remaking participation, challenges for community development practice*. (Journal: Community development journal, 47 [1], 2012), h. 29-41. Lihat juga: J. N. Kimengsi, & S. A. Gwan, *Reflections on decentralization, community empowerment and sustainable development in Cameroon*. (International Journal of Emerging Trends in Social Sciences, 1 [2], (2017). h. 53-60.

menekankan pentingnya pengembangan kepemimpinan, perencanaan strategis, dan pembangunan jaringan (lintas daerah) dalam memobilisasi orang untuk menyelesaikan masalah secara bersama.⁶

Lebih lanjut, tema ini juga berhubungan erat dengan harmonisasi sosial dari kebijakan dan regulasi di kalangan komunitas etnis dari berbagai daerah. Penelitian terdahulu menyelidiki pembangunan komunitas kelas menengah China (*shequ jianshe*, sebutan untuk menata ulang komunitas). Wacana tentang komunitas dan kerukunan serta representasi diri aktivis komunitas tersebut diselidiki. Hasil mengungkapkan bahwa peran *suzhi* (kualitas) dalam membangun model Koeksistensi ‘harmonis’ (*hexie*) melalui bentuk-bentuk baru dari tata kelola masyarakat. Peneliti memahami bahwa pemberdayaan komunitas kelas menengah penting bagi tata kelola masyarakat; (1) membuat subjek baru yang cukup otonom untuk memilih apa yang akan dikonsumsi (dan karena itu merangsang pasar); (2) terciptanya subyek yang akan mengatur dirinya sendiri di tingkat komunitas tempat tinggalnya tanpa campur tangan pemerintah; dan (3) *benchmarking* aspirasi dan perilaku sosial, dengan penciptaan model perbaikan diri.⁷

Menurut Montanari (1995), dapat dipahami bahwa pemerintah memiliki intervensi terhadap pengembangan harmonisasi, kebijakan sosial dan regulasi sosial untuk menciptakan keadilan dan

⁶P. Dreier, *Community empowerment strategies* (The limits and potential of community organizing in urban neighborhoods. *Cityscape*, 1996), h. 121-159.

⁷L. Tomba, *Of quality, harmony, and community*, (Civilization and the middle class in urban China. *positions: east asia cultures critique*, 17[3], 2009), h. 591-616.

kesejahteraan.⁸Walaupun ada dimana, komunitas secara mandiri membangun tanpa campur tangan pemerintah. Meski perlu dicermati juga, keragaman dan dinamika komunitas dalam pluralitas budaya lokal itu, dimana terdapat kompleksitas kekuasaan dan keadaan yang merugikan, yang masing-masing merupakan sentral untuk memahami dan menuju masyarakat yang lebih berdaya dan bernilai guna. Gagasan dan aktualisasi pemberdayaan masyarakat yang mencakup pemberdayaan komunitas etnis memang kompleks, baik dalam dirinya sendiri maupun dalam proses interaksi dengan komunitas diluarnya, yang dalam dinamikanya sering terjadi kerjasama, persaingan dan konflik di berbagai bidang sosial, politik, dan ekonomi. Pemberdayaan komunitas secara konseptual memiliki keragaman strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kelompok-kelompok yang dirugikan. Strategi-strategi ini dapat secara luas diklasifikasi dalam bentuk kebijakan dan perencanaan, aksi sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan penyadaran diri pada beragam komunitas sosial.⁹

Faktanya, setiap pemberdayaan komunitas yang menyetujui perkembangan masyarakat, baik dalam perihal kesadaran publik, penerapan etika, dan interaksi kelembagaan sedang bergerak menuju pembentukan yang harmonis (budaya, profesional, dan sehat). Karena pemberdayaan hanya bisa harmonis atas dasar peningkatan spritual, nalar, dan materil yang dilakukan secara benar. Dan sebaliknya, komunitas yang tidak menyetujui

⁸I. J. Montanari, *Harmonization of social policies and social regulation in the European Community*, (European Journal of Political Research, 27[1], 1995), h. 21-45.

⁹S. Watt, C. Higgins, & Kendrick, A, *Community participation in the development of services; a move towards community empowerment*. (Community Development Journal, 35[2], 2000), h. 120-132.

akan semakin jauh dari harmonisasi sosial. Dapat dipahami bahwa, komunitas yang tidak memiliki dasar harmonisasi (spiritualitas dan perhatian) tidak dapat membentuk makna nilai yang bebas konflik dalam masyarakat.¹⁰

Pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan dan perencanaan dapat dicapai dengan mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Studi kasus terdahulu mengungkapkan bahwa dalam memberdayakan komunitas lokal berbasis wilayah membutuhkan efektifitas keterlibatan masyarakat. Sangat penting menjaga kepercayaan pembangunan, karena kapasitasnya dalam merangsang hubungan sosial-ekonomi komunitas lokal.¹¹ Hal tersebut juga tertuang dalam peraturan Kementerian Desa dengan PERMENDESA PDTT Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2020.¹² Dengan demikian pemberdayaan masyarakat di desa Bagelen, dituangkan dalam program-program pembangunan daerah yang dialokasikan anggarannya melalui APBD dan ADD (APBDesa).

¹⁰E. Bryndin, *Harmonization-Civilization Improvement Process*, (Global Journal of Human Social Science: Sociology & Culture, 20[1c], 2020), h. 15-19.

¹¹D. Clark., R. Southern, & J. Beer, *Rural governance, community empowerment and the new institutionalism: A case study of the Isle of Wight*, (Journal of Rural Studies, 23[2], 2007), h. 254-266.

¹² http://kedesa.id/id_ID/repository/permendesa-pdtt-nomor-19-tahun-2019-pelimpahan-dan-penugasan-urusan-pemerintahan-bidang-pemberdayaan-masyarakat-dan-deserta-transmigrasi-tahun-anggaran-2020.diakses pada 24 juni 2020

Tatanan Pemberdayaan sosial harus tunduk pada perubahan (reorganisasi) oleh aktor-aktor (*stakeholder*) yang berinteraksi. Perubahan juga harus mempunyai legitimasi publik melalui prosedur harmonisasi. Kebijakan-kebijakan aksi afirmatif atau diskriminasi positif mengakui keberadaan kelompok-kelompok yang dirugikan (kadang-kadang dinyatakan secara spesifik dalam istilah-istilah struktural), dan berupaya untuk memperbaiki keadaan ini dengan 'mengubah aturan-aturan' untuk menguntungkan kelompok yang dirugikan.¹³

Di negara yang padat penduduk seperti Indonesia menjalankan kebijakan transmigrasi dapat dilihat sebagai pemberdayaan dalam konteks peningkatan sumber daya, akses dan mata pencaharian bagi masyarakat. Secara teoritis, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran, membangun komunitas imajer, bangsa yang bersatu. Mereka berjuang untuk membangun visi komunitas mereka sendiri ditempat dimana mereka berada.¹⁴ Masyarakat transmigran diharapkan memperoleh pendapatan yang cukup melalui pemerataan penduduk ke wilayah baru dengan memberikan berbagai modal kebutuhan dasar.¹⁵ Literatur menyebutkan bahwa di beberapa wilayah seperti Kalimantan, program transmigrasi cukup berhasil.¹⁶

¹³*Ibid.*,

¹⁴B. A. Hoey, *Nationalism in Indonesia*, (Building imagined and intentional communities through transmigration. *Ethnology*, 2003), h. 109-126.

¹⁵Y. Yanmesli., R. Rijanta., S. Sutikno & N. Harahap, *Livelihood Strategies and the Welfare of Transmigrants*, (Indonesian Journal of Geography, 46[1], 2014), h. 44-51.

¹⁶W. Clauss., H. D. Evers, & S. Gerke, *The formation of a peasant society*, (Javanese transmigrants in East Kalimantan. *Indonesia*, [46], 1988), h. 79-90. Lihat: Sutanto, J. E. *The success of transmigrants from east java in migrant location and its impact on the behavior of the society from the origin*. (International: Journal of Academic Research, 2015), h. 7

Studi literatur menjelaskan bahwa untuk memahami pemberdayaan masyarakat dalam regenerasi dan perencanaan kebijakan yang tepat harus memperhatikan kondisi keadaan lokal.¹⁷ Hal itu adalah bagian dari upaya menjaga ketahanan. Masyarakat membentuk ketahanan untuk meningkatkan perekonomian secara finansial dan kehidupan sosial yang lebih baik. Konsep ketahanan ini secara rutin dikedepankan oleh pembuat kebijakan sebagai cara masyarakat untuk menggunakan dan mengembangkan sumber daya mereka dan merespon perubahan secara positif. Studi terbaru menyebutkan bahwa, sektor komunitas yang semakin terorganisir dan berjejaring dengan baik menciptakan masyarakat yang benar-benar tangguh.¹⁸

Bukti empiris mengungkapkan bahwa kebijakan transmigrasi tidak selalu berdampak baik terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat lokal. Walaupun secara teoritis, tujuannya benar namun di beberapa wilayah komunitas etnis lokal justru menimbulkan masalah baru.¹⁹ Ada faktor lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan rakyat adil, makmur dan sejahtera melalui kebijakan transmigrasi.²⁰ Misalnya seperti

¹⁷N. Bailey, *Understanding community empowerment in urban regeneration and planning in England; putting policy and practice in context*, (Planning Practice & Research, 25[3], 2010), h. 317-332.

¹⁸P. Revell, & E. Dinnie, *Community resilience and narratives of community empowerment in Scotland*, (Community Development Journal, 55[2], 2020), h. 218-236

¹⁹Geldof, D., Schrooten, M., & Withaeckx, S. *Transmigration: the rise of flexible migration strategies as part of superdiversity*. (Policy & Politics, 45[4], 2017), h. 567-584

²⁰B. V. Nurdin, & R. Bustami, *Food Culture, Food Security and the Harmonization of Interethnic Groups; A Case Study of Karta Village in the Transmigration Area of Lampung Province, Indonesia*, (International: Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 2[1], (2015), h. 18-24.

dimensi personal, relasional, kultural, dan struktural dalam rangka mewujudkan perdamaian dan keamanan nasional yang berkelanjutan.²¹

Sebuah penelitian dengan menggabungkan Teori Konflik, Teori Transformasi Konflik, Teori Kerjasama, Konsep Perdamaian, dan Teori Identitas Sosial mengungkapkan, bahwa salah satu faktor yang berperan sebagai kunci keberhasilan menghindari potensi konflik transmigrasi adalah peran dari dimensi harmonisasi sosial atau harmonisasi antar etnis.²² Peran ini adalah bagian dari hubungan keterikatan antara masyarakat lokal dan masyarakat transmigran untuk memperkuat dan membangun perdamaian di tengah masyarakat multi-budaya. Dengan demikian, timbulnya harmonisasi (adat istiadat, agama, dan nasionalisme) mampu menghindari terjadinya konflik antar etnis.²³

Di negara seperti Belgia, Cina-Malaysia, Jepang, dan Singapura, masyarakat transmigran tidak hanya menghadapi masalah dan tantangan. Terkadang mereka kesulitan dalam membangun jejaring sosial dan harus

²¹A. Kurniadi., T. Legionosuko, &W. Poespitohadi, *Conflict Transformation Between Balinese And Lampung Ethnic In Realizing Sustainable Peace In Balinuraga Village*; Way Panji District Lampung Selatan Regency, (Jurnal: Pertahanan & Bela Negara/ April, 9[1], 2019)

²²B. V. Nurdin, *Op. Cit.*, h. 18-24. Lihat: A.A N.A. Kumbara & A.S.K. Dewi, *Managing potential conflicts and maintaining tolerance of inter-religious relations in multi-religious communities: case studies of ekasari village, jembarana district, bali province*. (In seminar proceeding of international seminar culture change and sustainable development in multidisciplinary approach [p. 12], 2018),

²³H. Hartoyo., H. Sindung, F. Teuku, and S. Sunarto, *The role of local communities in peacebuilding in post-ethnic conflict in a multi-cultural society*, (*Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, 2020), h. 33-44, Vol. 12 No. 1, pp., <https://doi.org/10.1108/JACPR-06-2019-0419>. Lihat: G. Acciaoli, *Grounds of conflict, idioms of harmony: custom, religion, and nationalism in violence avoidance at the Lindu Plain*, (Central: Sulawesi Indonesia, [72], 2001), h. 81-114. Lihat juga: I. S. Wekke., S. Ladiqi & R. Bustami, *Bugis and Madura migration in Nusantara*, (Religiosity, harmony, and identity from eastern Indonesia; Ulul Albab, 2019), 20(1), 1

dihadapkan pada sejumlah resiko yang terkait dengan budaya lokal.²⁴ Di Indonesia, pemberdayaan komunitas etnis yang dilakukan dengan melaksanakan transmigrasi skala besar juga menimbulkan konflik transmigran. Timbulnya berbagai perselisihan tanah, radikalisme, hingga menimbulkan kekerasan antar etnis.²⁵ Kebijakan pemerintah dianggap kurang tepat dalam mengatasi persoalan antara melakukan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan komunitas melalui program transmigrasi.²⁶

Transmigrasi bukanlah kebijakan baru, awalnya dimulai dibawah pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Setelah kemerdekaan, tujuan transmigrasi berfokus pada; 1) upaya untuk memindahkan jutaan orang Indonesia dari pulau berpadat penghuni seperti Jawa, Bali, dan Madura ke luar pulau yang kurang padat penduduknya; 2) pengentasan kemiskinan dengan menyediakan lahan dan peluang baru dalam rangka menghasilkan pendapatan bagi pemukim miskin yang tidak mempunyai lahan; dan untuk lebih mengefektifkan potensi dari pulau-pulau

²⁴S. Withaecx., M.Schrooten & D. Geldof, *Living across borders: The everyday experiences of Moroccan and Brazilian transmigrants in Belgium*, (Crossings: Journal of Migration & Culture, 6 [1], 2015), h. 23-40. Lihat: T. Lam, & B. S. Yeoh, *Negotiating 'home' and 'national identity'*, (Chinese-Malaysian transmigrants in Singapore: Asia Pacific Viewpoint, 45[2], 2004), h. 141-164. Lihat juga: K. Yamanaka, *Changing family structures of Nepalese transmigrants in Japan*, (Split-households and dual-wage earners: *Global Networks*, 5[4], 2005), h. 337-358.

²⁵Barter, S. J., & Côté, I. *Strife of the soil? Unsettling transmigrant conflicts in Indonesia*, (Journal of Southeast Asian Studies, 2015), h. 60-85. Lihat: K. E. Schulze, *The "ethnic" in Indonesia's communal conflicts; violence in Ambon, Poso, and Sambas*, (Ethnic and racial studies, 40[12], 2017), h. 2096-2114; Lihat juga: R. Rozak., R.P. Dalimunthe & A. Upiandudin, *Preventing Radicalism And Managing Cultural Diversity In Transmigration Areas In Indonesia*, (*International: Journal Of Civil Engineering And Technology (IJCIET)*, 8[8], 2017), h. 1068-1080.

²⁶T. Van Der Wijst, *Transmigration in Indonesia: An evaluation of a population redistribution policy*, (Population: Research and Policy Review, 4[1], 1985), h. 1-30.

terluar yang berada di wilayah Indonesia.²⁷ Sebagai negara berkembang yang padat penduduk, program transmigrasi adalah salah satu program moneter yang tepat. Namun berbagai dampak yang timbul juga tidak dapat dikesampingkan.

Prinsip-prinsip keadilan sosial yang memandu pekerjaan pengembangan masyarakat dari berbagai etnik semakin terancam oleh ketidaksetaraan ekonomi. Dengan demikian, sangat penting keadilan sosial tersebut diimplementasikan dengan baik.²⁸ Untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu mendukung dan menghambat kebijakan pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat seperti pada program transmigrasi. Dan untuk menghindari terjadinya konflik komunitas etnis sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah dan negara lain. Penelitian ini mengambil studi pada permasalahan kritik terhadap pemberdayaan komunitas transmigran diawali dari adanya pola komunikasi dan interaksi masyarakat Islam Lampung dan Jawa Islam di daerah transmigrasi Bagelen dalam berbagai kehidupan, sebagaimana telah diungkapkan:

“... secara komprehensif tentang pola dan dinamika hubungan diantara mereka, Pola hubungan diantara suku Jawa Islam dan Islam Lampung telah memenuhi syarat berlangsungnya komunikasi antarbudaya, karena mereka yang terlibat dalam komunikasi tersebut adalah individu-individu yang berbeda budaya. Fakta itu membuktikan, ketika diantara warga itu berkomunikasi antarbudaya, kedua etnik itu memperlihatkan konsistensinya dalam menjalankan nilai dan ajaran budaya yang mereka anut dan pahami. Konsistensi ini terlihat dengan

²⁷M. Adhiati, & A. Bobsien, *Indonesia's transmigration programme-an update*, (Report prepared for Down to Earth, 2001), pp. 1-44.https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55048056/Transmigration_update_2001.pdf

²⁸M. Ledwith, *Community development* (A critical approach: Policy Press, 2020).

jasas ketika mereka menjalankan setiap prosesi dan upacara adat berdasarkan peristiwa tertentu yang sementara mereka hadapi.²⁹

Selain realitas sosial budaya itu, menarik juga dicermati permasalahan ”*Transmigrasi dari daerah asal sampai benturan budaya di tempat pemukiman*”; dan selanjutnya perlu dikaji secara mendalam, sebagaimana dikemukakan peneliti Universitas Kristen Satya Wacana, dalam kata pengantarnya, yang menyatakan:

“Pendekatan yang terpadu dalam program transmigrasi terutama dalam kaitan industrialisasi serta pembangunan daerah nampak perlu direncanakan secara sungguh-sungguh, sehingga dapat diciptakan situasi dimana perpindahan penduduk akan terjadi dengan tanpa banyak campur tangan pemerintah. Disamping itu hal lain yang tak kalah pentingnya adalah sampai sejauhmana informasi tentang program serta keberhasilan transmigrasi dapat betul-betul diterima serta menyentuh hati calon transmigran. Salah satu cara yang akhir-akhir ini digunakan adalah dengan mengirim transmigran yang telah berhasil kembali ke tempat asal untuk memberi informasi kepada saudara-saudaranya, rekan sedesa atau sekecamatan tentang keberhasilannya. Orang inilah yang dapat mengkomunikasikan harapan-harapan yang telah dicapainya melalui cara dan bahasa yang paling dimengerti oleh calon transmigran. Tentu usaha ini patut digalakkan.”³⁰

Sebenarnya pemberdayaan masyarakat tidak sekedar memerlukan ketulusan hati dan niat baik semata untuk menolong kaum lemah dan terkebalakang. Sementara fakta, masih banyak orang yang sering dan membanggakan diri ketika mereka bekerja dengan penuh tipu muslihat, kebohongan dan kekejaman. Berarti diperlukan pemahaman yang benar

²⁹ Khomsahrial Romli, *Dinamika Masyarakat Transmigrasi Jawa Islam dan Masyarakat Islam Lampung di Kabupaten Pesawaran; Studi Komunikasi Antar budaya*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), h. 169

³⁰ Rukmadi Warsito, Dkk., Kata Pengantar dalam buku: *Transmigrasi dari Daerah Asal sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*”, (Jakarta: Universitas Kristen Satya Wacana, Rajawali, 1984), h. xi., cet. pertama,

tentang berbagai permasalahan yang didasarkan pada pengetahuan, kearifan, kejujuran, keberanian dan kekuatan. Sehingga para praktisi pemberdayaan dapat bekerja berdasar teori dan konsep pemberdayaan secara ilmiah.

Mengkaji pemberdayaan komunitas yang berkelanjutan untuk membangun harmoni sosial tentu saja perlu melakukan integrasi tujuan lingkungan, ekonomi dan sosial.³¹ Selain itu perlu dikaitkan dengan berbagai masalah konflik yang intensitas dan keluarnya sejak era reformasi semakin meningkat di Indonesia. Bahkan lebih mendasar dari itu, tidak dapat disangkal telah banyak peristiwa yang mencengangkan banyak kalangan. Studi mengungkapkan bahwa tanpa adanya pemberdayaan komunitas melalui harmonisasi sosial maka perubahan sosial hingga kebijakan pemerintah mampu memperumit gambaran mengenai kontak antar kelompok etnis di dalam masyarakat. Adanya ketidaksetaraan memicu konflik, prasangka buruk, dan aksi sosial di kalangan minoritas.³²

Sebenarnya bangsa Indonesia selama ini lebih banyak ditandai oleh ciri-ciri “bangsa nan ramah”, “bangsa nan penuh toleransi dan penuh harmoni”, namun pada saat pasca Orde Baru ternyata masyarakat Indonesia justru menunjukkan karakter kebingingannya dengan *degree of violence*-nya yang menembus “batas-batas rasa kemanusiaan”, yang tidak bisa diterima oleh bangsa manapun di dunia.

³¹M. Roseland, *Sustainable community development*, (Integrating environmental, economic, and social objectives: Progress in planning, 54[2], 2000), h. 73-132.

³²D. E. Glasford, & J. Calcagno, *The conflict of harmony: Intergroup contact, commonality and political solidarity between minority groups*, (Journal: of Experimental Social Psychology, 48[1], 2012), h. 323-328.

Keharmonisan sosial merupakan keharusan bagi pemberdayaan masyarakat. Tanpa keharmonisan sosial maka potensi konflik, kekerasan, dan gejolak sosial dapat meningkat. Hal itu dapat menghalangi kesejahteraan masyarakat, dalam ajaran islam keharmonian sangat sentral dalam kemajuan masyarakat agar satu diantara lainnya saling mengenal dan menghargai antar umat manusia, sebagaimana Firman Allah SWT :

اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ ۖ لَتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ وَأُنثَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَٰ أَيُّهَا خَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ ۖ إِنَّ أَتَقْنَكُمْ

“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. “ (QS. Al Hujurat: 13)

Faktor kunci yang dapat meningkatkan keharmonisan sosial adalah saat orang menghidupkan arti jati diri mereka. Inilah yang Konfusius disebut *Zhengming* ("rectification of names"). Tanpa perbaikan jati diri, masyarakat akan terus dirundung ketidakharmonisan. Sebagai contoh benua Afrika diliputi masalah ketidakharmonisan sosial yang disebabkan oleh kepemimpinan yang buruk, pemerintahan yang buruk, korupsi dan penggelapan dana publik, penculikan dan penyanderaan, kegelisahan generasi muda, migrasi ilegal, degradasi lingkungan, dll. Sulit ada keharmonisan sosial ketika warga negara mengalami deprivasi sosial.³³

Metaphora harmonisasi sosial dapat dilihat dari hadits berikut ini :

³³M.O. Ikeke, *Confucius' Philosophy of Zhengming* (Rectification of Names), Implications for Social Harmony in Africa, (Faculty of Humanities and Social Sciences of Aurel Vlaicu, Arad, 2012), h. 129. [http://www.jhss.ro/downloads/22/articles/10%20vol%2011%20no%202%20\(22\)%202020%20BT-129-142.pdf](http://www.jhss.ro/downloads/22/articles/10%20vol%2011%20no%202%20(22)%202020%20BT-129-142.pdf)

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى
لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

“Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR. Bukhari no. 6011 dan Muslim no. 2586)

Faktor-faktor yang meningkatkan keharmonisan sosial menjadi subjek diskusi dalam penelitian Sharma (2015). Sharma berpendapat bahwa: “kunci untuk mencapai Harmoni Sosial terletak pada menjadi orang yang benar-benar sosial. Itu bisa dilakukan tidak hanya dengan memahami milik sendiri kebutuhan dan prioritas, tetapi juga menghormati orang lain yang sama.”³⁴

Berdasar hal itu, menarik diajukan pertanyaan ‘mengapa konflik sosial tidak dapat dielakkan terjadi pada bangsa manapun ketika terdapat stress sosial yang berakar pada banyak faktor penyebab telah mencapai titik-puncaknya?. Pertanyaan itu diumuskan oleh peneliti sosial Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beberapa tahun yang lalu, sebagaimana dinyatakan.

“Terlebih lagi, secara geografis Provinsi Lampung merupakan wilayah yang pada beberapa dekade terakhir ini memiliki konflik sosial yang cukup tinggi, dengan akar masalah yang beragam, mulai dari persoalan sengketa lahan, kriminalitas, persaingan politik, sampai perseteruan kelompok pemuda. Berbagai pandangan spekulatif dari kalangan politikus dan akademisi pun muncul. Oleh karena itu, melihat fenomena seperti itu cukup menarik untuk dikaji dan diteliti tentang bagaimana konflik itu muncul dan bagaimana penyelesaiannya serta perlu adanya pemetaan resolusi konflik yang komprehensif.”³⁵

³⁴R.N. Sharma., *Peace, Development and Social Harmony*, (in Horizons of Holistic Education, 1, 2014), p. 151-157, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.678.1071&rep=rep1&type=pdf>, (accessed 10 November 2019).

³⁵Anshori, M. Afif., *Pemetaan Resolusi Konflik di Lampung; Sebuah Penelitian Awal*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung, 2013, h. 3

Memang sebenarnya fenomena konflik dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi seiring adanya berbagai peristiwa, yang diantaranya dinyatakan dalam laporan hasil penelitian tentang "Pemetaan Resolusi Konflik di Lampung: Sebuah Penelitian Awal", yang menyatakan:

"... benturan sosial berlangsung dengan mengambil bentuk aneka-rupa serta menyentuh hampir di segala aspek ("*frame of conflict*") kehidupan masyarakat (konflik *agraria*, *sumberdaya alam*, *nafkah*, *ideologi*, *identitas-kelompok*, *batas teritorial*, dan semacamnya). Satu hal yang perlu dicatat yaitu: apapun bentuk benturan sosial yang berlangsung akibat dari konflik sosial, maka akibatnya akan selalu sama yaitu *stress sosial*, *kepedihan* (*bitterness*), *disintegrasi sosial* yang seringkali juga disertai oleh musnahnya aneka **aset-aset material** dan **non-material**. Kehancuran asset-asset non-material yang paling kentara ditemukan dalam wujud "dekapitalisasi" modal sosial yang ditandai oleh hilangnya *trust* di antara para-pihak yang bertikai, rusaknya *networking*, dan hilangnya *compliance* pada tata aturan *norma dan tatanan sosial* yang selama ini disepakati bersama."³⁶

Pemetaan konflik dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan pemberdayaan komunitas sosial yang dinamis dalam ragam budaya lokal, oleh karenanya menarik dicermati hasil penelitian sosial itu, yang dalam kesimpulannya dinyatakan:

1. Faktor penyebab timbulnya konflik sosial di Lampung dapat dipetakan menjadi tiga: *pertama*, faktor perebutan Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana yang terjadi di Mesuji. *Kedua*, faktor penguasaan sumber ekonomi sebagaimana konflik yang terjadi di Dapasena Tulangbawang. *Ketiga*, faktor sosial sebagai- mana terjadi di Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Selatan.
2. Kantong-kantong wilayah yang paling sering terjadi konflik adalah Kabupaten Mesuji, Bumi Dapasena Tulangbawang, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan.

³⁶ *Ibid.*, h. 1-2

3. Proses penyelesaian konflik biasanya dalam bentuk mediasi yang difasilitasi pihak ketiga baik dari kalangan aparat keamanan, tokoh-tokoh adat/agama, maupun pemerintah daerah.³⁷

Selain itu ada juga penelitian ‘Konflik Komunal Berbasis Sara yang mendukung akan pentingnya studi tentang harmoni berbasis budaya lokal, sebagaimana penelitian yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, yang dalam latar belakangnya dijelaskan, ‘pemindahan suatu etnik oleh rezim Suharto dari suatu daerah luar ke daerah lain di mana terdapat etnik lokal yang dominan, menurutnya, telah menimbulkan perasaan tidak senang dari penduduk lokal dan menjadikan kompetisi terhadap tanah, sumber daya alam dan akhirnya kompetisi kekuasaan’.³⁸ Ketika ditelusuri lebih mendalam ternyata beliau mengutip pernyataan pengamat intelijen Lampung, yang menyatakan: ” faktor sekuriti sebagai sumber utama dari fenomena konflik komunal di Lampung. Konflik antar kelompok massa yang kerap terjadi di Lampung merupakan bukti lemahnya aparat intelijen. Kelemahan sudah muncul sejak tingkatan polsek dan otomatis menjalar ke polda. Dampaknya, antisipasi lambat. Tahu-tahu sudah pecah konflik. baru aparat ramai-ramai datang. Kalau intelijen berjalan, tentunya konflik bisa dibendung.³⁹ Sementara peneliti Pusat Penelitian Sumberdaya Regional (PSDR) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), berpendapat: ‘sumber konflik terletak

³⁷ *Ibid.*, h. 88

³⁸ Henry Iwansyah, *Segregasi sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara; Studi di Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M); Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2013), h. 4

³⁹ *Ibid.*, h. 4

pada faktor ekonomi penduduk'.⁴⁰ Berarti, konflik-konflik yang pernah terjadi tidak lepas dari kecemburuan antara penduduk lokal dan pendatang, kesejangan sosial ekonomi. Karenanya tidak boleh dibiarkan terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk lokal dan pendatang, terlebih lagi di daerah rawan konflik seperti daerah transmigrasi.

Lebih lanjut dapat di telusuri secara mendasar, selain dari faktor-faktor di atas, konflik komunal juga sering dikaitkan dengan fenomena segregasi sosial, sebab masyarakat rentan konflik (*vulnerable society*) akibat segregasi sosial dari etnis dan agama, ketidakadilan ekonomi dan politik, serta rendahnya kapasitas tata kelola konflik negara. Banyak kasus konflik yang terjadi di berbagai kota lain di luar Lampung, seperti kasus di Solo, terjadi konflik Arab-pribumi tahun 1972, konflik keturunan Tionghoa-pribumi tahun 1980 dan yang terakhir kerusuhan yang bernuansa rasial pada tahun 1998, yang dapat ditengarai berbagai peristiwa itu ada kaitannya dengan segregasi sosial dan kesenjangan ekonomi. Tegasnya, sistem dualisme keraton yang membagi kota menjadi dua wilayah kekuasaan, yaitu Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran, sehingga kemudian dikenal istilah 'kampung Lor' dan 'kampung Kidul', telah mengakibatkan munculnya ketegangan di masyarakat pada waktu itu. Kolonialisme juga berperan dalam segregasi sosial, yang ditunjukkan dengan keberadaan kampung pribumi, kampung Arab, kampung Cina, dan kampung Eropa.

⁴⁰ *Ibid.*,

Beberapa catatan sejarah kolonisasi memperjelas tentang desa Bagelen yang terletak di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sebagaimana dinyatakan: “Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, daerah Lampung menjadi keresidenan yang tergabung ke dalam Propinsi Sumatera Selatan yang beribukota di Palembang, Baru pada tahun 1964, melalui Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1964, terbentuklah Propinsi Lampung dengan ibukota Tanjungkarang-Telukbetung (sekarang menjadi Bandar Lampung)”.⁴¹ Lebih lanjut dinyatakan, kolonisasi pertama dilaksanakan pemerintahan Hindia Belanda pada masa penjajahan tidak terlepas dari adanya sejarah perlawanan pahlawan Raden Intan pada abad ke sembilan belas (1826-1856) selama 30 tahun; kemudian setelah merdeka beliau diakui sebagai pahlawan nasional. Sementara, jika dikaji dari aspek pengembangan masyarakat, masyarakat Lampung yang terbuka dan memiliki penerimaan yang baik terhadap masyarakat pendatang; dan pada waktu itu masyarakat adat memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas dan masih berupa hutan.

Perspektif historis yang relevan untuk penelitian disertasi ini, ternyata *kolonisasi* yang kini lebih populer dengan nama *Transmigrasi* yang pertama dan berada di Desa Bagelen, telah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905. Desa Bagelen terletak di Kecamatan Gedong Tataan, dimana pada masa itu dikirimlah para kolonis untuk pertama kalinya

⁴¹Lusi Evi Afrina, (Editor), *Penelusuran Sejarah Kolonisasi Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Afdeeling Telok Betong (1905-1930)*, (Kabupaten Pesawaran: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesawaran, 2017), h. 9

untuk mengisi lahan-lahan yang sudah dipersiapkan bagi para kolonis. Desa Bagelen dijadikan tempat tinggal pertama para kolonis sampai sekarang; dan masih dapat disaksikan sebagai bukti-bukti sejarah yang ada dalam masyarakat Lampung. Lebih lanjut, peneliti senior dan guru besar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung itu menjelaskan dalam latar belakang penelitiannya.

Menurut sejarah transmigran di Lampung telah dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Penelusuran akademis berdasar catatan diperoleh dan dapat dijelaskan.

“Transmigran telah datang sejak tahun 1905 di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan, yaitu sejumlah 155 Kepala Keluarga (KK). Setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia, penempatan masyarakat transmigrasi di Provinsi Lampung terus berlanjut. Penempatan pertama dimulai tahun 1950, dengan menempatkan 22 KK (77 orang) di Sukadana (ketika itu: masih Kabupaten Lampung Tengah; dan sekarang menjadi ibukota Kabupaten Lampung Timur); yang selanjutnya diikuti dengan penempatan para transmigran dari Jawa Islam pada beberapa wilayah lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Dalam catatan Dinas Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2004 telah ditempatkan transmigran program pemerintahan sebanyak 290.358 Kepala Keluarga atau 871.461 orang.”⁴²

Secara konseptual dapat dirumuskan definisi operasional penelitian yang didasarkan adanya ragam komunitas yang berkembang secara dinamis di lokasi penelitian, dalam hal ini di desa Bagelen yang diawali dari adanya kolonisasi, sehingga dapat dikembangkan ilmu, pengetahuan, sains dan teknologi yang semakin dikenal oleh masyarakat global. Sebab dapat diketahui sejak berdirinya desa tersebut, ketika pemerintah kolonial Belanda melaksanakan *koloniasasi* di Lampung. Menurut peneliti dan guru besar

⁴²Khomsahrial Romli, *Op. Cit* , h. 3

Universitas Islam Negeri yang tentang transmigran di Lampung, beliau menyatakan.

“Sejarah memperjelas pada tahun 1901 wilayah Gedung Tataan merupakan daerah marga, yaitu Marga *Way Semah* yang meliputi 13 kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung. Ketiga belas kampung tersebut adalah kampung (1) Gedung Tataan; (2) Kurungan Nyawa; (3) Negeri Sakti; (4) Suka Banjar; (5) Bernung; (6) Kebagusan; (7) Pampangan; (8) Padang Ratu; (9) Kagungan Ratu; (10) Negeri Katon; (11) Halangan Ratu; (12) Negara Saka dan (13) Marga Kaya.”⁴³

Perkembangan masyarakat pedesaan dalam wilayah Gedung Tataan terjadi sejalan dengan dinamika pembangunan daerah. Setelah definitifnya kabupaten Pesawaran, ternyata Gedung Tataan telah maju dengan pesat, dimana kecamatan ini telah terdiri dari 19 (sembilan belas) desa dan kelurahan, yaitu: (1) Padang Ratu; (2) Bagelen; (3) Pampangan; (4) Waylayap; (5) Sukadadi; (6) Bogorejo; (7) Sukaraja; (8) Gedung Tataan; (9) Kutoarjo; (10) Karang Anyar; (11) Bagelen; (12) Kebagusan; (13) Wiyono; (14) Tamansari; (15) Bernung; (16) Sungai Langka; (17) Negeri Sakti; (18) Kurungan Nyawa; (19) Suka banjar. Dinamika masyarakat itu menunjukkan adanya pembangunan yang berkembang dan berkelanjutan di daerah yang lokasinya terletak sebagai penyangga Ibukota Provinsi Lampung.

Beberapa argumen historis dan empirik itu mengindikasikan betapa harus diakui bahwa tidak ada *pendekatan tunggal* yang mampu memberikan penjelasan secara utuh dan komprehensif terhadap gejala sosial yang ada, sebab selalu saja ada saling hubungan antar konsep, teori dan kebijakan yang satu dengan lainnya. Mengingat masing-masing pendekatan penelitian

⁴³ *Ibid.*, h. 98-99

yang digunakan untuk mengungkap dan menjelaskan kebenaran ilmiah memiliki basis argumen tersendiri dengan kadar kebenaran yang ditentukan oleh seberapa dekat argumen yang dibangun berbasis realitas sosial, ekonomi, budaya dan permasalahan pembangunan daerah yang diamati dan dikaji secara ilmiah.

B. Identifikasi Masalah

1. Identifikasi

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan komunitas sebagai penyederhanaan proses kerja untuk kebutuhan pembangunan daerah yang lebih efisien melalui berbagai kebijakan yang efektif guna menemukan proses yang sama sekali baru dengan meninggalkan proses operasi yang lama, tentunya bernilai guna untuk membuat model sosial dan loncatan dalam pencapaian hasil kerja organisasi, kelompok dan komunitas sosial.
- b. Metode pemberdayaan komunitas sebagai pendekatan, cara kerja dan upaya yang dirumuskan sebagai cara baru dalam melakukan kegiatan dengan hasil yang lebih baik atau efektif.
- c. Pemberdayaan struktur organisasi sebagai upaya pengadopsian model organisasi atau komunitas sosial baru yang menggantikan model lama yang bersifat kaku, hierarkis, dan terkotak-kotak. Inovasi pemberdayaan komunitas semacam ini menghemat

tenaga kerja dan membuat pekerjaan cepat selesai, sehingga perlu mengakomodasi pemberdayaan komunitas sebagai proses menuju masyarakat harmoni.

- d. Pemberdayaan dalam hubungan pembaharuan hubungan dengan pihak luar seperti pelanggan dan pemasok, dengan cara memasukkan pihak luar sebagai bagian dari kegiatan bisnis demi peningkatan keuntungan organisasi atau komunitas sosial.

2. Batasan Masalah

Berikutnya terkait fenomena dan berbagai fakta empiris yang telah dikemukakan pada latar belakang dan identifikasi permasalahan itu, maka dapat dirumuskan batasan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan komunitas yang berbeda etnik dan penganut agama perlu dirangcang studi ilmiah yang difokuskan pada upaya mencapai tujuan tertentu, diantaranya membangun harmoni sosial yang dapat menggantikan rencana lama yang kurang menguntungkan dan belum efisien bagi pembangunan daerah.
- b. Pemberdayaan komunitas tentu saja membutuhkan berbagai model sosial sebagai upaya pemberdayaan yang dilakukan pada beragam komunitas secara sistemik, termasuk cara yang baru atau meningkat pada pihak sektor publik untuk beroperasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan dikalangan

pemerintahan, tokoh agama, pemimpin masyarakat dan berbagai pihak terkait.

- c. Pemberdayaan dalam mengimplementasikan pemberdayaan terhadap komunitas yang berbeda etnik dan budaya membutuhkan pelayanan yang baru, guna meningkatkan kualitas pelayanan administratif sebagai proses yang dapat diterapkan secara efektif dan efisien di masa depan.

C. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang permasalahan tersebut, maka fokus penelitian dapat dirumuskan untuk mengungkap kebenaran ilmiah yang diarahkan agar berguna untuk menjelaskan: “Bagaimanakah pemberdayaan komunitas Etnik Jawa Muslim dan Etnik Lampung Muslim dapat membangun harmoni sosial di kalangan transmigran Bagelen di Lampung?”. ”Berikutnya, agar penelitian ilmiah ini dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, maka dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang lebih spesifik sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah terkait pemberdayaan komunitas Etnik Jawa Muslim dan Etnik Lampung Muslim dalam pluralitas budaya lokal?.
- b. Bagaimanakah model sosial dari pemberdayaan komunitas Etnik Jawa Muslim dan Etnik Lampung Muslim yang dapat membangun harmoni sosial dalam pluralitas budaya lokal, terutama dikalangan transmigran Bagelen ?.

- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya pemberdayaan komunitas etnik Muslim yang dapat membangun harmoni sosial dan menghindari konflik sosial dalam pluralitas budaya lokal, terutama dikalangan transmigran Bagelen di Lampung ?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian deskriptif yang bersifat kasus ini bertujuan untuk menjelaskan dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang:

- a. Kajian teori pengembangan masyarakat Islam yang berbasis dan difokuskan pada kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan komunitas Etnik Jawa Muslim dan Etnik Lampung Muslim yang dapat membangun harmoni sosial dalam pluralitas budaya lokal khususnya untuk menghindari konflik antar etnis dan membangun perekonomian masyarakat yang sesuai dengan asas keadilan sosial.
- b. Konsep pemberdayaan komunitas Etnik Jawa Muslim dan Etnik Lampung Muslim yang dapat membangun harmoni sosial dalam pluralitas budaya lokal, terutama dikalangan transmigran Bagelen.
- c. Faktor-faktor penghambat dan pendukung upaya pemberdayaan komunitas etnik Jawa Muslim dan etnik Lampung Muslim yang dapat membangun harmoni sosial dalam pluralitas budaya lokal, terutama dikalangan transmigran Bagelen di Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun konseptual bidang ilmu pengembangan masyarakat Islam, yang terfokus pada:

- a. Kebijakan Pemerintah terkait Pemberdayaan komunitas Etnik Jawa Muslim dan Etnik Lampung Muslim dapat membangun harmoni sosial dalam pluralitas budaya lokal.
- b. Konsep pemberdayaan komunitas Etnik Jawa Muslim dan Etnik Lampung Muslim yang dapat membangun harmoni sosial dalam pluralitas budaya lokal, terutama dikalangan transmigran Bagelen.
- c. Faktor-faktor penghambat dan pendukung upaya pemberdayaan komunitas etnik Jawa Muslim dan etnik Lampung Muslim yang dapat membangun harmoni sosial dalam pluralitas budaya lokal, terutama dikalangan transmigran Bagelen di Provinsi Lampung.

E. Kajian Penelitian Yang Relevan

Sebenarnya hasil penelitian yang relevan dengan kajian pemersalahan penelitian ini, diantaranya mengenai Pengembangan Masyarakat Islam yang mengkaji ‘Pengaruh Globalisasi Budaya’ sudah ada yang membahas, tetapi pemberdayaan komunitas yang beragam etnik belum ada yang melakukan, diantara beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. Pengaruh Globalisasi Budaya dan Pemberdayaan FELDA Terhadap Akhlak Remaja Muslim di Kuantan-Pahang-Malaysia, yang ditulis

oleh Azhar Bin Jaafar @ Ramli, dalam bentuk disertasi. Beliau alumni pertama bidang Pengembangan Masyarakat Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Studi itu dilakukan di Malaysia, dan menjelaskan: Globalisasi telah membawa pengaruh hampir keseluruhan aspek kehidupan, baik pengaruh positif maupun negatif. Generasi yang paling mudah terbawa oleh pengaruh globalisasi yaitu para remaja muslim. Remaja muslim merupakan generasi pewaris dan penerus perkembangan sebuah negara bangsa. Mereka perlu diberikan perhatian yang teliti dan serius, terutama dalam menghadapi pengaruh globalisasi supaya mereka tidak terbius oleh pengaruh-pengaruh buruk globalisasi. Mereka perlu diberikan pandangan dan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga, pada akhirnya diharapkan mereka mampu menjaga akhlak yang sesuai dengan agama, adat, budaya dan kebiasaan masyarakat.

Hasil penelitian menjelaskan adanya pemahaman dan persepsi remaja muslim terhadap globalisasi adalah tinggi. Pengaruh globalisasi terhadap akhlak remaja muslim adalah rendah. Tidak ada hubungan sama sekali antara pemahaman terhadap akhlak remaja muslim FELDA. Terdapat hubungan antara persepsi dan akhlak remaja muslim tetapi tidak signifikan.

2. Beberapa studi tentang pemberdayaan masyarakat berbasis Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) telah dilakukan A. Fauzie

Nurdin, diantaranya telah diterbitkan menjadi buku yang berjudul *Pemberdayaan Da'i dalam Masyarakat Lokal, (Studi Kasus di Dua Desa Tertinggal Kabupaten Lampung Selatan)*, yang diterbitkan Gama Media di Yogyakarta pada tahun 2009. .

Beberapa temuan hasil studi Pemberdayaan Dai dalam Masyarakat Lokal itu dapat dijelaskan. *Pertama*, perkembangan masyarakat beragama semakin dinamis. Peran Dai sebagai komunitas maupun pemimpin masyarakat cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Meski diakui, dalam pelaksanaan tugas di lapangan terdapat beragam hambatan dan tantangan yang dihadapi. Perilaku keagamaan, pendidikan, ekonomi keluarga, dan pengalaman berdakwah ternyata beragam. Diantara mereka ada yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Da'i untuk pengembangan masyarakat lokal. Indikasinya, banyaknya sarana ibadah dan kelembagaan agama (majelis taklim, pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, pengajian anak, Risma) yang semakin lama bertambah jumlah maupun mutunya. Sejalan dengan itu, pemahaman dan pengmalan agama di kalanga warga desa (khususnya jamaah pengajian) relatif meningkat. Selain itu, pembangunan bidang agama di pedesaan dinamis dan cenderung semakin membaik. Tegasnya, Dai berperan cukup besar dan memberi kontribusi positif bagi pembinaan mental spiritual dan pengembangan masyarakat lokal, khususnya di desa tertinggal.

Kedua, kemampuan Da'i mengaplikasikan strategi, pendekatan, dan metode yang tepat dengan sasaran dakwah relatif rendah dan umumnya masih konvensional. Lemahnya koordinasi dan belum dipahaminya aspek manajemen dakwah dikalangan mereka merupakan tantangan yang perlu dicarikan solusi. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan aspek nilai, norma sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Rendahnya dukungan pamong desa terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan Da'i berpengaruh terhadap kurang harmonisnya hubungan *ulama* dan *umara*. Sarana dan prasarana dakwah yang diperlukan Da'i untuk pengembangan masyarakat lokal merupakan kebutuhan yang mendesak. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki dan belum adanya jaringan kerja (*networking*) diantara mereka dan dengan lembaga atau organisasi dakwah di luar desa merupakan kendala tersendiri yang tidak mudah diatasi.

Ketiga, upaya pemberdayaan Da'i dalam masyarakat lokal dapat dilakukan melalui program dakwah yang dirancang dan dilaksanakan para Da'i setempat, terutama di daerah pedesaan. Sarana operasional dapat diberi nama: Program Pengembangan Masyarakat atau Daerah Dakwah Pembangunan Terpadu. Program dakwah itu dapat disusun dan dilaksanakan dalam satu sistem yang komprehensif dan saling terkait satu dengan lainnya. Lingkup program dakwah mencakup: (a) program komunikasi dan penyiaran Islam; (b) program bimbingan

keluarga muslim, dengan menekankan pandangan tauhid dan ibadah dalam bermuamalat (kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik); (c) program pengembangan masyarakat Islam; (d) program pelatihan manajemen dakwah, yang sasarannya diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan organisasi dan kelembagaan dakwah. Program strategis itu memposisikan betapa pentingnya status dan peran Da'i dalam pengembangan masyarakat lokal di era otonomi daerah.

3. Penelusuran studi ilmiah berikutnya dilakukan A. Fauzie Nurdin, berjudul "*Pemberdayaan Komunitas dalam Pengelolaan Resolusi Konflik*", diterbitkan dalam bentuk buku oleh Panta Rhei Books di Jogjakarta pada tahun 2014. Studi ini menjelaskan: *pertama*, keberadaan komunitas diakui pemerintah dan masyarakat sejak tiga dekade yang lalu, namun secara kuantitas, kualitas dan potensi akademik mereka yang ada di daerah selama ini belum diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan secara terprogram dan berkelanjutan, terutama untuk mengelola resolusi konflik dalam upaya peningkatan kerukunan umat ber-agama.

Kedua, komunitas berperan penting dan dapat memberi kontribusi bagi upaya peningkatan pembinaan kerukunan umat beragama (intern umat beragama; antar umat beragama; dan antara umat beragama dengan pemerintah) serta pembangunan masyarakat di daerah. Indikasinya, adanya aktivitas komunitas dalam peningkatan

pembinaan kerukunan umat beragama sesuai tugas dan fungsinya yang terjadwal (rapat-rapat koordinasi), adanya materi penyuluhan, ketepatan penerapan metode pembinaan kerukunan umat beragama, dan banyaknya jumlah kehadiran para jamaah sebagai kelompok sasaran penyuluhan dan pembinaan.

Ketiga, pola pemberdayaan komunitas yang telah dilaksanakan selama ini berupa implementasi kebijakan yang standar bagi yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama yang dirancang secara konsisten serta berguna bagi berbagai kelompok sasaran binaannya di daerah. Berbeda bagi Komunitas Honorer (PAH), tugas pokoknya melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Keempat, faktor-faktor yang mendukung komunitas dalam pengelolaan konflik guna peningkatan kerukunan umat beragama, terutama dan tampak nyata bagi mereka yang berstatus pegawai negeri dan sedikit tenaga honorer; berpendidikan Ilmu Agama Islam, adanya sikap keterbukaan, kerjasama dan toleransi; mendapat penghasilan; dan memiliki kompetensi yang relatif memadai dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Mengenai faktor-faktor penghambat yang berpengaruh terhadap peningkatan pembinaan kerukunan umat beragama tampak pada rendahnya penghasilan dan fasilitas tenaga penyuluh guna pemenuhan kebutuhan keluarga yang diperoleh dari pekerjaan itu; kurangnya pembinaan dan sosialisasi tentang pengelolaan resolusi konflik dan kerukunan umat beragama dikarenakan belum dilakukannya pelatihan tentang resolusi konflik keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan dari pihak pejabat agama Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Persoalan lain, tidak adanya fasilitas kendaraan, sementara daerah kerja banyak yang sulit dijangkau. Sementara dari aspek kelompok masyarakat sasaran: masih relatif rendahnya pendidikan dan pengetahuan keagamaan, kurangnya kemampuan pengelolaan kelembagaan agama yang ada di masyarakat.

4. Selain karya ilmiah berupa hasil studi itu, ada juga penelitian tentang *Optimalisasi Kepemimpinan dan Penyuluhan Agama*, yang menjelaskan, *pertama*, keberadaan komunitas diakui pemerintah dan masyarakat, meski selama ini kepemimpinan dan budaya kerja mereka belum dioptimalisasikan melalui pendidikan dan pelatihan secara terprogram dan berkelanjutan, terutama untuk peningkatan pembinaan kerukunan umat beragama.

Kedua, komunitas berperan untuk memberi kontribusi bagi upaya peningkatan pembinaan kerukunan umat beragama (intern umat beragama; antar umat beragama; dan antara umat beragama dengan

pemerintah) serta pembangunan masyarakat di daerah. Indikasinya, adanya kemampuan kepemimpinan dan budaya kerja mereka dalam peningkatan pembinaan kerukunan umat beragama diantaranya terlaksana sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu, adanya berbagai aktivitas yang terjadwal (rapat-rapat koordinasi), adanya materi penyuluhan, ketepatan penerapan metode pembinaan kerukunan umat beragama, dan banyaknya jumlah kehadiran para jama'ah sebagai kelompok sasaran penyuluhan dan pembinaan; meski secara umum kemampuan kepemimpinan dan budaya kerja mereka masih perlu ditingkatkan lagi sejalan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat yang bergerak secara dinamis.

Ketiga, optimalisasi gaya kepemimpinan yang partisipatif dan budaya kerja produktif komunitas dalam upaya pemberdayaan kelembagaan agama untuk pembinaan kerukunan umat beragama ternyata selama ini belum terlaksana secara terprogram, terlebih lagi dalam mengimplementasikan kebijakan yang standar bagi yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Sebab ada diantara mereka yang sekedar melaksanakan tugas bimbingan atau penyuluhan agama, namun belum nampak hasil gunanya secara kongkrit bagi kelompok binaannya di daerah. Berbeda bagi Komunitas Honorer (PAH), tugas pokoknya telah dilakukan berupa kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama, namun belum melaksanakan secara khusus pembinaan kerukunan umat beragama.

Keempat, faktor-faktor yang mendukung komunitas dalam pembinaan kerukunan umat beragama, tampak bagi mereka yang berstatus pegawai negeri dan sedikit tenaga honorer dengan segala keterbatasannya; berpendidikan Ilmu Agama Islam, adanya sikap keterbukaan, kerjasama dan toleransi; mendapat penghasilan; dan memiliki kompetensi yang relatif memadai dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Mengenai faktor-faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pembinaan kerukunan umat beragama tampak pada rendahnya kemampuan kepemimpinan mereka dalam bentuk menghimpun dan menggerakkan kelompok binaan mereka; budaya kerja produktif diantara mereka masih ada yang rendah, sehingga penghasilan diperoleh juga relatif kecil. Selain itu, belum adanya fasilitas atau sarana yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah untuk mereka bekerja, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, sementara daerah kerja banyak yang sulit dijangkau. Kondisi itu juga disebabkan kurangnya pembinaan dan sosialisasi tentang pembinaan kerukunan umat beragama dikarenakan belum dilakukannya pelatihan melalui pendidikan dan pelatihan dari pihak pejabat agama Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Dari aspek kelompok masyarakat sasaran: masih relatif rendahnya pendidikan dan pengetahuan keagamaan, kurangnya kemampuan kepemimpinan dan budaya kerja guna pengelolaan kelembagaan agama yang ada di masyarakat.

5. Studi tentang fenomena pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh Suparjan dan Hempri Suyatno, ditulis dalam bentuk buku yang berjudul 'Pengembangan Masyarakat: dari Pembangunan sampai Pemberdayaan' menjelaskan 'model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan diakui gagal meskipun mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi karena model pembangunan ini ternyata tidak mampu meningkatkan kemandirian masyarakat bahkan sebaliknya masyarakat menjadi semakin tidak berdaya berhadapan dengan kekuatan-kekuatan Negara dan kekuatan Kapitalis.

Studi ini berbasis kajian teori yang didasarkan pada pengamatan dan pengalaman mengenai kaitan antara teori-teori pembangunan dan praktek-praktek pemberdayaan yang dikemas dalam program pembangunan masyarakat selama ini. Wacana tentang pembangunan masyarakat sebagai strategi pilihan dalam konteks pembangunan alternatif. Jika ditelusuri lebih mendasar dan mendalam ternyata kajian ini tidak hanya berhenti pada pemahaman konseptual, tetapi juga diperkaya dengan mengimplementasikan beberapa metode pemberdayaan masyarakat.

Berarti para pelaku pembangunan dituntut untuk mengikuti arus perubahan sosial termasuk perubahan pemikiran di bidang pembangunan. Transisi perubahan model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan menuju pada pembangunan yang

berorientasi pada pemberdayaan mempunyai pada perubahan mengenai asumsi terhadap sasaran program pembangunan, tujuan, model perencanaan pembangunan, model pelayanan dan implikasi sosial yang muncul dari dua model pembangunan tersebut. Tegasnya, penambahan perspektif dalam mengkaji fenomena pembangunan masyarakat diharapkan akan dapat membantu para pemerhati, mahasiswa, dan praktisi pembangunan masyarakat dalam memahami berbagai macam persoalan, khususnya persoalan pembangunan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat manusia menuju pembangunan berkelanjutan.

6. Studi pembangunan masyarakat tentunya berintikan kajian tentang “Etika Pembangunan” yang berisikan pembahasan mengenai teori dan konsep etika; etika pembangunan; pembangunan, kebebasan, hak asasi manusia; pembangunan dan keadilan; pembangunan tanpa pilar etika; krisis pembangunan: kasus Inmdonesia; yang kesemuanya itu tidak terlepas dari etika pembangunan itu sendiri yang tidak lagi hanya diukur sebatas pada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, tetapi juga setiap kebijakan dipersoalkan agar dapat membangun etika global. Budi Winarno, dalam bukunya Persoalan pembangunan tidak lagi hanya diukur sebatas pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran. Berarti, penggunaan etika sebagai nilai yang utama dan pertama untuk dikedepankan dalam menjelaskan pemaknaan pembangunan, yang berarti berguna, berfaedah dan menguntungkan.

7. Selanjutnya hasil studi Moh. Roqib, dalam bukunya '*Harmoni Dalam Budaya Jawa (Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender)*'. Berawal dari hasil penelitian beberapa waktu lalu, kemudian disistematiskan kembali dengan pengayaan teori, beberapa penyempurnaan dan tambahan, sehingga terbitlah buku ini. Fokus pembahasannya adalah harmoni dalam Budaya Jawa. Menarik dikaji dan dikritisi konsep penelitian yang merumuskan tentang 'Makna Harmoni, Dialektika Budaya Jawa dan Islam, Kearifan Lokal dalam Budaya Jawa', karena itu didalamnya terkandung makna, filosofi, budaya lokal (*local wisdom*) dalam masyarakat Jawa; yang dapat dibanding dan disinergikan dengan filosofi dan budaya Lampung.

Pemaknaan 'harmoni' dan harmonitas sosial dalam budaya Jawa dapat dijadikan rujukan ilmiah untuk penelitian disertasi, karena ada pendekatan sejarah, teori budaya Jawa yang heterogen, misalnya tentang simpul-simpul harmoni dalam budaya Jawa, berupa: bahasa Jawa, Teologi (*Manunggaling Kawulo Gusti*); kebersamaan (*Mangan ora mangan Kumpul*), Mawas Diri dan Sadar Posisi, Pasrah dan Kerja Keras, Perempuan dan Seksualitas, Seni musik dan Nyanyian. Dalam buku tersebut dikemukakan:

Harmoni dalam konteks hakikat merujuk pada adanya keserasian, kehangatan, keterpaduan, dan kerukunan yang mendalam dengan sepenuh jiwa melibatkan aspek fisik dan psikis sekaligus. Boleh jadi seseorang terlihat atau memperlihatkan adanya harmonitas

lahir terhadap seseorang, tetapi dalam batinnya ada pertentangan dan pertikaian diantara mereka. Hal ini bukan hakikat harmoni. Harmoni sebenarnya merujuk pada keselarasan lahir-batin yang ada pada diri individu dan sosial. Berikutnya, kehidupan ideal bagi siapapun adalah kemampuan menciptakan sebuah budaya dan tradisi hidup yang harmonis secara fisik-psikis dalam bermasyarakat dan berbangsa dengan dinamika hidup yang tinggi untuk menggapai keluhuran peradaban dan kemanusiaan. Cita-cita demikian menjadi dambaan setiap individu dan komunitas sosial, diantaranya adalah masyarakat Jawa yang memiliki filosofi *rukun agawe santosa*, kerukunan dan keharmonisan akan membuat kehidupan dalam kesantosaan atau kebahagiaan, meskipun antara idealitas-normatif dengan realitas-historis belum tentu sejalan di lingkungan masyarakat Jawa.

Secara konseptual dinyatakan, Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang menjunjung tinggi budaya *unggah-ungguh* atau tata krama. Tatakruma yang detail dalam segala perilaku. Ada sebutan *mikul duwur mendem jero* (mengangkat tinggi dan mengubur dalam-dalam) digunakan untuk memberikan pesan agar orang berkenan menghormati orang tua dan pimpinan, *ojo ngono ora ilok* (jangan begitu tidak baik), tidak baik dinyatakan dengan *ora ilok*, menunjukkan bahwa ada kesan sakral, dan masih banyak istilah sesanti yang dipakai oleh orang Jawa.

Dialektika Budaya Jawa dan Islam ditelaah pada bab tiga, yang menjelaskan tentang Islam dan Budaya Lokal, Budaya Pesantren Jawa, Pemikiran Dialektik Santri Jawa, dan Budaya Santri di Era Global. Merujuk teori Ricklefs (1998), yang menyatakan 'Islam dan kejawaan yang sering dianggap bertetangga, justru memperlihatkan kesesuaian yang harmonis. Keduanya saling membentuk paradigma baru bagi kebangkitan budaya Jawa bersamaan dengan perkembangan dan pelebagaan Islam secara intensif dalam kehidupan masyarakat. Berdasar testimoni itu berarti jelas, Islam sebagai entitas yang hidup dan dinamis, ia terus berkembang, baik karena perjalanan usianya maupun karena persentuhannya dengan berbagai budaya dan tradisi. Islam harus didefinisikan berdasarkan suara umat Islam itu sendiri sesuai dengan konteks budayanya masing-masing. Dialektika yang dinamis selalu terjadi antara Islam dalam kategori universal-normatif dengan lokalitas-historis dimana dia hidup. Perbedaan keberagamaan Muslim Jawa sesungguhnya bukan pada otentisitas, tapi lebih pada cara pandang pemeluk muslim terhadap teks kitab suci agamanya.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam kajian ini dapat membantu peneliti dalam menjelaskan keterkaitan antara berbagai teori, konsep dan definisi operasional penelitian ilmiah, sehingga memudahkan untuk memahami permasalahan, penerapan teori, dan metode penelitian secara konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan. Tentu saja pembuatan kerangka pikir ini

didasarkan pada beberapa teori dan konsep yang digunakan secara benar, logis dan sistematis. Beberapa teori yang akan digunakan sebagai pendekatan yang diinterkoneksi, alat analisis, perumusan konsep dan definisi operasional dalam kajian ini dibangun atas *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory* yang tentu saja saling mengisi dan menguatkan satu sama lainnya.

Pemahaman *grand theory* dalam kajian ini diawali dari penelusuran berbagai teori ilmu dakwah yang didasarkan pada ilmu-ilmu ke-Islaman yang objektif dan berlandaskan pada ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadist. Ajaran Islam diakui kebenarannya dan menjadi "*rahmatan lil alamin*" bagi umat manusia dan alam semesta. Tetapi, tidak semua ajaran Islam itu dipahami dan diamalkan secara benar dan konsisten oleh penganutnya. Ternyata ada perbedaan dan dialektika berfikir manusia dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam tersebut. Dialektika dipahami sebagai metode berpikir yang dianggap oleh manusia selalu benar dalam menyelesaikan masalah dengan tidak harus mengikuti pola berfikir yang logis, objektif dan sistematis.

Kajian ini dilakukan dengan menginterkoneksitaskan dan mensinergikan berbagai pendekatan, teori dan konsep guna menjelaskan permasalahan penelitian tentang pemberdayaan komunitas pada beragam etnik yang tumbuh dan berkembang di daerah transmigran dan berbagai daerah lainnya. Hal itu dilakukan atas dasar hasil pengamatan yang pernah dihimpun pada beberapa waktu lalu, dimana ada relevansinya dengan

kondisi dewasa ini, yang terindikasi dari semakin maraknya kasus konflik yang dilandasi adanya fanatisme kesukuan dan perbedaan kepentingan sehingga melahirkan konflik yang semakin luas, dan dapat mengancam terjadinya disintegrasi bangsa. Realitas semacam itu tentu saja membutuhkan pencegahan dan pengelolaan konflik keagamaan melalui upaya pemberdayaan komunitas sosial di daerah transmigrasi untuk peningkatan harmoni sosial, khususnya kerukunan umat beragama di daerah. Sebab penyelesaian dalam arti resolusi konflik sosial keagamaan memang tidak mudah untuk diselesaikan. Beberapa waktu lalu dilakukan pra survey dan diperoleh informasi yang memperjelas bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan konflik yang bernuansa sosial dan keagamaan, terutama karena konflik semacam itu telah melibatkan keyakinan yang sangat fundamental, yakni menyangkut aspek keimanan dan keyakinan umat; tetapi bukan berarti konflik bernuansa keagamaan ini tidak bisa diatasi.

Oleh karena itu, dengan pendekatan yang lebih terinterkoneksi dari beragam keilmuan, tentu diharapkan konflik antar umat beragama akan dapat diketahui akar permasalahannya, yang selanjutnya dapat diwaspadai dan diupayakan untuk dicegah agar permasalahan semacam itu dapat dikelola dengan benar agar terbangun harmoni sosial, dan dimasa depan tidak terjadi lagi dan berkembang luas sehingga mengganggu disintegrasi nasional. Namun hambatan membangun harmoni sosial tampaknya pemerintah tidak memiliki instrumen yang memadai untuk memperhatikan

secara khusus persoalan konflik sosial selama ini, sehingga penanganannya terkesan sporadis, lalu terlambat, tidak terorganisir, bahkan cenderung berlarut-larut.

Realitas konflik sosial dan keagamaan banyak terjadi di berbagai daerah transmigrasi. Konflik yang terjadi merupakan konflik internal antara sesama warga dalam komunitas sosial dan konflik eksternal yang diduga di luar agama, seperti: ekonomi, politik, sosial dan budaya. Atas dasar itu, konflik sosial dan keagamaan lebih tepatnya dijelaskan sebagai konflik yang berasal dari dalam komunitasnya dimana terjadi ketidak merataannya sumber daya alam dan adanya sekelompok orang yang merasa terabaikan oleh kebijakan pembangunan di daerah yang menyebabkan etnis tertentu merasa termarginalisasikan. Kondisi yang terjadi semacam itu dapat diduga akan semakin meluas di masa depan, terlebih khusus lagi ketika warga masyarakat akan menghadapi pemilihan umum pada tahun 2014 dan 2019, dimana eskalasi politik semakin menguat dan dapat berpengaruh terhadap berbagai bidang pembangunan masyarakat lainnya. Sementara itu masyarakat Lampung memiliki filosofi budaya lokal (*Piil Pesenggiri*) dan budaya *muakhi* yang menjadi landasan nilai-nilai etika dan moral untuk membangun guna menjaga perdamaian dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Dalam perspektif teoritik, konflik dipahami sebagai ‘perselisihan, perseteruan, percekocokan, dan permusuhan’. Konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dimana dua orang atau kelompok berusaha

menyingkirkan pihak lain dengan cara mengintimidasi, menyerang, dan menghancurkannya sehingga membuatnya tidak berdaya. Memang dapat diketahui, konflik sebagai proses dapat terjadi ketika dua atau lebih pelaku (individu atau kelompok masyarakat) mencoba untuk mencapai tujuan dari pihak-pihak lain, baik terjadi di wilayah komunitas yang sama atau berlainan. Berdasar teori konflik, dapat dirumuskan secara konseptual, konflik dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu: (1) konflik batin “*mental conflict*” (gagasan dan keinginan dalam individu); (2) konflik kebudayaan “*cultural conflict*” (persaingan antara warga dua kolektif sosial yang mempunyai kebudayaan hampir seragam). Persaingan berlangsung berdasarkan perbedaan-perbedaan khusus pada unsur-unsur kebudayaan yang hampir seragam itu untuk memperbesar identitas kolektif sosial sendiri; (3) konflik kelas “*class conflict*” (pertentangan antara golongan dalam masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan); dan (4) konflik peran “*role conflict*” (peranan atau peranan-peranan yang dipegang oleh seorang individu yang dilaksanakan secara tidak konsisten).

Peristiwa konflik yang terjadi selama ini telah menimbulkan kerusakan, kerugian dan hambatan pembangunan daerah di satu pihak, namun di pihak lain resolusi konflik dapat dilakukan atas kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, tentara, polisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin dan warga masyarakat di daerah setempat. Dalam implemtasi kebijakan, misalnya telah di bentuk wadah berhimpunnya warga dalam

kelembagaan yang di sebut “*Rembug Pekon*” atau “*Rembug Tiyuh*”; yang difungsikan untuk bermusyawarah dan mufakat dalam mengatasi berbagai persoalan konflik sosial, politik dan keagamaan. Persoalannya, pergeseran nilai dan norma-norma sosial budaya yang semakin mengarah ke gaya hidup individualistik dan materialistik masih saja dapat berpengaruh terhadap semakin rentannya konflik dan terhambatnya pembangunan di berbagai daerah dalam masyarakat. Sementara itu, kesinambungan pembangunan menjadi tuntutan yang membutuhkan harmonisasi sosial dan budaya damai yang terbangun atas dasar kesadaran warga masyarakat.

Dalam masyarakat terjadi proses dan interaksi sosial yang mewujudkan dalam bentuk kerjasama, persaingan, dan konflik. Sekelompok warga masyarakat masih memandang konflik sebagai keniscayaan dalam interaksi antar individu, komunitas dan kelompok; sementara ada juga yang konflik merupakan kebutuhan bagi terjadinya perubahan dan dinamika dalam berbagai bidang hidup dan kehidupan manusia. Namun di pihak lain, konflik memerlukan perhatian dan pendekatan dalam pengelolaannya, sehingga resolusi konflik menjadi kebutuhan dan diduga para pemimpin (formal, informal, dan non formal) dapat dioptimisasikan guna pemberdayaan komunitas, kelembagaan maupun organisasi keagamaan, sehingga berguna bagi peningkatan harmoni sosial dan pembangunan di daerah.

Secara koseptual pengelolaan konflik (*conflict management*) dalam beragam wujudnya dapat berfungsi bagi peningkatan harmoni sosial, terutama kerukunan umat beragama (intern umat, antar umat, dan antara

umat beragama dengan pemerintah) yang bernilai guna untuk masyarakat yang sedang membangun daerah. Pembudayaan nilai-nilai luhur persaudaraan atau *muakhi* dan kebersamaan yang menjadi bagian dari filosofi dan budaya Lampung dapat disosialisasikan dan dibudayakan oleh para pemimpin komunitas sosial setempat secara terprogram dan berkelanjutan, jika terorganisir dengan baik dan benar. Pengelolaan konflik pada komunitas yang berbeda suku dan agama yang dianut perlu dilakukan agar segala perbedaan dan perselisihan kepentingan yang ada tidak berkembang menjadi sikap dan tindakan permusuhan dan kekerasan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasar realitas sosial, budaya dan keagamaan itu mempertegas betapa *urgen* kajian ini secara akademik membutuhkan pendekatan lintas disiplin ilmu yang diinterkoneksi secara ilmiah guna pengembangan teori dan konsep dalam ilmu Pengembangan Masyarakat Islam, diantaranya pendekatan: Sosiologi Dakwah Kontemporer; Sosiologi Pembangunan; Pemberdayaan Masyarakat; Komunikasi Pembangunan; Komunikasi Antarbudaya; Pembangunan Transmigrasi; dan Antropologi Sosial Budaya.

Berikutnya, pendalaman kajian dapat diperoleh, jika diketahui adanya beberapa aspek pendukung yang sementara dapat diduga, diantaranya: (1) Respon terhadap pembangunan masyarakat & teknologi informasi; (2) Adanya aktivitas ‘pemberdayaan Komunitas’ di daerah transmigrasi; (3) Tumbuhnya pemberdayaan komunitas sosial, budaya dan keagamaan; dan (4) Kepekaan terhadap dinamika pembangunan masyarakat di daerah

transmigrasi. Sebab, pemberdayaan sebenarnya bukan hanya gagasan-gagasan kerja masyarakat sebagai proses sosial, tetapi pemberdayaan dapat dimaknai dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan.

Berarti dalam kerangka pikir penelitian untuk disertasi ini dapat dirumuskan secara konseptual pemberdayaan sebagai suatu proses menolong kelompok atau individu yang dirugikan untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Sebab, dengan menolong mereka untuk belajar dan menggunakan keterampilan-keterampilan dalam melobi, menggunakan media, melakukan aksi politik, memahami bagaimana 'memanfaatkan sistem' dan sebagainya. Terlebih lagi, betapa pentingnya rumusan definisi operasional pemberdayaan dalam pluralitas budaya lokal, yang tentu saja memerlukan pengetahuan tentang pola perubahan struktur-struktur dan lembaga-lembaga sosial berbasis pengalaman dan realitas sosial, yang secara lebih rinci dapat dijelaskan yang sejalan dengan berbagai upaya membangun harmoni sosial di daerah, yang tentu saja jika dilakukan melalui penelitian ilmiah.

Beberapa hal yang tidak dapat dipungkiri, perumusan konsep pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan itu dapat dicapai dengan mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Penelusuran kebenaran ilmiah dapat dilakukan melalui kajian tentang

kebijakan aksi afirmatif atau diskriminasi positif mengakui keberadaan kelompok-kelompok yang dirugikan (kadang-kadang dinyatakan secara spesifik dalam istilah-istilah struktural), dan berupaya untuk memperbaiki keadaan ini dengan 'mengubah aturan-aturan' untuk menguntungkan kelompok yang-dirugikan.

Perubahan struktur-struktur, pemberdayaan kelembagaan dan komunitas sosial dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya dan ekonomi guna mengurangi pengangguran. Lebih fokus dapat dilihat sebagai pemberdayaan untuk meningkatkan sumber daya, akses dan kesempatan bagi masyarakat. Memberikan sumber daya yang cukup dan aman kepada rakyat juga merupakan strategi pemberdayaan komunitas sosial yang penting.

Kebijakan pemberdayaan semacam itu dapat dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) untuk menjamin pendapatan yang cukup, sehingga disebut sebagai *memberdayakan komunitas lokal*. Dan pengembangan mekanisme-mekanisme untuk masukan bagi pengguna layanan, menempatkan layanan dan fasilitas yang mudah diakses, membuat mekanisme-mekanisme pengaduan pengguna layanan yang memadai dan mudah diakses, dan keputusan-keputusan perencanaan yang lain dapat membantu pemberdayaan komunitas yang dirugikan. Berarti, jelas kiranya kepedulian pada gagasan tentang akses dan kesetaraan dalam kebijakan sosial dapat dibenarkan dengan alasan-alasan pemberdayaan komunitas

yang dirancang dan dilaksanakan secara benar dan konsisten, agar bernilai guna bagi komunitas sasaran dan pembangunan daerah.

Kebijakan semacam itu memperjelas betapa pentingnya pemberdayaan melalui *aksi sosial*, *pembudayaan nilai-nilai berbasis budaya lokal* dan *politik pemerintahan* yang menekankan betapa pentingnya perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif dari bawah. Sebenarnya, pemberdayaan komunitas semacam itu dapat diterapkan bergantung pada pemahaman kita tentang kekuasaan dalam proses politik (pluralis, elite, struktural atau post-struktural). Tetapi ia menekankan pendekatan aktivis, dan berupaya untuk memungkinkan masyarakat meningkatkan kekuasaannya melalui sebarang aksi langsung, lebih utama jika dapat dilaksanakan secara kolektif atau dengan melengkapi mereka agar lebih efektif dalam arena politik.

Pernyataan itu mengandung makna betapa pentingnya dipertimbangkan dalam setiap pembahasan mengenai pemberdayaan komunitas sebagai bagian dari suatu perspektif dua konsep, yaitu: *keberdayaan* dan *yang dirugikan*, yang masing-masing keadilan sosial dan hak azasi manusia. Sebab, menempatkan konsep pemberdayaan atau *empowerment* sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mewujudkan di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, pemerintahan dan keagamaan. Tegasnya,

pemberdayaan komunitas sosial di daerah transmigran harus dimaknai sebagai upaya membangun suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, budaya, sosial dan ekonomi.

Pemahaman teoritik dan konseptual tentang pemberdayaan komunitas, lebih lanjut dapat dicermati juga melalui aksi sosial, budaya dan politik, yang tentunya dapat menekankan pada pentingnya perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif. Penerapannya bergantung pada pemahaman kita tentang kekuasaan dalam proses politik (pluralis, elite, struktural atau post-struktural). Tetapi dapat juga menggunakan pendekatan melalui aktivis dan pekerja sosial, keagamaan; dan berupaya untuk memungkinkan masyarakat meningkatkan kekuasaannya melalui sebarang aksi langsung (dan sering kali kolektif), atau dengan memperlengkapi mereka agar lebih efektif dalam menggunakan media dan arena politik. Tidak jauh beda dengan itu, ada juga pemberdayaan melalui *pendidikan dan penyadartahuan* yang menekankan pentingnya suatu proses edukatif (dalam pengertian luas) dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan komunitas sasaran. Dalam hal ini dapat dimasukkan gagasan-gagasan peningkatan kesadaran bersama untuk membantu mereka memahami struktur sosial, nilai, dan norma yang hidup, berlaku dan berkembang di kalangan mereka untuk bekerja menuju perubahan yang efektif dan seterusnya.

Persoalan pemberdayaan komunitas pada beragam etnik dan penganut agama tentu saja saling berhubungan secara resiprokal dengan proses implementasinya di lapangan. Berarti, kondisi itu perlu didukung oleh adanya: (1) aktivitas pemberdayaan komunitas transmigran dari beragam etnik dan penganut agama; (2) berkolaborasinya antar inovator pemberdayaan komunitas di daerah transmigran yang memiliki etos kerja yang berbasis etika pembangunan; (3) pembudayaan etika sosial dan keagamaan sebagai basis membangun harmoni sosial yang bernilai guna bagi pembangunan daerah.

Berikutnya, jika studi ilmiah ini berhasil sesuai dengan rencana, hasilnya diharapkan dapat: (1) meningkatkan keberdayaan komunitas etnik Jawa yang beragama Islam dan komunitas etnik Lampung muslim yang berguna untuk membangun harmoni sosial di Lampung; (2) tumbuhnya interkoneksi yang bersinergi dan terbangun komunikasi antarbudaya guna memberdayakan komunitas transmigran dalam membangun harmoni sosial, agar tidak terjadi fanatisme kesukuan sebagai ancaman terjadinya disintegrasi bangsa. Lebih lanjut diharapkan (3) dapat terjadinya penguatan kelembagaan sosial dan keagamaan agar terjadinya proses percepatan pembangunan daerah. (3) berkembangnya budaya harmoni sosial dalam masyarakat berbasis etika pembangunan yang sejalan dengan ideologi Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu perlu diteliti dan diketahui berbagai aspek dan cara membangun harmoni sosial pada beragam etnik dan penganut agama yang

membutuhkan pengetahuan tentang aspek-aspek penghambat, yang dapat diduga diantaranya, yaitu: (1) rendahnya pengetahuan tentang pemberdayaan komunitas; (2) rendahnya pengetahuan warga transmigran tentang pembudayaan etika sosial untuk membangun harmoni dalam komunitas yang beragam etnik dan penganut agama di daerah yang baru berkembang; (3) kurangnya keteladanan para pemimpin formal dalam masyarakat transmigran; dan (4) lemahnya upaya penguatan kelembagaan desa dan pembudayaan harmoni sosial yang berbasis budaya lokal serta bernilai guna bagi proses percepatan pembangunan daerah.

Pemberdayaan komunitas sosial selama ini terjadi sejalan dengan dinamika pembangunan sosial, ekonomi, keagamaan, pemerintahan, politik dan budaya yang menimbulkan banyak perubahan yang tidak saja terjadi di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri, tetapi lebih dari itu juga perubahan fungsi kelembagaan sosial, transmigrasi, perilaku ekonomi, politik, dan keagamaan dikalangan warga yang lebih rasional. Memang sebenarnya warga masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap berbagai persoalan kehidupan sosial dan pluralitas budaya lokal yang dinamis dan menunjukkan adanya kemampuan menyerap informasi dan kultur yang berkembang secara cepat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Selama ini sekelompok warga masyarakat memahami bahwa pemberdayaan komunitas sebagai pendekatan pembangunan menjadi kebutuhan dan semakin diperlukan dalam kerangka pembangunan

masyarakat yang lebih bermartabat dan demokratis di masa depan. Dalam perkembangannya kini negara lebih berperan dalam mengimplementasikan strategi dan pendekatan pembangunan yang sentralistik dan *top down*. Implikasi lebih lanjut, terjadi dominasi pola-pola yang mementingkan keseragaman. Berarti konsep itu dapat dipahami sebagai program pembangunan yang dirancang dari atas, masyarakat hanya berperan dalam pelaksanaannya. Sebenarnya masyarakat menjadi a-historis pada proses perencanaan apalagi tidak pernah dianggap mampu dalam pengambilan keputusan.

Kondisi semacam itu mengindikasikan adanya pengabaian terhadap peran masyarakat dan institusi lokal yang ada di dalamnya atau kurang mengakomodasi dan mengembangkan kapasitas lokal sebagai bagian dari energi sosial dalam membangun harmoni sosial. Sehingga wajar bila potensi dan kapasitas lokal tidak teraktualisasi dan keberlanjutan pembangunan tidak terjadi karena tidak terbangunnya kapasitas lokal dan kemandirian masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan komunitas menjadi suatu proses menantang agar dapat mengubah wacana, sikap dan perilaku yang tidak saja bagi para akademisi, tetapi juga praktisi, aparatur sipil negara dan pekerja masyarakat.

Pemberdayaan komunitas secara konseptual dapat diawali dari memahami pengertian-pengertian subjektif manusia dan konstruksi pandangan hidup dan kerja mereka, dan menunjuk kepada kebutuhan untuk mendekonstruksi pengertian-pengertian ini dan pembentukan suatu kosa

kata alternatif untuk pemberdayaan komunitas sosial. Tentu saja hal itu dapat dicapai dengan memvalidasi suara-suara yang lain dari yang saat ini mendominasi wacana tersebut, dan dengan membuat suara-suara alternatif tersebut terdengar. Kondisi itu membutuhkan pemahaman tentang kebijakan, analisis, dekonstruksi, pendidikan dan partisipasi, dan melihat suatu konsentrasi pada aksi saja sebagai sesuatu yang tentunya tidak mencukupi kebutuhan kongkrit komunitas sosial itu.

Berdasar penelusuran teori dan konsep yang dibangun berbasis pendekatan itu, maka dapat digambarkan kerangka pikir penelitian berikut ini.

**PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ETNIK JAWA MUSLIM DAN ETNIK
LAMPUNG MUSLIM DALAM MEMBANGUN HARMONI SOSIAL:
Studi Kasus Transmigran Bagelen di Lampung**



Gambar 1.1
Kerangka Pikir Penelitian

Berdasar penelusuran teori dan konsep pemberdayaan masyarakat, ternyata adanya kompleksitas konsep kekuasaan dan model pemberdayaan dari kerja masyarakat. Dari sudut pandang seorang pekerja masyarakat yang sedang mencari suatu model pemberdayaan, tak diragukan lagi disana terdapat sebetulnya nilai kebenaran dan hasil kerja yang ada di dalam masing-masing dari keempat perspektif tersebut. Pada dataran tertentu, pandangan-pandangan pluralis dan elite mungkin memiliki perspektif dominan dalam masyarakat yang berkemampuan membentuk kebanyakan perdebatan tentang kekuasaan dan aksi politik; tetapi ada juga yang kontraproduktif jika hal-hal tertentu diabaikan atau berasumsi bahwa hal-hal tersebut tidak ada nilainya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Deskripsi konseptual penelitian ini tentu diawali dari penelusuran konsep tentang mencerdaskan masyarakat dan perlunya teori yang diimplementasikan secara benar untuk dijadikan pembelajaran dan pelatihan yang kreatif, sehingga merangsang suatu pendekatan yang positif, terinformasi, kreatif dan reflektif terhadap suatu masyarakat berdasar kesadaran bersama untuk membangun masa depan. Konsep pengembangan masyarakat sejatinya mampu menciptakan alternatif visi, analisis dan praktik masyarakat.¹ Berbasis teori pemberdayaan masyarakat, yang telah dirumuskan pakar:

“Pemberdayaan adalah kata yang telah digunakan secara berlebihan dan sedang berada dalam bahaya kehilangan arti substantifnya. Ia merupakan pusat dari gagasan-gagasan kerja masyarakat, dan banyak pekerja masyarakat akan memilih mendefinisikan peranan mereka dalam pengertian suatu proses pemberdayaan. Meskipun demikian, suatu definisi kerja yang sederhana akan mencukupi, yaitu: pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (the disadvantaged).”²

Berdasar teori itu, secara konseptual dapat memperjelas adanya perspektif pluralis pemberdayaan yang dapat dirumuskan:

¹J. W. Ife, &M. Smith, *Community development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice*, (1995), pp. 1-3. Melbourne: longman.

²Jim Ife & Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Terjemahan: Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M, Nursyahid,Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2008), h, 130

“pemberdayaan adalah suatu proses menolong kelompok atau individu yang dirugikan untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain, dengan menolong mereka untuk belajar dan menggunakan keterampilan-keterampilan dalam melobi, menggunakan media, melakukan aksi politik, memahami bagaimana 'memanfaatkan sistem' dan sebagainya”.³ Konsep pemberdayaan tentu memerlukan pengetahuan tentang pola perubahan struktur-struktur dan lembaga-lembaga sosial, yang secara lebih rinci dapat dijelaskan:

“Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dicapai dengan mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan aksi afirmatif atau diskriminasi positif mengakui keberadaan kelompok-kelompok yang dirugikan (kadang-kadang dinyatakan secara spesifik dalam istilah-istilah struktural), dan berupaya untuk memperbaiki keadaan ini dengan 'mengubah aturan-aturan' untuk menguntungkan kelompok yang-dirugikan.”⁴

Banyak peristiwa perubahan struktur sosial dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial sebenarnya, yang ternyata tindak lanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekonomi untuk mengurangi pengangguran. Lebih fokus dapat dilihat sebagai pemberdayaan untuk meningkatkan sumber daya, akses dan kesempatan bagi masyarakat. Misalnya dengan mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan peningkatan

³*Ibid.*, h. 132

⁴*Ibid.*, h. 147

kapasitas melalui pariwisata;⁵ model pengelolaan hutan;⁶ pengelolaan lingkungan;⁷ dan program kearifna lokal.⁸ Memberikan sumber daya yang cukup dan aman kepada rakyat juga merupakan strategi pemberdayaan yang penting. Kebijakan pemberdayaan semacam itu dapat dilakukan untuk menjamin pendapatan yang cukup sehingga disebut sebagai *memberdayakan*. Dan pengembangan mekanisme-mekanisme untuk masukan bagi pengguna layanan, menempatkan layanan dan fasilitas yang mudah diakses, membuat mekanisme-mekanisme pengaduan pengguna layanan yang memadai dan mudah diakses, dan keputusan-keputusan perencanaan yang lain dapat membantu pemberdayaan kelompok sosial atau komunitas yang dirugikan. Artinya, kepedulian pada gagasan tentang akses dan kesetaraan dalam kebijakan sosial dapat dibenarkan dengan alasan-alasan pemberdayaan komunitas. Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero menyatakan:

⁵O. Gohori, &P. van der Merwe, *Tourism and Community Empowerment; The Perspectives of Local People in Manicaland Province*, Zimbabwe. (Tourism Planning & Development, 2021), h. 1-19. Lihat. G. Butler, *Fostering community empowerment and capacity building through tourism: perspectives from Dullstroom*, (South Africa: Journal of Tourism and Cultural Change, 15[3], 2017), h. 199-212. Lihat juga: M.A. Mayaka., G. Lacey., & C.M. Rogerson, *Empowerment process in community-based tourism*, (Friend relationship perspective: Development Southern Africa, 37[5], 2020), h. 791-808.

⁶T.K. Hastuti, &U. Yuliati, *A model for mangrove forest management based on community empowerment in Bantul regency*, (Journal of Environmental Management & Tourism, 8[6(22)], 2017), h. 1232-1237.

⁷D. Septanti., H.R. Santosa., P. Setijanti., A.S. Bahri., W. Setyawan., & A. S. P. R. Utami, *Environmental and waste management based on community empowerment in Surabaya*. (In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, February, 2020.), Vol. 447, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.

⁸Ibad, S. *Local Wisdom of Community Empowerment in The Management And Sustainable Development of Fishery Resources; Study in Situbondo District*. (Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan, 8[1], 2017), h. 24-31.

“Pemberdayaan melalui *aksi sosial dan politik* menekankan pentingnya perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif. Bagaimana ini diterapkan bergantung pada pemahaman kita tentang kekuasaan dalam proses politik (pluralis, elite, struktural atau post-struktural). Tetapi ia menekankan pendekatan aktivis, dan berupaya untuk memungkinkan masyarakat meningkatkan kekuasaannya melalui sebarang aksi langsung (dan sering kali kolektif), atau dengan melengkapi mereka agar lebih efektif dalam arena politik.”⁹

Jika beberapa teori itu dieksplorasi lebih lanjut, ternyata dalam pernyataan itu terkandung dua konsep, yaitu: *keberdayaan* dan *yang dirugikan*, yang masing-masing perlu dipertimbangkan dalam setiap pembahasan mengenai pemberdayaan sebagai bagian dari suatu perspektif keadilan sosial dan HAM. Konsep pemberdayaan menurut pakar lainnya dinyatakan :

“....menempatkan konsep pemberdayaan atau empowerment sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, Negara dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai medan kehidupan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya dan lain sebagainya. Maka itu konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain”.¹⁰

Pemberdayaan masyarakat terjadi secara dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan yang diindikasikan pada adanya pembangunan di segala bidang yang dewasa ini belum berhasil

⁹*Ibid.*, h. 148

¹⁰Pranarka, A.M.W dan Vidhyandika Moeljarto, *Pemberdayaan (Empowerment)*”, dalam Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarka (Penyunting), *Pemberdayaan: Konsep Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), h. 56

mengentaskan kemiskinan dan semakin banyaknya tenaga pengangguran, sulitnya memperoleh peluang kerja, dan mahal nya kebutuhan bahan pokok serta biaya hidup. Pembangunan diklaim menjadi otoritas pemerintah agar masyarakat harus tunduk dan patuh dalam proses pelaksanaannya yang direncanakan pemerintah sendiri, yang cenderung tanpa melibatkan aspirasi masyarakat. “Mobilisasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan menjadi kewajiban masyarakat sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian pada negara dan bukan berdasar pada kesadaran yang ada pada masyarakat. Akibatnya, pembangunan menjadi sentralistis dan bias pusat”.¹¹

2. Pemberdayaan Masyarakat: Mengidentifikasi Hambatan Partisipasi Masyarakat

Sangat penting menginformasikan diskusi tentang pemberdayaan masyarakat dan untuk mempertimbangkan implikasi dari penyampaian kebijakan untuk berteori hubungan antara warga negara dan negara yang dimediasi melalui kemitraan regenerasi. Sebuah studi yang dilakukan oleh Adamson (2010), meneliti data dari tiga proyek penelitian terkait hambatan partisipasi masyarakat. Ini adalah evaluasi pelaksanaan lokal dari program Komunitas Pertama, pengiriman dukungan teknis kepada komunitas yang berpartisipasi dan studi kasus yang didanai Joseph Rowntree dari sembilan

¹¹Susetiawan, *Pemberdayaan Masyarakat antara Ide dan Komoditi Baru Untuk Perubahan Sosial*, dalam Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), h. xii-xv

kemitraan regenerasi. Semua proyek berkaitan dengan eksplorasi pengalaman anggota komunitas dalam kemitraan regenerasi. Penelitian membahas satu kebijakan khusus di wilayah devolusi Inggris Raya dan tidak dapat berkomentar secara ekstensif tentang program kebijakan serupa di wilayah lain di Inggris Raya. Namun, pengalaman khusus ini digunakan untuk mengomentari isu-isu umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan untuk menguraikan teori tentang hubungan antara warga negara dan negara.¹²

Temuan Adamson (2010) mengidentifikasi hambatan utama pencapaian pemberdayaan masyarakat termasuk masalah kapasitas masyarakat, kapasitas kelembagaan, budaya organisasi dan kerangka peraturan. Temuan mengidentifikasi mekanisme untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi agen aktor komunitas dalam kemitraan regenerasi dan untuk membantah analisis inisiatif regenerasi sebagai mekanisme kontrol sosial dan penggabungan aktivisme komunitas ke dalam agenda yang dipimpin negara. Bukti yang diperoleh dari tiga proyek yang dijelaskan dalam studi tersebut menunjukkan beberapa hambatan kritis untuk pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam pemerintahan dan kebijakan lokal pengiriman. Kerangka pemberdayaan bersifat komprehensif dan secara struktural mampu memberikan peluang yang cukup besar kelompok masyarakat dan

¹²D. Adamson, *Community empowerment*, (International: Journal of Sociology and Social Policy, 30[3], 2010), h. 114–126. doi:10.1108/01443331011033319.

anggota masyarakat individu untuk menggunakan pengaruh atas badan hukum dalam kemitraan.¹³

Pembahasan sebelumnya diidentifikasi peran tim pengembangan masyarakat dalam memanfaatkan, membentuk, mengembangkan, dan mengarahkan keterampilan komunitas untuk terlibat secara efektif dengan proses regenerasi. Ini adalah fungsi intensif sumber daya dan sangat terampil yang tertanam dalam komunitas praktek dan prinsip pembangunan. Seringkali membutuhkan tindakan segera untuk mendukung dan memperhatikan kebutuhan individu. Persyaratan ini sering bentrok dengan struktur dan prosedur otoritas lokal yang berada di sebagian besar kasus agen yang mempekerjakan untuk tim pengembangan masyarakat. Ini bisa sangat parah menghambat proses pengembangan kapasitas.¹⁴

Ada beberapa hambatan yang mungkin mencegah yang terjadi. Namun, ada mekanisme yang bisa meningkatkan kemampuan penghuni secara aktif mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kemitraan. Cukup mengekspresikan maksud untuk memberdayakan dan menciptakan kerangka kerja fasilitatif tidak dengan sendirinya tercipta Pemberdayaan. Beberapa dinamika tambahan dalam hubungan antar layanan penyedia dan komunitas yang mempersulit proses pemberdayaan. Pertama, masyarakat

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ G. Craig, *Community capacity-building: something old, something new...?*, (Critical: Social Policy, 2007), Vol. 27 No. 3.

membutuhkan pengembangan kapasitas dan dukungan teknis untuk mempertajam dan mengarahkan Keterampilan dan pengetahuan bawaan menjadi model praktek masyarakat yang bisa berhasil terlibat dengan penyedia layanan hukum. Anggota komunitas membutuhkan berbagai gaya, pola, dan tingkat keterlibatan untuk mempromosikan basis luas partisipasi masyarakat yang dapat mendukung proses representasi masyarakat yang lebih formal tentang kemitraan kaderisasi.¹⁵

Selain itu, struktur kebijakan harus secara hati-hati menggambarkan peran undang-undang lembaga dalam forum dan kemitraan yang dibentuk untuk mencapai kebijakan tersebut. Selain itu, badan hukum harus memperhatikan persyaratan pelatihan dan dukungan staf yang dibutuhkan untuk terlibat dalam komunitas praktik pemberdayaan dan partisipasi warga. Kemudian memfasilitasi partisipasi warga negara yang bertujuan untuk menjaga basis sumber daya dan meminimalisir pergeseran budaya dimodel pelayanan publik yang belum dipertimbangkan secara serius oleh penyedia layanan. Pelaksanaan Komunitas Pertama dan pengalaman komunitas perwakilan yang telah terlibat dengan kemitraan juga memberikan beberapa wawasan tentang hubungan antara warga negara dan negara. Peran aktif yang dimainkan anggota komunitas dan pemahaman reflektif dan kritis mereka tentang hubungan mereka dengan mitra

¹⁵Adamson., *Op. Cit*

hukum menantang gagasan sederhana tentang penggabungan dan kontrol sosial. Perwakilan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam studi dilaporkan di sini terlibat langsung dengan negara di tingkat wilayah dan menganggap diri mereka sebagai agen perubahan yang menguntungkan di komunitas mereka. Mereka melihat ini sebagai proses negosiasi dan perubahan dalam hubungan antara mereka sendiri dan mitra hukum.

Pencarian mereka untuk "partisipasi yang bertujuan" pada dasarnya adalah pencarian kekuasaan dan pengaruh atas bentuk dan pola layanan yang diberikan di komunitas mereka, sebuah hasil yang, jika tercapai, akan menunjukkan kemampuan warga negara untuk mempengaruhi negara dalam pemerintahan di mana tidak ada batas yang jelas antara negara dan masyarakat sipil. Sebaliknya, ini adalah ruang yang ditandai dengan mekanisme negara yang mendorong dan menarik dominasi dan perlawanan komunitas yang sesuai.

Meskipun beberapa literatur mengidentifikasi hambatan pemberdayaan yang diakui dalam literatur yang lebih luas, studi menyebutkan bahwa hambatan tersebut dapat bertahan bahkan dalam kerangka kebijakan yang sangat partisipatif seperti Communities First. Lebih dalam studi memberikan bukti tentang rasa agensi yang jelas dari anggota komunitas kemitraan regenerasi dan model counter yang menyarankan kemitraan regenerasi adalah mekanisme sederhana dari kontrol sosial yang menyebarkan aktivisme komunitas.

3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat Keberlanjutan

Pemahaman konsep pemberdayaan dapat dicermati melalui modal sosial, aksi ekonomi sosial, budaya, politik, dan keagamaan, yang tentunya dapat menekankan pada pentingnya perjuangan dan perubahan dalam upaya meningkatkan pengembangan masyarakat. Ini dapat diimplementasikan pada sejumlah implikasi kebijakan dalam konteks pembangunan masyarakat. Penerapan modal sosial dalam pengembangan kapabilitas dan pemberdayaan masyarakat bergantung pada pemahaman pelaku pembangunan sebagai aktor dalam mengelola kekuasaan dalam proses politik (pluralis, elite, struktural atau post-struktural). Tetapi dapat juga menggunakan pendekatan melalui aktivis dan pekerja sosial, budayawan dan agamawan dalam upaya peningkatan kekuasaan-annya melalui aksi langsung (dan sering kali kolektif), atau dengan melengkapi mereka agar lebih efektif dalam menggunakan media dan arena politik.

Tidak jauh beda dengan itu, ada juga pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadartahuan yang menekankan pentingnya suatu proses edukatif (dalam pengertian luas) dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan komunitas sasaran. Dalam hal ini dapat dimasukkan gagasan-gagasan peningkatan kesadaran bersama untuk membantu mereka memahami struktur sosial, nilai, dan norma yang hidup, berlaku dan berkembang dikalangan mereka untuk bekerja menuju perubahan yang efektif dan seterusnya.

Berarti secara konseptual terdapat bentuk-bentuk pemberdayaan dalam persepektif sosiologi pembangunan, yang penerapannya dapat dielaborasi dalam kerangka menyediakan dasar bagi suatu model pemberdayaan dari praktik kerja masyarakat, baik di bidang sosial, keagamaan, dan budaya lokal. Pada tahap ini sudah waktunya untuk meninggalkan gagasan pemberdayaan dan memperhatikan aspek lain dari suatu perspektif keadilan sosial dan HAM yang penting dalam pengembangan masyarakat sesuai kebutuhan komunitas lokal yang berguna bagi pembangunan di daerah.

Jika dikaji secara mendasar dan lebih mendalam ternyata pengkajian pemberdayaan masyarakat umumnya diukur pada tingkat interpersonal, komunitas, kelembagaan, atau sosial dalam hal jaringan (menjembatani) dan norma timbal balik dan kepercayaan (ikatan) di dalam jaringan tersebut. Modal sosial harus dianalisis dalam kerangka ekologi multi-level dalam hal kedua konsepsi psikologis dan perilaku individu (rasa komunitas, khasiat atau kolektif pemberdayaan, tetangga, dan partisipasi warga negara) dan konsepsi tingkat jaringan kelembagaan dan komunitas. Perhatian yang berlebihan terhadap kohesi sosial melemahkan kemampuan untuk menghadapi atau terlibat dalam konflik yang diperlukan, dan dengan demikian, melemahkan komunitas. Alih-alih menekankan kohesi sosial, peluang "menjembatani jaringan" untuk meningkatkan kekuasaan, akses, dan pembelajaran harus ditekankan. Analisis jaringan kelembagaan dan

komunitas menunjukkan bagaimana modal sosial beroperasi pada tingkat tersebut dan di mana menargetkan sumber daya layanan dan mengembangkan struktur mediasi. Faktor psikologis dan perilaku menunjuk pada faktor yang memotivasi individu untuk terlibat dalam membangun modal sosial dan metode untuk mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan.

Dengan demikian, ini memperjelas adanya keputusan dan inisiatif yang harus dibuat di tingkat lokal, sehingga dapat menjadikan masyarakat memiliki identitas dan peranan sebagai partisipan yang dihargai; fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengawasi dan mengarahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan komunitas mereka; gagasan ini memiliki toleransi terhadap perbedaan dan mengakui arti penting pilihan nilai individual serta pembuatan keputusan yang terdistribusi; tujuannya yaitu pengembangan sosial melalui social learning yang dalam proses tersebut setiap individu berinteraksi menembus batas-batas organisatoris dan dituntun oleh kesadaran kritis individual; diikuti dengan budaya kelembagaan.

Interkoneksi teoritik dan konsep pemberdayaan masyarakat dapat mengacu pada teori sosiologi pembangunan yang pada awalnya berkembang di negeri Belanda. Sebelum mendapatkan nama sosiologi pembangunan, nama ilmu sosial ini lebih dikenal dan netral yang diberi nama sosiologi komparatif. Pada periode permulaan yaitu awal

tahun 1950 untuk melakukan kajian terhadap kebijakan pembangunan sebagian para ahli menggunakan pendekatan sosiologis dan sebagian menggunakan pendekatan antropologis terutama untuk mengkaji tentang kebudayaan pribumi dan sistem kekerabatan. Dan, ada juga yang menggunakan pendekatan ekonomi dan sejarah.

Kritik teori dalam pendalaman ilmu pengetahuan tentang pembangunan dapat difungsikan sebagai pertemuan antara masing-masing disiplin ilmu tersebut. Kemudian, pada periode kedua, diawal tahun 1970-an, masing-masing merintis jalannya sendiri-sendiri. Namun sosiologi dan antropologi mengalami proses fusi, tema-tema baru yang menjadi pusat perhatian seperti kekuasaan, kesenjangan, kota, masyarakat petani dan negara, perubahan-perubahan kemasyarakatan, orientasi terhadap teori-teori pembangunan dan ekonomi, serta politik secara nasional. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama awal tahun 1980-an, sosiologi pembangunan mulai mendapat tempat, banyak diantara para ahli sosiologi terlibat dalam perumusan dan analisis kebijakan pembangunan, bahkan ada juga diantaranya yang menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif kebijakan untuk membangun masyarakat yang lebih bermartabat di masa depan.

Pembangunan menjadi bahasa ilmu yang populer, sebab setiap pemerintahan dan negara menggunakan kata pembangunan untuk membawa masyarakatnya ke arah keadaan yang lebih maju, sejahtera

dan bermartabat. Pembangunan memang merupakan satu prasyarat bagi perbaikan hidup dan kehidupan manusia yang berkesinambungan di masa depan. Pakar ekonomi pembangunan Islam, merumuskan:

”Pembangunan (development) mengandung pengertian suatu proses yang menyebabkan sesuatu dapat tumbuh (growth), atau menjadi lebih matang atau dewasa, lebih maju atau lebih terorganisasi. Artinya, pertumbuhan menjadi karakteristik paling menonjol dalam pembangunan. Berikutnya, dinyatakan secara konsep pengertian pembangunan ekonomi memang sedikit berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, namun walaupun telah dibedakan arti, pada akhirnya kedua istilah tersebut akan digunakan secara silih berganti.

Menarik dicermati, dalam buku ini dinyatakan: ”Todaro dan Smith, sebenarnya telah mengungkapkan tentang pentingnya aspek keagamaan, yaitu bahwa ilmu ekonomi pembangunan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Di samping membicarakan alokasi sumber-sumber daya produktif yang langka secara efisien dengan mempertimbangkan pertumbuhan yang berkelanjutan secara terus menerus, ilmu ekonomi juga membahas persoalan ekonomi, sosial, politik, dan mekanisme institusional, baik publik maupun privat yang diperlukan dalam mewujudkan perbaikan yang cepat (paling tidak berdasarkan standar historis) dan berskala besar pada taraf kehidupan masyarakat luas. Dengan terus terang Todaro menyebut institusi yang

menunjukkan betapa pentingnya eksistensi institusi, tentunya termasuk agama, dalam proses pembangunan ekonomi.

Dengan kata lain, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera, yang dapat dikaji dari berbagai aspek kehidupan. Perspektif sosiologis memperjelas pandangan masyarakat, kiranya peningkatan mutu atau kualitas sumber daya manusia tidak hanya dari aspek material (ekonomi, sains dan teknologi) saja, melainkan juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia (moral, nilai, etika, estetika, religius). Permasalahannya, persepsi setiap orang, keluarga, kelompok, dan komunitas sosial memahami makna pembangunan, sifat, indikator dan parameter yang digunakan relatif berbeda antara satu dan lainnya.

Sosiologi pembangunan sebagai satu disiplin ilmu yang mengkaji masyarakat dan pembangunan yang saling terkait dan saling. Pengertian pembangunan dapat diartikan suatu “proses” pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama (organisasi, kelembagaan, kelompok, komunitas) sosial dan budaya. Hal ini tidak lain merupakan gambaran umum dari masyarakat luas (society). Menelaah pembangunan dalam masyarakat sebagai proses pertumbuhan dan perubahan yaitu proses yang menggambarkan dinamika dalam masyarakat sebagai proses pertumbuhan dan

perubahan, yaitu suatu proses yang menggambarkan dinamika dalam masyarakat adalah hal yang baru dalam sejarah. Dilihat dari segi dinamika masyarakat berarti perkembangan ilmu sosial erat hubungannya dengan timbulnya berbagai proses, seperti: pembentukan negara-negara baru, pergantian kekuasaan, dan kelas-kelas dimana terjadi pula pertentangan-pertentangan.

Dalam perkembangan sosiologi pembangunan dewasa ini sedang berlangsung suatu diskusi antara para pendukung paradigma teori modernisasi disatu pihak, dengan mereka yaitu para pembentuk teori-teori mengenai pembangunan dan keterbelakangan di pihak lain, dimana bagi mereka dari golongan kedua itu gejala pembangunan dan keterkebelakangan itu merupakan masalah yang berpasangan. Penelaahan yang menjadi perdebatan selama ini dimulai dari penjelasan mengenai paradigma yang dominan dalam sosiologi pembangunan, yaitu meliputi teori-teori modernisasi. Dalam teori modernisasi seringkali orang-orang menunjuk kepada perubahan-perubahan yang terjadi di Eropa pada masa peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Dalam perkembangannya seringkali pula timbul pemikiran bahwa terdapat kemungkinan tipe perubahan sosial tersebut akan muncul di negara-negara yang sedang berkembang di berbagai belahan dunia.

Kondisi itu dapat ditandai oleh adanya organisasi, kelembagaan, dan komunitas sosial yang mengatur diri sendiri (unit-unit lokal) dan

mengelola diri sendiri; adanya jaringan koalisi dan komunikasi pelaku (aktor) lokal serta unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri mencakup masyarakat lokal, lembaga dan organisasi lokal, pemerintah daerah, dan lain-lain yang menjadi basis tindakan sosial pada cakupan lokal dalam memperkuat pengawasan atas kemampuan dan sumber daya lokal yang kreatif, inovatif dan bersifat dinamis.

Memang diketahui ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran kritis segenap warga masyarakat, sehingga mampu membuat argumentasi dari berbagai macam eksploitasi sekaligus keputusan atas pilihan hidup dan masalah yang dihadapi. Kesadaran kritis itu dapat dicapai dengan melihat ke dalam diri, serta menggunakan apa yang didengar, dilihat dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Hal itu perlu dilihat sebagai suatu proses pemahaman situasi yang sedang terjadi dan berkorelasi dengan dimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat dapat menganalisis sendiri masalah mereka, mengidentifikasi berbagai faktor penyebabnya, menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru. Analisis realitas sosial harus dilakukan oleh orang yang dapat memutuskan sendiri apa persoalan, kebutuhan dan pengalaman yang penting baginya. Ini berarti mereka dapat mengambil tindakan sendiri. Dengan kesadaran kritis itu, masyarakat mampu mengenali potensi dan posisi mereka dalam komunitasnya. Kesadaran itu tentunya tidak datang

sendiri, tetapi melalui peningkatan pengetahuan masyarakat dengan tidak mengabaikan lokal knowledge dan lokal geniuses. Sehingga dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, komunitas dan sumberdaya yang didasarkan pada adanya pluralitas budaya lokal.

Realitas menunjukkan partisipasi sering dihambat oleh faktor kapasitas organisasi, kelembagaan, kelompok dan komunitas dari minimnya mutu sumber daya manusia hingga perencanaan program pengembangan masyarakat yang kurang efektif bergantung pada sebuah struktur organisasi. Pembentukan struktur semacam itu membutuhkan waktu, biaya dan pengorganisasian yang cukup lama. Selain itu, peran institusi yang seharusnya menjadi mediasi terhadap pihak eksternal kadang menindas masyarakat. Organisasi dan lembaga itu seharusnya berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam kegiatan atau program pembangunan bukannya mengalienasi dan mensubordinasi masyarakat hingga mereka tidak berdaya. Jika dikontekstualkan dengan realitas di lapangan, yaitu pentingnya eksistensi lembaga sosial, lembaga keagamaan, lembaga sosial dan budaya (transmigran, seni, sastra) baik sebagai lembaga independen maupun sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dengan pihak pemerintah dan kelompok masyarakat di luarnya. Untuk itu diperlukan perencanaan yang dipusatkan pada rakyat yaitu kebutuhan akan kelembagaan berdasarkan sumber daya lokal. Semua ini tidak

akan efektif tanpa adanya organisasi-organisasi lokal dan kelompok-kelompok sosial tertentu. Karena itu perubahan politik, peningkatan kesadaran masyarakat, pendampingan bagi komunitas lokal dan pendidikan non-formal merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi, kelembagaan, kelompok dan komunitas sosial.

Berdasar telaah akademis itu, ternyata betapa urgen partisipasi masyarakat sebagai alat memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat akan kehadiran suatu program. Identifikasi kondisi dan respon masyarakat terhadap program ini penting agar masyarakat tergerak untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Memang terdapat kecenderungan, semakin banyak manfaat yang akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, maka semakin kuat pihak tersebut akan terlibat dalam kegiatan itu. Artinya, dalam partisipasi masyarakat berlaku prinsip pertukaran dasar. Disamping itu, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan sejak awal dari perencanaan, karena merasa lebih mengetahui seluk beluk program dan pada akhirnya akan timbul rasa memiliki terhadap program tersebut. Sungguh partisipasi merupakan hak demokrasi berbasis masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan.

Ada pengakuan yang semakin besar atas modal sosial sebagai sumber daya yang mampu memfasilitasi dan membatasi tindakan

sosial masyarakat. Proses perubahan memberikan tekanan berlawanan pada modal sosial, sebagian menguat dan sebagian mengikisnya. Pengamatan penting adalah lembaga formal, jika bertentangan dengan lembaga formal, akan sangat membatasi tindakan kolektif. Namun, tampaknya mungkin untuk merancang tindakan yang bertujuan untuk membuat hubungan antara kedua jenis komunitas harus saling melengkapi dan bersinergi untuk memanfaatkan energi sosial untuk pembangunan.

Secara konseptual berarti warga masyarakat memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses pembangunan ataupun program-program tertentu, baik itu dalam bentuk sumbang saran maupun keterlibatan langsung secara fisik. Ini selaras dengan konsep pembangunan yang berpusatkan pada rakyat yaitu jenis pembangunan yang menyadari pentingnya kapasitas masyarakat, kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol atas sumberdaya material dan non materialnya. Memang fakta menunjukkan, manusia dan lingkungan sosial merupakan variabel endogen yang menjadi titik tolak bagi perencanaan pembangunan.

Jelasnya, pembangunan yang berpusatkan pada rakyat dapat dijadikan salah satu konsep dalam pembangunan untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan guna memenuhi kebutuhan manusia yang selalu bertambah. Akan tetapi peningkatan itu harus dicapai dengan cara yang sesuai dengan dasar partisipasi dan keadilan

sehingga hasilnya pun dapat dilestarikan untuk kelangsungan hidup manusia di masa depan. Dari paparan itu memperjelas, betapa penting dan strategisnya pemberdayaan dalam arti pendistribusian kekuasaan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, sehingga memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan. Ini juga berarti pentingnya lokalitas yang menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Wajar, jika indikator keberhasilan pemberdayaan yaitu adanya kesadaran bersama dikalangan komunitas yang diharapkan dapat mengubah pemberdayaan yang bersifat penguasaan menjadi kemitraan serta mengeliminir solidaritas semu yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

Literatur mengusulkan serangkaian alat dan cara yang membingungkan untuk membantu mengukur kemajuan menuju pemberdayaan masyarakat keberlanjutan. Ini berkisar dari indeks top down yang sangat agregat seperti sebagai Indeks Keberlanjutan Lingkungan masyarakat. Semakin banyak, indeks yang sangat teragregasi, yaitu paling umum, telah diserang karena gagal melibatkan komunitas lokal dan dengan demikian, memperkuat bias lembaga sosial dan pembangunan.¹⁶ Menggunakan partisipasi masyarakat sebagai cara memilih indikator yang relevan diusulkan

¹⁶S. Morse, *Putting the pieces back together again: an illustration of the problem of interpreting development*, (indicators using an African: case study. Applied Geography, 2004), h. 1–22

untuk memberikan sejumlah kunci manfaat.¹⁷ Pertama, manfaatnya pragmatis: karena tidak mungkin untuk memastikannya indikator yang dipilih oleh 'ahli pembangunan' akan menjadi relevan untuk situasi lokal, masukan lokal diperlukan untuk memastikan indikator secara akurat mengukur apa yang penting secara lokal.

Aspirasi masyarakat secara teratur juga harus memastikan adanya indikator berkembang seiring waktu karena keadaan berubah dan membantu memungkinkan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk dilanjutkan setelahnya pendanaan berhenti.¹⁸ Kedua, alasannya adalah penelitian pendahuluan menunjukkan keterlibatan lokal dapat membantu membangun kapasitas komunitas untuk menghadapi masa depan masalah, dan ini mungkin lebih signifikan daripada hasil program pembangunan yang sebenarnya. Misalnya, dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat bekerja di Bangkok, tindakan menginventarisasi tanah dan mengidentifikasi masalah memainkan peran pendidikan kunci dalam masyarakat.¹⁹ Ini lebih dari sekadar mengidentifikasi indikator yang relevan dengan komunitas; metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menginterpretasikan dan menampilkan data harus

¹⁷S. Bell., S. Morse, *Sustainability Indicators*, (Measuring the Immeasurable. Earthscan: London, 1999). Lihat juga: JN. Pretty, *Participatory learning for sustainable agriculture*. (World Development 23 [8], 1995), h. 1247–1263.

¹⁸G. Carruthers., G. Tinning, *Where, and how, do monitoring and sustainability indicators fit into environmental management systems?* (Australian: Journal of Experimental Agriculture 43, 2003), h. 307–323. Lihat juga : DM. Freebairn, CA. King, *Reflections on collectively working toward sustainability*, (indicators for indicators. Australian: Journal of Experimental Agriculture 43, 2003), h. 223–238.

¹⁹E. Fraser, *Urban ecology in Bangkok, Thailand: Community participation, urban agriculture and forestry*. Environments 30 [1], 2002, h. 37–49.

dengan mudah dan efektif dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sehingga semua pemangku kepentingan bisa berpartisipasi dalam proses tersebut.²⁰

Menurut Eklund (1999), Indikator pemberdayaan di tingkat komunitas adalah Rasa komunitas, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan tindakan politik kesehatan, belajar bagaimana mengatur untuk mengelola masalah komunitas, kemampuan untuk bekerja dengan orang lain untuk tujuan bersama, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah.²¹

Dalam teori Actors, masyarakat dinilai sebagai subyek yang mampu melakukan perubahan apabila terlepas dari kendali yang kaku dan mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka. Cara pandang itu sesuai akronim Actors, yakni authority (wewenang); confidence and competence (percaya diri dan kompetensi); trust (kepercayaan); opportunities (kesempatan); responsibilities (tanggung jawab); dan support (dukungan).

Teori Actors mengarah pada pendelegasian secara sosial dan moral sejumlah aspek berikut: Mendorong ketabahan, mendelegasikan wewenang sosial, mengatur kinerja, mengembangkan organisasi,

²⁰E. D., Fraser, A. J., Dougill, W. E., Mabey, M., Reed, & P. McAlpine, *Bottom up and top down: Analysis of participatory processes for sustainability indicator identification as a pathway to community empowerment and sustainable environmental management*. (Journal of environmental management, 78[2], 2006), h. 114-127.

²¹L. Eklund, *Dari partisipasi warga menuju pemberdayaan masyarakat*. (Tampere University Press, 1999)

menawarkan kerja sama, berkomunikasi secara efisien, mendorong inovasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Teori yang ditawarkan Cook dan Macaulay menghasilkan perubahan yang terencana karena input yang digunakan sudah diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, output yang dihasilkan berdayaguna secara optimal. Dalam kerangka kerja teori Actors, pemberdayaan dilakukan dengan menumbuhkan keberdayaan masyarakat yang didukung aspek internal dan eksternal. Sementara aktor dalam pemberdayaan adalah pemerintah atau organisasi non-pemerintah.²²

Dalam literatur psikologi komunitas, pemberdayaan dipandang dapat meningkatkan kompetensi dan harga diri individu yang pada gilirannya meningkatkan persepsi pribadi. kontrol yang berdampak langsung pada peningkatan kesehatan hasil.²³ Argumen ini dapat diperluas hingga mencakup keterhubungan individu dengan orang lain dan partisipasi dalam kelompok dan komunitas yang berkepentingan ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan dengan maksud membawa tentang perubahan di lingkungan eksternal mereka.²⁴

Literatur mengungkapkan bahwa pemberdayaan dapat mengarah pada peningkatan status kesehatan dari individu, kelompok, atau komunitas. Ada banyak literatur tentang indikator pemberdayaan, dan

²² Karjuni Dt. Maani, Jurnal Demokrasi (Vol X, No 1, 2011), Sarah Cook dan Steve Macaulay, dalam Perfect Empowerment (1996)

²³ N. Wallerstein, *Powerlessness, empowerment, and health*, (implications for health promotion programs. Am J Health Promot 6, 1992), h. 197-205.

²⁴ MA. Zimmerman, J. Rappaport, Citizen participation, perceived control, and psychological empowerment. Am J Community Psychol 16, 1988), h. 725-43.

telah dirancang untuk mengidentifikasi studi kasus, yang dapat dimasukkan ke dalam 'domain pemberdayaan', diantaranya adalah: Partisipasi; Organisasi berbasis komunitas; Kepemimpinan lokal; Mobilisasi sumber daya; Menanyakan 'mengapa'; Penilaian masalah; Hubungan dengan orang dan organisasi lain; Peran agen luar; dan Manajemen program. Studi terdahulu membahas hasil tinjauan pustaka dan memberikan contoh, baik dari negara maju maupun berkembang, tentang bagaimana masing-masing domain pemberdayaan telah menyebabkan peningkatan hasil kesehatan. Hasil review harus menarik bagi para perencana dan praktisi, kependudukan dan program yang ada fokus khusus pada pemberdayaan masyarakat.²⁵

Literatur pengelolaan lingkungan modern menekankan perlunya keterlibatan masyarakat untuk mengidentifikasi indikator untuk memantau kemajuan menuju pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dan tujuan pengelolaan lingkungan. Sebuah penelitian menilai dampak partisipatif proses identifikasi indikator keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan dalam tiga studi kasus yang berbeda. Yang pertama adalah proses mengembangkan kemitraan antara komunitas First Nations, kelompok lingkungan, dan perusahaan kehutanan untuk menyelesaikan konflik hutan manajemen di Kanada Barat. Yang kedua menggambarkan situasi di Botswana di mana komunitas

²⁵G. Laverack, *Using a 'domains' approach to build community empowerment*, (Community Development: Journal, 41[1], 2006), h. 4-12.

pastoral lokal bekerja dengan peneliti untuk mengurangi penggurunan. Studi kasus ketiga merinci proses yang dipimpin pemerintah yang sedang berlangsung dalam mengembangkan indikator keberlanjutan di Guernsey, Inggris, yang dirancang untuk memantau dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari perubahan ekonomi.

Penilaian komparatif antara studi kasus memungkinkan kita untuk menarik tiga kesimpulan utama. (1) Identifikasi dan pengumpulan indikator keberlanjutan tidak hanya menyediakan database yang berharga untuk membuat keputusan manajemen, tetapi juga proses melibatkan orang untuk memilih Indikator juga memberikan peluang bagi pemberdayaan masyarakat yang gagal diberikan oleh pendekatan pembangunan konvensional. (2) Proses multi-pemangku kepentingan harus secara formal dimasukkan ke dalam forum pengambilan keputusan atau mereka berisiko dianggap tidak relevan oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. (3) Karena batas-batas ekologi jarang bertemu dengan yurisdiksi politik, maka perlu untuk bersikap fleksibel saat memilih skaladi mana pemantauan dan pengambilan keputusan terjadi. Ini membutuhkan kesadaran akan jalur lingkungan utama yang berjalan melalui lanskap untuk memahami bagaimana daerah yang tampaknya terpencil dapat dihubungkan dengan cara yang tidak langsung terlihat.²⁶

²⁶Fraser, *Op., Cit.*

4. Interkoneksi Pemberdayaan Komunitas

Memahami konsep interkoneksi pemberdayaan dapat menggunakan teori liminalitas yang berguna untuk mengatasi ruang dikotomik dalam konteks budaya, atau paradigma oposisi biner khususnya dalam kaitannya dengan kajian *postcolonial*. Sebab, telaah keilmuan yang bercorak dikotomis dapat menjadi alternatif pengembangan teori-teori baru guna menjawab kebutuhan pembangunan di masa depan. Perspektif historis memperjelas paradigma *isolated entities* pada setiap keilmuan yang bercorak dikotomik-atomistik dan bahkan ideologis-politik melanda hampir di seluruh peradaban Islam. Model keilmuan yang berdiri sendiri, cenderung tidak tahu keberadaan rumpun keilmuannya sendiri, bahkan sampai tegur sapa satu keilmuan dengan keilmuan lainnya, baik pada level ontologis, epistemologis dan aksiologis.

Jika ditelaah secara mendasar dan mendalam, dapat dijelaskan secara konseptual, sebenarnya pemberdayaan komunitas sosial, dipahami sebagai pendekatan keilmuan yang saling terkait, terjaring, dan terpatrit dalam satu kesatuan yang utuh, maka corak dan model keilmuan yang terinterkoneksi dan dibangun berbasis inovasi tentu saja jauh lebih komprehensif dan bukannya bercorak dikotomis-atomistik.

Belum lagi jika kondisi ketiga disiplin keilmuan (*bayani*, *'irfani* dan *burhani*) yang bersentuhan dengan model *natural sciences* dan

social-humanities sciences, dan bahkan ilmu-ilmu sosial modern. Dalam kerangka *humanity*, ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan dewasa ini harus ditelaah secara kritis dan substantif, khususnya dalam kerangka interkoneksi dan inovasi. Oleh karena itu, kiranya diperlukan perombakan paradigmatis dalam proses peramuannya secara cerdas untuk bisa memperjelas arah pengungkapan dan pencarian kebenaran ilmiah yang objektif, logis dan sistematis.

Pemikiran mengintegrasikan ilmu pengetahuan agama ('Dakwah Islam') dan ilmu pengetahuan umum (sosiologi pembangunan; komunikasi pembangunan, komunikasi antarbudaya; antropologi budaya) sudah menjadi khazanah epistemologi keilmuan Islam. Sebab pada dasarnya, Islam tidak mendikhotomikan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Berarti, secara tema besarnya konsep itu mengidealkan ilmu pengetahuan Islam tidak sekedar menjadi media dakwah dan berguna bagi pengembangan masyarakat Islam, tetapi dikembalikan kepada keotentikannya sebagai sistem ilmu pengetahuan yang memiliki fungsi transformatif dan responsif terhadap isu-isu modern sejalan dengan tuntutan kebutuhan aktual masyarakat. Berikutnya menarik dikaji secara lebih mendalam, pendapat akademisi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menyatakan.

Pada tataran konsep, paradigma integratif-interkoneksi dapat dipahami dari penjelasan Abdullah (2004:5) yang menyatakan bahwa paradigma keilmuan interkoneksi-integratif merupakan bangunan keilmuan universal yang tidak memisahkan antara

wilayah agama dan ilmu. Dalam bangunan keilmuan ini, ilmu pengetahuan agama (Islam) tidak lagi terpisah secara dikhotomis dengan ilmu pengetahuan umum sebagaimana yang terjadi selama ini.²⁷

Perspektif sosiologi pembangunan dalam studi keislaman membutuhkan cara menempatkan pendekatan dan orientasi kajiannya yang berada pada posisi seimbang untuk diformulasikan sebagai kerangka metodologi studi keislaman yang menerapkan pendekatan empiris-fenomenologis. Kini dibutuhkan cara kerja keilmuan yang menerapkan program revitalisasi agar dapat dilakukan pemetaan ulang terhadap orientasi keilmuan dalam Studi Keislaman yang dibangun atas dasar asumsi bahwa Islam sebagai gejala budaya, dan sekaligus juga sebagai gejala sosial yang dinamis. Sebab, secara faktual pengamalan ajaran Islam selalu berakomodasi dan berinteraksi dengan sistem budaya masyarakat setempat dan kemudian yang mempengaruhi. Jelasnya, Islam sebagai realitas sosial dan budaya dapat membentuk pola tingkah laku penganutnya dalam berinteraksi, baik sesama kelompok maupun kelompok atau komunitas lainnya.

B. Masyarakat Islam Peradaban

1. Pengertian Masyarakat Islam Peradaban

Menganggap agama sebagai fondasi peradaban tentu bukanlah hal baru. Untuk ribuan tahun agama telah membentuk dasar dari

²⁷Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Paradigma Integratif-Interkonektif Keilmuan UIN* (Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam), Lihat : Dudung Abdurrahman, *Sosial-Humaniora dan Sains Studi Keislaman*, Editor, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006), h. 56, Cet. I

sebuah identitas individu. Asumsinya adalah bahwa mayoritas umat Islam, mempunyai kepastian ciri-ciri budaya, nilai-nilai yang kurang lebih mereka miliki dan yang berbeda dari yang dimiliki non-Muslim. Peradaban Islam mempunyai kerangka peradaban yang luas dan mendalam, yang menampilkan sistem peradaban yang unik. Keunggulan masyarakat Islam adalah fondasi material yang penting dari nilai-nilai intinya.²⁸ Selanjutnya, ciri khas dari masyarakat Islam berperadaban sangat konsisten. Pertama, bagi Muslim, keyakinan mereka adalah penting. Kedua, adanya religiusitas dan toleransi. Ketiga, ketekunan dan keteguhan hati serta kesetaraan adalah konsep kunci yang menjadi tolak ukur peradaban Islam.²⁹

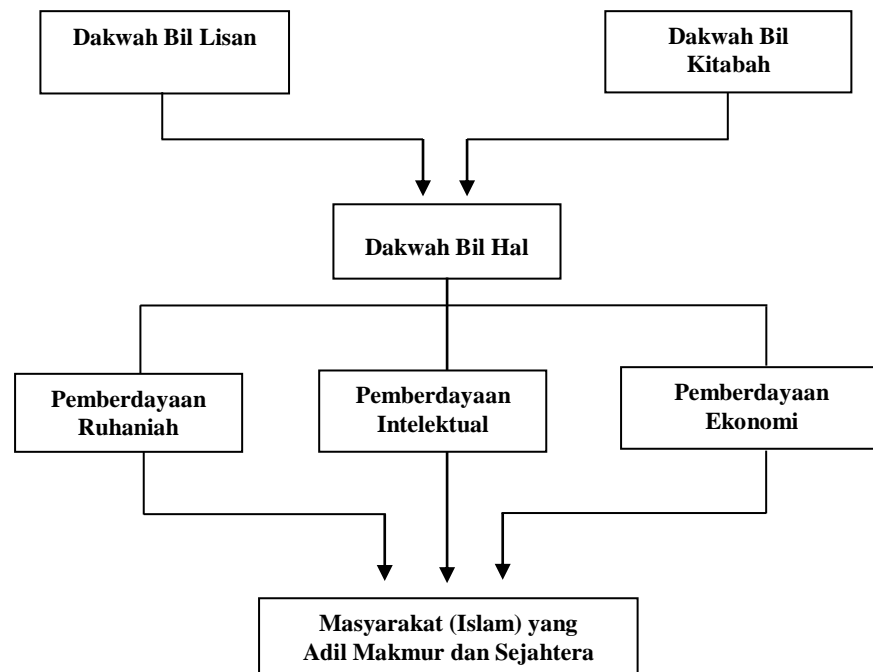
Selanjutnya perlu dilakukan pemahaman teoritik mengenai pengembangan masyarakat berbasis strategi dakwah, sehingga dapat dijelaskan, “dalam konteks pengembangan masyarakat Islam lebih bersifat pengembangan kemampuan, keterampilan dan keahlian dari sumber daya manusia yang diarahkan kepada prospek masa depan yang lebih cerah.³⁰ Tiga strategi dakwah (*bil lisan, bil kitabah, bil hal*) dapat diterapkan secara bersamaan dengan tiga aspek pemberdayaan

²⁸Z. Weillie, *Islamic Civilization and the World*, [J], (World Economics and Politics, 2007), h. 7.

²⁹Y. Esmer, *Is there an Islamic civilization?*, (Comparative Sociology, 1[3-4], 2002), h. 265-298.

³⁰R. M Savory, (Ed.), *Introduction to islamic civilization*, (Cambridge: University press, 1976).

ruhaniah, intelektual dan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik”,²⁰ yang digambarkan secara skematik.



Gambar 2.1
Skema Tiga strategi dakwah (*bil lisan, bil kitabah, bil hal*)
menurut R.M. Savory

Aturan dasar yang mengatur peradaban masyarakat Islam sebagaimana dipahami dari paradigma Al-Quran sebagai unsur utama peradaban Islam dan dari kehidupan dan tradisi Nabi Muhammad (SAW).³¹ Aturan-aturan ini membuka jalan menuju pembangunan sebagai dasar dari struktur kelembagaan, yang pada gilirannya menopang jalan kemajuan ekonomi dan sosial. Unsur-unsur penting dalam kehidupan seorang Muslim- kesatuan ciptaan, kebebasan

²⁰*Ibid.*, h. 232-233

³¹F. Aidulsyah, *The Paradigm of Al-Quran As The Main Element of Islamic Civilization: TSAQAFAH*, 16[1], 2020), h. 127-146.

ciptaan, kebebasan memilih, pembangunan ekonomi dan manusia, sistem ekonomi dan praktik keuangan dikembangkan dengan sebaik mungkin.³²

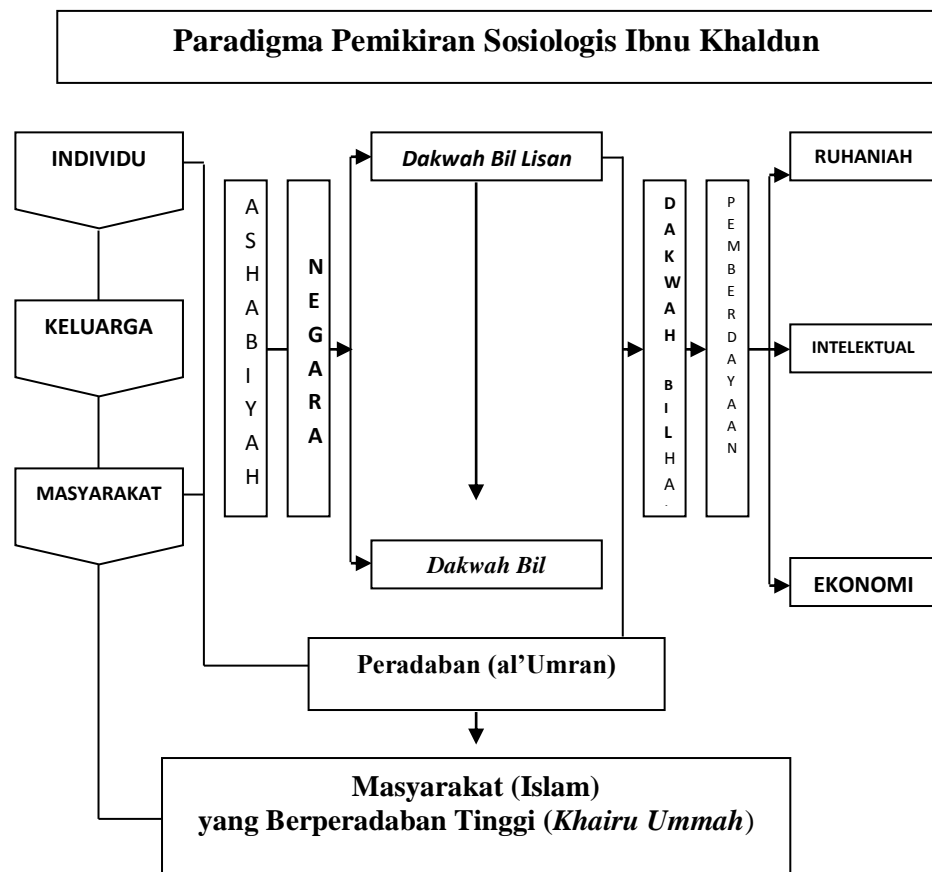
Salah satunya adalah pembentukan hisbah. Dasar pembentukan hisbah adalah mengumpulakn semua wilayah untuk bersatu dan mempunyai keyakinan dalam menjunjung tinggi firman Allah SWT dengan bersandar pada amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar. Ini sangat penting bagi pembangunan manusia yang beradab selain membentuk moralitas yang baik di antara anggota masyarakat agar mereka terus melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk.³³

Dalam upaya pemahaman kerangka konseptual yang digambarkan dalam bentuk skema itu dikaji secara lebih mendalam, tentunya pemberdayaan sebagai bentuk aksi dari pengembangan masyarakat Islam itu dirancang secara benar dan sesuai dengan program pembangunan masyarakat dapat berpengaruh positif terhadap keberhasilan dakwah. Terlebih lagi, kiranya program semacam itu dilakukan dengan cara bekerjasama antara para da'i dan ulama dengan berbagai elemen masyarakat atas dukungan penuh pemerintah (pusat; daerah), tentunya tujuan dakwah secara menyeluruh dapat dicapai.

³²H. Askari., Z. Iqbal.,N. Krichene, & A. Mirakhor, *Understanding development in an Islamic framework*, (Islamic Economic Studies, 22[1], 2014),

³³A. Ibrahim, *The fundamentals of Hisbah strategic in developing of Human* (Civilization: Academy of Entrepreneurship Journal, 25[1], 2019), h. 1-5.

Dan pada tahap berikutnya, dapat mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di masa depan. Lebih jelas, kiranya strategi dakwah itu dapat disinergikan dengan paradigma pemikiran sosiologis Ibnu Khaldun yang dijadikan dasar bagi pemberdayaan masyarakat, sebagaimana disajikan pada paradigma ilmiah berikut.³⁴



Gambar 2.2
Paradigma Pemikiran Sosiologis Ibnu Khaldun

Paradigma pemikiran itu memperjelas, pengembangan kemampuan dan kualitas sumber daya umat dalam lingkup kecil, seperti keluarga atau jama'ah pengajian harus menjadi model

³⁴*Ibid.*, h. 235

pemberdayaan yang perlu mendapat perhatian seluruh lembaga formal dakwah Islam dan siapapun secara terencana dan sistematis. Paradigma pengembangan masyarakat Islam dalam perspektif sosiologis itu dapat diterapkan untuk mengaktualisasikan pemberdayaan Komunitas secara alami yang terimplementasi dalam struktur kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat Islam yang terbentuk atas adanya komunitas yang terdiri dari keluarga muslim yang mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehariannya. Tegasnya, pemberdayaan komunitas yang berbeda etnik dan penganut agama dapat dilakukan melalui pengembangan SDM sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Pemberdayaan komunitas Islam adalah model empiris pengembangan perilaku individu dan kolektif dengan titik tekan pada pemecahan berbagai permasalahan konkret, yang termasuk juga pengelolaan resolusi konflik yang dihadapi masyarakat lokal.³⁵

Pemahaman secara lebih mendasar dan mendalam dapat dilakukan melalui telaah teoritik pengembangan masyarakat yang lebih difokuskan pada pemberdayaan yang dapat mendukung para praktisi pemberdayaan bekerja berdasar teori dan konsep pemberdayaan secara ilmiah.³⁶ Sebab, mencerdaskan masyarakat perlu teori dan konsep yang terimplementasi secara benar untuk dijadikan

³⁵S. F. Alatas, (2013), Ibn Khaldun, India: Oxford, University Press. Diakses dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38576990/2.Ibn_Ihaldun.pdf?1440596507=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DIbn_Khaldun.pdf

³⁶Webster, Andrew. *Introduction to the Sociology of Development*. Macmillan International Higher Education, 1990.

pembelajaran, pendampingan dan pelatihan yang kreatif dan inovatif, sehingga mereka merangsang suatu pendekatan yang positif, terinformasi, kreatif dan reflektif terhadap suatu masyarakat berdasar kesadaran bersama untuk membangun di masa depan.³⁷

2. Pemberdayaan Berbasis Pengembangan Masyarakat Islam

Pemberdayaan dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam dipahami sebagai upaya mentransformasikan dan melembagakan semua aspek ajaran Islam mengenai perilaku individual, pembentukan keluarga (*sakinah*), kelompok sosial (*jama'ah*), dan masyarakat (*ummah*). Tujuan filantropi usaha Islami sebagai alat untuk pengembangan masyarakat yang berkelanjutan adalah untuk menuju tatanan *khairu ummah* sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan secara universal, ber peradaban, mencintai prinsip-prinsip musyawarah, berkeadilan, keterbukaan, merdeka dan bebas dari segala bentuk penguasaan (*'eksploitatif'*) serta memiliki nuansa baru berbasis religiusitas yang diamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari.³⁸

Memberdayakan sebagai basis pergerakan sosial untuk menuju masyarakat harmoni tentu saja perlu memposisikan ajaran Islam yang mengajarkan agar manusia tidak bersikap sombong, bangga diri, berbuat zolim; berlatih agar mampu menguasai dan mengendalikan

³⁷Viterna, Jocelyn, and Cassandra Robertson. "New directions for the sociology of development." (*Annual Review of Sociology* 41, 2015), h. 243-269.

³⁸N. Alam, *Islamic venture philanthropy* (A tool for sustainable: community development., 2010), Available at SSRN 1565859.

perasaan dengki, iri hati dan cemburu kepada sesamanya. Berarti, pemberdayaan keagamaan (*ruhaniyah*) bagi kelompok sosial, komunitas pada beragam etnik, maupun setiap keluarga dan individu tentunya harus dilandasi pada keyakinan yaitu iman, taqwa, akhlaq dan nilai-nilai moral keagamaan yang tinggi dan konsisten. Menarik dikaji testimoni pakar Pengembangan Masyarakat Islam, yang menyatakan, studi mengungkapkan bahwa keyakinan sebagai dimensi spritual merupakan modal sosial dalam pengembangan masyarakat.³⁹

“Pengembangan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal shaleh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Baik secara individual, keluarga, masyarakat maupun dalam konteks negara. Pengembangan masyarakat Islam dalam perspektif pembangunan, dapat diartikan bahwa pengembangan dan pembangunan masyarakat dalam Islam bersifat menyeluruh. Pembangunan dalam perspektif agama (Islam) sebagaimana dijelaskan oleh A. Fauzie Nurdin, pada dasarnya merupakan suatu upaya perubahan yang bersifat menyeluruh (*Rahmatan lil’alamin*), menyentuh langsung ke dalam diri manusia dalam kaitan beragam kepentingan dan orientasi, sehingga dengan demikian lebih dahulu membangun manusia seutuhnya, material dan spiritual secara bersamaan (simultan).”⁴⁰

Penelusuran teori pengembangan masyarakat sebagai sub-sistem dalam kajian teori dakwah pembangunan dapat difokuskan pada telaah tentang pemberdayaan masyarakat Islam yang tidak sekedar

³⁹C. Candland, *Faith as social capital: Religion and community development in Southern Asia*, (In Social Capital as a Policy Resource 2001), pp. 129-148., Springer, Boston, MA.

⁴⁰Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Bandar Lampung, Matakata, 2007), h. 226., Cet. Kedua, Secara lebih mendalam dapat ditelusuri dari buku: Amrullah Ahmad, *Straegi Dakwah Islam di Tengah Era Reformasi Menuju Indonesia Baru Dalam Memasuki Abad ke-21*, Makalah, 21 April 1999. Lihat: M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2002). Lihat juga: A. Fauzie Nurdin, *Studi Pembangunan Agama di Desa Tertinggal*; dalam Khaeroni (ed.), *Islam dan Hegemoni Sosial*, (Jakarta: Media Cita, 2002)

memerlukan ketulusan hati dan niat baik semata untuk menolong kaum lemah dan terkebelakang. Menciptakan hubungan Islam-Barat yang realistis di era baru mampu mendukung pengembangan masyarakat.⁴¹ Sayangnya, realitas sosial mengindikasikan masih banyak orang memiliki persepsi yang salah dan membanggakan diri ketika mereka bekerja dengan penuh tipu muslihat, kebohongan, dusta, manipulatif, koruptif dan kekejaman sehingga sulit untuk membangun hubungan keduanya. Berarti diperlukan pemahaman yang benar tentang berbagai permasalahan yang didasarkan pada pengetahuan, kearifan, kejujuran, keberanian kekuatan dalam penegakannya secara benar dan konsisten.

Mencermati perkembangan masyarakat berbasis dakwah sebagai ilmu sebenarnya bukan semata-mata proses mengenalkan manusia kepada Allah SWT, melainkan proses transformasi nilai-nilai Ilahiyah berdimensi sosial, budaya, etika, moral dan keagamaan. Nilai-nilai ajaran Islam dalam pemberdayaan sosial secara mendasar dan empirik tidak sepenuhnya dijumpai pada tatanan masyarakat di kalangan umat Islam, sehingga sistem bermasyarakatpun mengandung kesenjangan dengan ajaran Islam secara *kaffah*.⁴² Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran integralisme Islam perlu dikembangkan dalam tiga arah, yaitu: (1) Pendalaman dan penghayatan ajaran secara

⁴¹Ben-Meir, J., 2004. Create a new era of Islamic-Western relations by supporting community development. *International journal of sociology and social policy*.

⁴²A. Elhady, *Islamic reform movement in Indonesia: role of Muhammadiyah in social empowerment*, (International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7[8], 2017), h. 340-350.

individu dan penyebarannya di tengah-tengah masyarakat. (2) Konsolidasi umat. (3) Pengkajian tentang kondisi konkrit masa kini dan prospek masa depan, serta mengenal dan menguasai tantangannya.⁴³ Demikian juga, pembinaan individu (dalam kajian ini: ‘Komunitas’) berbarengan dengan pembinaan masyarakat; dan pada saat yang sama masing-masing menunjang yang lain, pribadi tersebut menunjang terciptanya masyarakat yang mampu mewarnai pribadi-pribadi itu dengan warna yang dimilikinya.

Jika dikaji secara ilmiah, sebenarnya sejarah pengembangan masyarakat Islam bukan muncul karena keingintahuan yang tidak masuk akal, atau melalui peniruan model antik, tetapi sebagai tanggapan terhadap berbagai tantangan dalam menghadapi komunitas Islam selama beberapa abad.⁴⁴ Secara konseptual pengembangan masyarakat Islam untuk pengentasan kemiskinan adalah melalui mode keuangan Islam. Misalnya peran *Al-Awqaf* (wakaf Islam).⁴⁵ Ini adalah upaya alternatif yang dapat dilakukan.⁴⁶ Sehingga dapat dirumuskan sebagai upaya yang dilakukan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai,

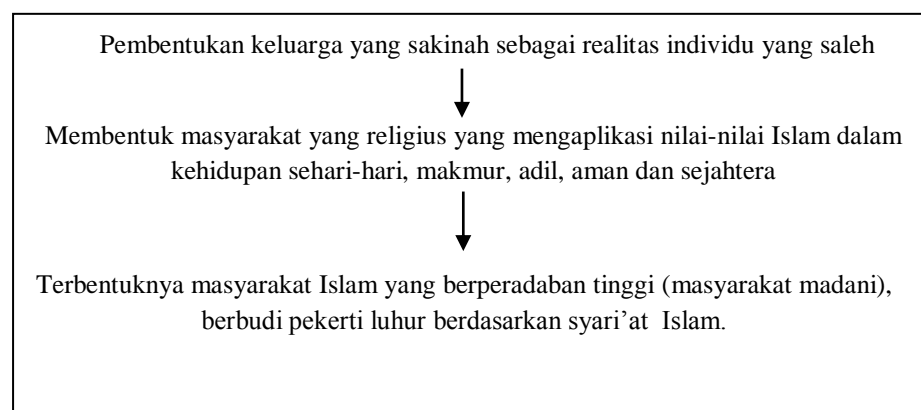
⁴³Singagerda, F. S., Alfian, F., Sari, N., & Akbar, M. F. (2020). Islamic Integralism and Muakhi Culture: The Relevance of Philosophical Values of Local Culture and Lampung Community Development.

⁴⁴F. M. Donner, *Narratives of Islamic Origins*, (Studies in late Antiquity and early Islam, 14, 1998), h. 241-308.

⁴⁵M. J. Elesin, *The Role of Al-Awqāf (Islamic Endowments) in Poverty Alleviation and Community Development in the Nigerian Context*, (Journal: of Muslim Minority Affairs, 37[2], 2017), h. 223-232.

⁴⁶M. S. Shabbir., N. M. Kassim., M. Faisal., M. Abbas, & Y.M. Sabti, *Poverty reduction through Islamic modes of finance*, (The way forward: The Journal of Social Sciences Research, 2018), h. 58-65.

norma dan budaya yang berbasis ajaran Islam secara benar, konsisten, terprogram dan berkesinambungan. Berdasar konsep itu secara empiris dapat digunakan pula untuk pengembangan model pemberdayaan Komunitas dan pengelolaan resolusi konflik keagamaan agar berguna bagi peningkatan pembinaan kerukunan umat beragama. Berarti jelas, terdapat saling keterkaitan antara individu dengan masyarakat, dimana hal itu berangkat dari individu, keluarga, masyarakat, yang akhirnya tertuju kepada tatanan pemerintahan yang menjalankan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk memahami paradigma dan tahapan pengembangan masyarakat Islam berdasarkan uraian diatas, secara detail dan sistematis dapat dikemukakan melalui paradigma ilmiah berikut ini.⁴⁷



Gambar 2.3

Model dan Tahapan Pengembangan Masyarakat Islam

⁴⁷*Ibid.*, h. 153

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Komunitas

1. Pemberdayaan Komunitas

Memahami makna “komunitas” (*community*) dalam perspektif sosiologi dibedakan dari *society* (dalam bahasa Inggris), terjemahan bahasa Indonesia diartikan ”masyarakat”. Dalam hal ini, pakar pengembangan masyarakat merumuskan :

Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*communities of common interest*), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Komunitas dalam batas-batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah dusun (dukuh atau kampung), desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok besar atau kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut komunitas.⁴⁸

Sebenarnya suatu komunitas memiliki tipologi dan karakteristik beragam pada lokalitasnya masing-masing. Komunitas yang mempunyai tempat tinggal tetap dan permanen, cenderung memiliki ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. Menarik dicermati pendapat pakar tersebut, yang menyatakan:

Dalam suatu komunitas aktivitas anggotanya dicirikan dengan partisipasi dan keterlibatan langsung anggota komunitas dalam kegiatan tersebut, di mana semua usaha swadaya masyarakat diintegrasikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat untuk meningkatkan taraf hidup, dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif penduduk sendiri, serta

⁴⁸Tonny Nasdian, Fredian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 1-2

pembentukan pelayanan teknis dan bentuk-bentuk pelayanan yang dapat mendorong timbulnya inisiatif, sifat berswadaya, dan kegotongroyongan, sehingga proses pembangunan berjalan efektif.⁴⁹

Jika ditelusuri secara teoritis dan lebih mendasar, ternyata pemberdayaan masyarakat terjadi secara dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan yang diindikasikan pada adanya pembangunan di segala bidang yang dewasa ini belum berhasil mengentaskan kemiskinan dan semakin banyaknya tenaga pengangguran, sulitnya memperoleh peluang kerja, dan mahalanya kebutuhan bahan pokok serta biaya hidup.

Mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat perlu didukung dengan pemberdayaan komunitas yang baik. Dalam sistem pemerintahan diperlukan adanya perilaku pemerintahan yang adil, jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokratis. Dalam struktur komunitas perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan publik. Peran sorang pemimpin juga sangat dibutuhkan. Sebuah studi penelitian menunjukkan bahwa kepala desa harus memiliki sikap adil dan bijak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya potensi konflik dan menguatkan harmoni sosial antar komunitas. Selain, Kepala desa harus memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam memberikan bantuan. Namun yang terpenting, sebagai pemimpin,

⁴⁹ *Ibid.*, h. 3

kepala desa harus mampu memberikan contoh yang baik kepada bawahannya sehingga tercipta hasil yang maksimal dan lingkungan masyarakat yang baik.⁵⁰

Bagi sekelompok kalangan warga masyarakat, pembangunan diklaim menjadi otoritas pemerintah agar masyarakat harus tunduk dan patuh dalam proses pelaksanaannya yang direncanakan pemerintah sendiri, yang cenderung tanpa melibatkan aspirasi masyarakat. Kondisi pembangunan masyarakat semacam itu mengindikasikan adanya “Mobilisasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan menjadi kewajiban masyarakat sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian pada negara dan bukan berdasar pada kesadaran yang ada pada masyarakat. Akibatnya, pembangunan menjadi sentralistik dan bias pusat”.⁵¹

Berarti jelas, konteks itu mempertegas bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai partner Pemerintah Desa dalam proses partisipasi yang difokuskan pada komunitas semakin diperlukan dalam kerangka pembangunan masyarakat yang lebih bermartabat dan demokratis di masa depan.⁵² Memang selama ini peran negara begitu menonjol dalam mengimplementasikan strategi dan pendekatan pembangunan

⁵⁰E. Agustina, *The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the Regional Autonomy Era*, (UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 6[1], 2019), h. 34-39.

⁵¹ Susetawan, *Pemberdayaan Masyarakat antara Ide dan Komoditi Baru Untuk Perubahan Sosial*. Lihat: Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), h. xii-xv

⁵²N. Angelia., B. M. Batubara., R. Zulyadi., T.W. Hidayat., & R.R. Hariani, *Analysis of Community Institution Empowerment as a Village Government Partner in the Participative Development Process*. (Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3[2], 2020), h. 1352-1359.

yang sentralistik dan *top down*. Implikasi lebih lanjut, terjadi dominasi pola-pola yang mementingkan keseragaman. Berarti konsep itu dapat dipahami:

“Program pembangunan dirancang dari atas, masyarakat hanya berperan dalam pelaksanaannya. Sebenarnya masyarakat menjadi a-historis pada proses perencanaan apalagi tidak pernah dianggap mampu dalam pengambilan keputusan. Ini berarti mengabaikan peranan masyarakat dan institusi lokal yang ada di dalamnya atau kurang mengakomodasi dan mengembangkan kapasitas lokal sebagai bagian dari energi sosial. Sehingga wajar bila potensi dan kapasitas lokal tidak teraktualisasi dan keberlanjutan pembangunan tidak terjadi karena tidak terbangunnya kapasitas lokal dan kemandirian masyarakat”.⁵³

Pemberdayaan komunitas pada pluralisme budaya lokal menjadi suatu proses menantang agar dapat mengubah wacana, sikap dan perilaku yang tidak saja bagi para akademisi, tetapi juga praktisi dan pekerja masyarakat. Pemberdayaan menekankan pada pengertian-pengertian subjektif manusia dan konstruksi pandangan-dunia mereka, dan menunjuk kepada kebutuhan untuk mendekonstruksi pengertian-pengertian ini dan pembentukan suatu kosakata alternatif untuk pemberdayaan. Pemberdayaan juga dibutuhkan untuk membangun sebuah wilayah yang tangguh tentu dengan berbagai prinsip dan strategi yang tepat.⁵⁴ Tentu hal ini dapat dicapai dengan memvalidasi suara-suara yang lain dari yang saat ini mendominasi wacana tersebut, dan dengan membuat suara-suara alternatif tersebut terdengar.

⁵³Sumartiningsih, Agnes (ed.), *Kata Pengantar*. Lihat: *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Jurusan Sosiatri FISIPOL UGM, 2004), h. iv

⁵⁴Y.J. Lee, *Building resilient cities through community empowerment: principles and strategies for Taiwan*, (International Review for Spatial Planning and Sustainable Development, 5[2], 2017), h. 35-46.

Perspektif itu menekankan adanya pengertian, analisis, dekonstruksi, pendidikan dan partisipasi dalam wacana-wacana kekuasaan, dan melihat suatu konsentrasi pada aksi saja sebagai sesuatu tidak mencukupi.

Penelusuran teori mengindikasikan adanya kompleksitas konsep kekuasaan, dan memberikan suatu kerangka yang berguna untuk memikirkan kekuasaan dalam konteks suatu model pemberdayaan dari kerja masyarakat. Dari sudut pandang seorang pekerja masyarakat yang sedang mencari suatu model pemberdayaan, tak diragukan lagi disana terdapat sebetulnya nilai dalam masing-masing dari keempat perspektif tersebut. Pada dataran tertentu, pandangan-pandangan pluralis dan elite mungkin merupakan perspektif dominan dalam masyarakat dan membentuk kebanyakan perdebatan tentang kekuasaan dan aksi politik, namun akan kontraproduktif jika hal-hal tersebut diabaikan atau berasumsi bahwa hal-hal tersebut tidak ada nilainya.

Pemberdayaan komunitas sosial, keagamaan dan budaya lokal dapat lebih efektif, jika adanya homogenitas dalam sistem sosialnya. Meski perlu dicermati juga, keragaman dan dinamika komunitas itu, dimana terdapat kompleksitas *kekuasaan* dan *keadaan yang merugikan*, yang masing-masing merupakan sentral untuk memahami dan menuju masyarakat yang berdaya. Gagasan dan aktualisasi pemberdayaan memang kompleks, baik dalam dirinya sendiri maupun

dalam proses interaksi dengan komunitas di luarnya. Konsep pemberdayaan memiliki beragam strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kelompok-kelompok yang dirugikan. Strategi-strategi ini dapat secara luas diklasifikasi dalam bentuk kebijakan dan perencanaan, aksi sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan penyadaran-tahuan pada beragam komunitas. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dapat dicapai dengan mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan aksi afirmatif atau diskriminasi positif mengakui keberadaan kelompok-kelompok yang dirugikan (kadang-kadang dinyatakan secara spesifik dalam istilah-istilah struktural), dan berupaya untuk memperbaiki keadaan ini dengan 'mengubah aturan--aturan' untuk menguntungkan kelompok yang dirugikan.

Menggunakan kebijakan ekonomi untuk mengurangi pengangguran dapat juga dilihat sebagai pemberdayaan dalam konteks peningkatan sumber daya, akses dan kesempatan bagi masyarakat. Memberikan sumber daya yang cukup dan aman kepada rakyat juga merupakan strategi pemberdayaan yang penting. Disamping itu, kebijakan untuk menjamin pendapatan yang cukup dapat disebut sebagai memberdayakan. Selanjutnya pengembangan mekanisme-mekanisme untuk masukan bagi pengguna layanan, menempatkan la-

yanan dan fasilitas yang mudah diakses, membuat mekanisme-mekanisme pengaduan pengguna layanan yang memadai dan mudah diakses, dan keputusan-keputusan perencanaan yang lain dapat membantu pemberdayaan kelompok yang dirugikan, jadi kepedulian pada gagasan tentang akses dan kesetaraan dalam kebijakan sosial dapat dibenarkan dengan alasan-alasan pemberdayaan.

2. Akulturasi Budaya Harmoni

Keharmonisan sosial merupakan keharusan bagi perkembangan masyarakat. Tanpa keharmonisan sosial pasti ada konflik, kekerasan, dan gejolak sosial. Hal itu menghalangi kesejahteraan masyarakat. Faktor kunci yang dapat meningkatkan keharmonisan sosial adalah saat orang menghidupkan arti jati diri mereka. Inilah yang Konfusius disebut Zhengming ("rectification of names"). Baginya jati diri menyiratkan setiap warga negara yang menjalani pengiriman dan arti penuh dari jati diri mereka dan peran. Tanpa perbaikan jati diri, masyarakat akan terus dirundung ketidakharmonisan. Sebagai contoh benua Afrika diliputi masalah ketidakharmonisan sosial yang disebabkan oleh kepemimpinan yang buruk, pemerintahan yang buruk, korupsi dan penggelapan dana publik, penculikan dan penyanderaan, kegelisahan generasi muda, migrasi ilegal, degradasi lingkungan, dll. Sulit ada keharmonisan sosial ketika warga negara mengalami deprivasi sosial.

Faktor-faktor yang meningkatkan keharmonisan sosial menjadi subjek diskusi dalam sebuah penelitian. Sharma (2014) berpendapat bahwa: “kunci untuk mencapai Harmoni Sosial terletak pada menjadi orang yang benar-benar sosial. Itu bisa dilakukan tidak hanya dengan memahami milik sendiri kebutuhan dan prioritas, tetapi juga menghormati orang lain yang sama.”⁵⁵ Lalu kita dapat membangun bangsa yang progresif yang dapat bekerja di jalur pembangunan berkelanjutan. Peneliti mencatat kerjasama itu dan hidup toleran di antara orang-orang atau juga di tingkat kelembagaan berkontribusi untuk harmoni sosial.

Keharmonisan sosial didapat ketika berbagai sektor atau unit masyarakat berada dalam aliansi dan saling berhubungan tanpa perang dan perselisihan. Mengambil contoh masyarakat seperti Irak, etnis-sektarian penuh kekerasan konflik sering terjadi karena tiga pilar dasar masyarakat, negara, budaya dan agama tidak bekerja dalam satu kesatuan.⁵⁶ Intinya adalah kolaborasi, kerjasama, toleransi, dan pengakuan hak minoritas dan mayoritas akan mempromosikan lingkungan itu mempromosikan harmoni sosial. Tanpa kerja mulus di antara semua lengan dan organ masyarakat, yang menghasilkan intoleransi dan ketegangan.

⁵⁵R.N. Sharma, *Peace, Development and Social Harmony*, (in Horizons of Holistic Education: 1, 2014), p. 151-157, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.678.1071&rep=rep1&type=pdf>, (accessed 10 November 2019).

⁵⁶Lukman Faily, *Social Harmony: An Iraqi Perspective*, 2016, http://eprints.lse.ac.uk/68498/2/Social_Harmony_an_Iraqi_perspective_english.pdf, (accessed 10 November 2019)

Menurut Faily (2016), untuk memahami kekuatan dan kelemahan pilar-pilar fundamental masyarakat Irak ini dan bagaimana membuatnya bekerja sejalan satu sama lain. Penelitian membahas tentang situasi Irak dan mengungkapkan fakta bahwa semua aspek kebutuhan masyarakat untuk bersekutu agar keharmonisan sosial meliputi perdamaian, cinta, keadilan, kesetaraan, persaudaraan, non-kekerasan, dan lain-lain dapat meningkatkan harmoni sosial; dan semua ini dapat dipromosikan melalui pendidikan sosial. Hak dipandang sebagai sesuatu yang harus dilepaskan karena dapat menimbulkan perdebatan. Hak asasi manusia dan penghormatan terhadap mereka diperlukan untuk memajukan harmoni sosial. Mereka dijamin tidak akan dilupakan.⁵⁷

Konsep harmoni sosial seperti yang dipahami dalam metafisika tradisional Afrika dan ontologi epistemologis juga dapat dikontraskan dengan barat yang penekanannya pada individualisme dan materialisme.⁵⁸ Temuan lain membahas bagaimana defisit modal sosial menghambat sosial harmoni. Harmoni sosial dapat dipupuk melalui akulturasi budaya seperti karya seni seperti topeng dan lain-lain karena digunakan untuk mempromosikan ketertiban dan kemakmuran.⁵⁹

⁵⁷*Ibid.*,

⁵⁸Peter Osimiri, *Holistic Ontology, Social Capital and the Quest for Social Harmony* (in Africa, Ihafa: in *A Journal of African Studies*, 8[1], 2016), p. 35- 53

⁵⁹Sullivan, Pat, *Protection and Social Harmony in the Art of West and Central Africa*, 2015, <https://agnes.queensu.ca/exhibition/protection-and-socialharmony-in-the-art-of-west-and-central-africa/>, (accessed 10 November 2019). Transparency International, *Citizens speak out about*

Berkenaan dengan faktor-faktor yang meningkatkan keharmonisan dan perdamaian sosial, penulis lain mengabdikan karyanya untuk memeriksa peran musik dan musisi dapat bermain dalam menciptakan harmoni sosial.⁶⁰Peneliti menunjukkan bahwa “istilah harmoni sosial tampaknya kurang umum dibandingkan yang lain istilah seperti integrasi sosial, pembangunan sosial, atau kohesi sosial.” Mengenai harmoni dapat dijelaskan dalam berbagai cara dan itulah mengapa Ip memeriksanya dalam hubungannya dengan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan dalam dua masyarakat Cina.⁶¹ Harmoni (*he xie*) adalah nilai inti dalam bahasa Cina tradisi tetapi merupakan konsep yang sulit untuk didefinisikan. Di Yunani kuno ada dewi yang bertanggung jawab atas harmoni sosial yang disebut Concordia dan kuil dibangun untuknya di akhir setiap perjuangan atau perang.⁶² Implikasinya, harmoni sosial adalah adanya kerukunan antar manusia. Ia juga membahas berbagai filosofi dalam sejarah yang mengedepankan usaha dan pendukung untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kapitalisme liberal.

corruption in Africa, 2019, https://www.transparency.org/news/feature/citizens_speak_out_about_corruption_in_africa, (accessed 10 November 2019).

⁶⁰Lajunen, Dylan Wade, Music, Inner Peace and Social Harmony: How Music and the Popular Musician Assist in the Cultivation of Inner Peace and Social harmony, 2017, <https://pdfs.semanticscholar.org/3a62/5e6385dc031b569a08e46273a9697a953dad.pdf>, (accessed 10 May 2019)

⁶¹Po-Keung Ip, Harmony as Happiness? Social Harmony in Two Chinese Societies, in “Social Indicators Research” 117(3), 2014, p. 719-741, www.jstor.org/stable/24720967 (accessed 20 November 2019).

⁶²Sanchez, Dan, The Profound Significance of Social Harmony, 2011, <https://mises.org/library/profound-significance-social-harmony>, (accessed 20 November 2019).

Keharmonisan Sosial berlaku bila kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat ada diurus dan diskriminasi sosial ditaklukkan, dan secara sosial tertantang dibantu untuk mengakses kehidupan.⁶³ Masyarakat yang didalamnya terdapat harmoni sosial adalah masyarakat yang harmonis dibina oleh pemerintahan yang baik, ekonomi yang baik, solidaritas sosial dan rasa hormat, toleransi sosial, keluarga dan kesejahteraan kerja, dll.⁶⁴ Melalui wawancara, Ho dan Chan menunjukkan di koran mereka bahwa orang menegaskan bahwa pemerintah dalam kebijakannya harus memperhatikan: “(1) Keadilan Pemerintah dengan Ketulusan dalam Komunikasi, (2) Saling Mendukung dan Menghormati dengan Integritas dan Dedikasi, (3) Dedikasi pada Pekerjaan Seseorang dan Komunitas dengan Membantu yang Membutuhkan dan, (4) Kreativitas serta Kemajuan dengan Toleransi dan Implikasi untuk pembuatan kebijakan dibahas.”

Fokus Marsh (2017) dalam artikelnya menjelaskan pada keharmonisan sosial dalam hubungan masyarakat adalah bahwa naluri sosial manusia diciptakan melalui proses evolusi seleksi alam.⁶⁵ Artikel ini menyajikan bukti bahwa proses evolusi dari seleksi alam menciptakan naluri sosial yang memberikan status positif dan

⁶³Narendra Modi, PM Modi's Independence Day Speech Focuses on Social Harmony, 2016, <https://www.livemint.com/Politics/m0bLzG2dDe5Jn44KybfdLJ/PM-NarendraModis-Independence-Day-speech-Its-our-duty-to.html> (accessed 10 November 2019)

⁶⁴Ho, L., Social Harmony and Diversity: The Affordances and Constraints of Harmony as an Educational Goal, in “Teachers College Record”, 119 (4), 2017, <https://eric.ed.gov/?id=EJ1119424>, (accessed 10 November 2019).

⁶⁵Charles Marsh, *Social Harmony Paradigms and Natural Selection: Darwin, Kropotkin and the Metatheory of Mutual Aid*, in, (Journal: of Public Relations Research, 25[5], 2017), p. 426-441, DOI: 10.1080/1062726X.2013.795861, (accessed 10 November 2019)

normatif bagi masyarakat tentang paradigma harmoni sosial dalam public relations.

Ada kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan bagaimana warga negara seharusnya hidup bersama, terutama dalam masyarakat yang semakin beragam secara etnis dan politik. Pentingnya menyeimbangkan tujuan membangun kepercayaan dan harmoni dalam masyarakat dan menginterogasi kepentingan yang mengakar, ketidaksetaraan kelembagaan, dan hubungan kekuasaan yang tidak setara.⁶⁶ Studi menyebutkan melalui harmoni sosial berbagai refleksi terhadap strategi masa depan dapat diciptakan untuk membangun berbagai sektor seperti pertanian, penggunaan teknologi, dan restorasi lingkungan.⁶⁷

Memahami budaya harmoni sebagai proses interaksi sosial dalam dinamika budaya lokal menjadi kebutuhan pembangunan masyarakat di masa depan. Sebab, harmoni sosial merupakan harapan semua orang, termasuk orang Jawadan beragam suku bangsa yang membawa budayanya ke Lampung. Dalam pepatah Jawa sering disebut “Rukun agawe santosa”, bahwa kerukunan antar sesama akan membawa kesejahteraan hidup. Pertengkar hanya akan mendatangkan kesengsaraan hidup manusia. Sejarah telah berbicara banyak tentang kehancuran hidup individu sampai dengan kehancuran

⁶⁶L. C. Ho, *Social Harmony and Diversity: The Affordances and Constraints of Harmony as an Educational Goal*, (Teachers College Record, 119[4], 2017), h. 4.

⁶⁷J.J. Davis., F. Schübeler., &S.F. Hobi, (2020), A Reflection on Future Strategies for Farming, the Use of Technology & Environmental Restoration: Towards Social Harmony and General Wellbeing. *Journal of Consciousness Exploration & Research*, 11(6).

negara adidaya karena ada disharmoni dan pertikaian internal. Kekalahan sering kali disebabkan oleh diri sendiri.

Menurut Iwan Nurdaya Djafar dalam tulisannya dukungan pemerintah Lampung dalam bentuk keharmonisan tersebut yang terdapat pada Pasal I yang berbunyi, “Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 01/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Provinsi Lampung, yaitu pada penjelasan Peraturan Daerah, Pasal 2 angka 1 huruf b, penulisan kata dan pemaknaan arti tulisan Sang Bumi Ruwa Jurai diubah menjadi sebagai berikut: b. Sai Bumi Ruwa Jurai: Rumah tangga agung jurai adat pepadun dan jurai adat saibatin.”

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Lampung No. 31 Tahun 2009 yang merupakan petunjuk pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2009, Pasal 4 huruf i dijelaskan bahwa moto “Sai Bumi Ruwa Jurai” mengandung makna bahwa bumi Lampung dilambangkan sebagai rumah tangga agung yang didiami oleh dua jurai masyarakat adat, yaitu jurai adat pepadun dan jurai adat saibatin.⁶⁸

Penelusuran konsep harmoni sosial dapat diawali dari telaah historis, yakni “ketika Islam masuk ke tanah Jawa, sebagian masyarakat ketika itu sudah ada yang memeluk agama Hindu, Budha dan aliran kepercayaan”.⁶⁹ Tak heran jika tradisi dan adat istiadat

⁶⁸ Iwan Nurdaya Djafar, <http://ulunlampung.blogspot.com/2014/03/mengapa-sai-bumi-ruwa-jurai>, di akses pada tanggal 07 juli 2021.

⁶⁹ Moh. Roqib, *Harmoni dalam Budaya Jawa*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), h. 79

begitu lekat pada masyarakat ketika itu. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, akulturasi antara agama dan budaya lokal masyarakat bisa kita temukan. Bahkan ketika Islam mulai masuk melalui Wali Songo, begitu jelas sekali bagaimana perpaduan antara agama dan budaya melebur menjadi satu. Akulturasi budaya yang terjadi secara dinamis dalam masyarakat semacam itulah yang kemudian melahirkan keanekaragaman tradisi di negeri ini.

Konsep “harmoni sosial” adalah landasan pemikiran sosial-politik Konfusianisme. Karena Konfusianisme lahir dari Negara-negara di awal sejarah Tiongkok, sistem pemikiran sangat berfokus pada pemeliharaan harmoni dalam masyarakat.⁷⁰ Baru-baru ini, pemerintah China telah mempromosikan konsep ini sebagai salah satu jurusan mereka cita-cita politik.⁷¹ Peneliti di Timur dan Barat telah mulai membayar dividen untuk konsep ini dan mempelajari manifestasinya di berbagai bidang: sistem pers,⁷² etika bisnis, dll.⁷³

Karena itu, sebuah penelitian mengusulkan kerangka "budaya aditif" sebagai mungkin kerangka kerja untuk studi kuantitatif tentang harmoni sosial. Aditif budaya adalah fenomena pencampuran nilai

⁷⁰N. Ryan, (2015), Civilizing humans with shame: How early Confucians altered inherited evolutionary norms through cultural programming to increase social harmony. *Journal of Cognition and Culture*, 15(3-4), 254-284

⁷¹Andrej, U. L. E. (2019). Harmony as an ethical and political idea. *Asian Studies*, 7(1), 115-128

⁷²B. H Winfield., T. Mizuno., & C. E. Beaudoin, (2000), Confucianism, collectivism, and constitutions: Press systems in China and Japan. *Communication Law and Policy*, 5(3), 323-347.

⁷³L. Wang., &H. Juslin, (2009), The impact of Chinese culture on corporate social responsibility: The harmony approach. *Journal of Business Ethics*, 88(3), 433-451; Lihat K. Y Chung., J. W Eichenseher., & T. Taniguchi, (2008), Ethical perceptions of business students: Differences between East Asia and the USA and among “Confucian” Cultures. *Journal of Business Ethics*, 79(1), 121-132

budaya dan norma ke dalam sistem yang ada. Melalui Analisis statistik Bayesian, sebuah studi tentang percampuran nilai-nilai budaya dalam cerita rakyat menunjukkan bagaimana Konfusianisme sangat mengakomodasi nilai-nilai agama.⁷⁴ Lebih penting lagi, studi kuantitatif selanjutnya, dalam Kerangka adiktif budaya, juga memberikan bukti substansial bahwa nilai-nilai Konfusianismeantitesis dengan kekerasan dan konflik.⁷⁵ Penjelasan lengkap tentang harmoni sosial dan aditif budaya harus mencakup sudut pandang subjektif. Lebih dalam penelitian mengusulkan “model spons pikiran” yang akan digunakan untuk mempelajarifenomenologi harmoni sosial dan aditifitas budaya. Dalam model mind sponge, filepikiran manusia dianalogikan sebagai spons yang berpusat, mengandung nilai-nilai intinya, danpinggiran, tunduk pada nilai-nilai baru. Lalu ada proses penyaringan yang konstan, menolak, dan memilih nilai, narasi, dan gagasan yang membentuk dan membentuk kembali inti. Ini proses telah dibahas secara luas dalam konteks akulturasi di dunia wirausaha menurut Vuong dan Napier (2015) dan Vuong (2016). Diskusi seperti itu dapat diperluas ke arah sudut

⁷⁴Q.-H Vuong., Q.-K. Bui., La, V.-P., et al. (2018). Cultural additivity: behavioural insights from the interaction of Confucianism, Buddhism and Taoism in folktales. *Palgrave Communications*, 4(1), 143.

⁷⁵Q.-H Vuong., M.-T Ho., H.-K. T Nguyen., et al. (2020). On how religions could accidentally incite lies and violence: folktales as a cultural transmitter. *Palgrave Communications*, 6(1), 82.

pandang fenomenologis tentang bagaimana Konfusianisme sosial harmoni dipertahankan atau dihancurkan.⁷⁶

Menjaga keharmonisan sosial dalam pandangan tradisional Konfusianisme adalah tentang melestarikan hierarki sosial fundamental (yaitu, penguasa-diperintah, ayah-anak, suami-istri), membuat wajah, dan memberikan wajah untuk orang lain. Bagaimanapun, kita hidup dalam globalisasi dan era digital, di mana hyperkonektivitas menyiratkan nilai-nilai tradisional Konfusianisme tanpa henti menghadapi beberapa komunitas lainnya.⁷⁷

Interaksi kepribadian spritual yang stabil melahirkan sistem sosial dengan kesejahteraan jiwa. Interaksi energi informasi kepribadian spritual melahirkan sistem sosial dengan perkembangan kesejahteraan sosial yang stabil dari komunitas. Budaya harmoni dengan jiwa, sipil, sosial dan materiil adalah sebuah sistem stabil dari perkembangan eksternal berinteraksi dengan Alam sekitarnya.⁷⁸ Siklus spritual ini terbentuk menjadi sistem sosial secara mandiri. Interaksi alam misalnya seperti halnya akulturasi budaya inilah yang dipahami sebagai harmoni sosial. Sedangkan keadaan Alam Tertinggi adalah Harmoni mutlak. *Mutable Nature* menjaga keadaan harmoni

⁷⁶Q.H Vuong., N.K. Napier, (2015), Acculturation and global mindsponge: an emerging market perspective. *International Journal of Intercultural Relations* 49, 354-367; Lihat Q. H. Vuong, (2016), Global mindset as the integration of emerging socio-cultural values through mindsponge processes: A transition economy perspective. In: J. Kuada (ed.) *Global Mindsets: Exploration and Perspectives* (pp. 109-126). Routledge, UK.

⁷⁷M.T. Ho, Studying social harmony with mindsponge and cultural additivity, pp. 1-4. *Ritsumeikan Asia Pacific University Beppu, Oita, Japan* September 12, 2020.

⁷⁸E. G Bryndin, (2012), Spiritual and moral basis interconfession consent, unities of the people and universal peace and good. *Journal «International scientific researches*, 4(3), 58-60.

dalam proses pengembangan kolektif organisasi. Keteraturan sebab akibat dari harmonisasi masyarakat, pribadi, dan Alam mengarahkan pada pengembangan organisasi kolektif kemanusiaan atas dasar pilihan bebas untuk keadaan yang jauh lebih harmonis.⁷⁹

Konsep harmoni dapat dirumuskan berdasar pada adanya keharmonisan sosial yang menjadi harapan setiap individu pada semua penganut agama yang mengajarkan agar pemeluknya hidup damai dan harmonis, baik secara internal umat Islam maupun antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam Islam, kerukunan dan keharmonisan sosial ditemukan di antaranya dalam konsep *ukhuwah*, persaudaraan. Jika diklasifikasi, *pertama, ukhuwah islamiyah*, kerukunan dan hidup harmonis sesama Muslim, *kedua, ukhuwah wathaniyah*, kerukunan dan keharmonisan hidup dengan sesama bangsa berwujud sikap nasionalisme, yang menjaga kerukunan di samping kebhinekaan warga bangsa. *Ketiga, ukhuwah basyariyah*, kerukunan sesama manusia di manapun individu berada, berwujud sikap internasionalisme yang berdimensi global, menghilangkan sekat-sekat fanatisme kenegaraan, mengembangkan pluralisme di dunia internasional untuk kemanusiaan dan peradaban. *Keempat, ukhuwah alamiyah*, persaudaraan dan keharmonisan hidup dengan sesama penduduk alam semesta, makhluk Tuhan, yaitu dengan menjalin kerja sama dan cinta dengan sesama penduduk alam raya, dengan hewan,

⁷⁹E.G. Bryndin, (2019), Synergetic paradigm of system development of universe and social harmony. *Social Science Learning Education Journal*, 4(8), No-19.

tumbuhan, tanah, air, udara dan sebagainya. Implikasi bagi orang yang menjaga *ukhuwah*, tentu saja mereka akan menjalani hidup yang harmonis dan gigih alam menjaga kelestarian dan keindahan alam semesta.

Telaah harmoni sosial menjadi kebutuhan pengembangan masyarakat untuk mewujudkan perebutan hak sebagai tempat bertolak, akan tetapi dimulai dari perlombaan memenuhi kewajiban terhadap sesama manusia, dalam arti individu masyarakat dibiasakan untuk menghormati hak sesama manusianya dan bukan dibiasakan untuk menuntut haknya.

Dalam tradisi Jawa yang berada dan berkembang dalam masyarakat di pulau Jawa maupun di berbagai daerah luar Jawa, dikenal istilah 'selametan'. Tradisi syukuran atas karunia Allah ini, diwujudkan dengan mengundang beberapa tetangga, untuk berbagi makanan. Ketika Wali Songo masuk ke tanah Jawa, tradisi ini tidak serta merta ditinggalkan dan dihapus dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya bisa menyatu dan berkembang menjadi 'tahlilan' yang masih dilakukan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan, akulturasi antara agama dan budaya telah melahirkan tradisi yang bisa diterima oleh semua pihak.

Harmoni sosial terbangun atas adanya akulturasi antara agama dan budaya, yang dapat juga bisa dilihat dalam berbagai peninggalan bangunan. Dalam berbagai bangunan tempat ibadah misalnya,

seringkali ditemukan adanya akulturasi antara keduanya. Misalnya gereja ganjuran, yang terletak di Bantul, Yogyakarta. Di gereja ini kita bisa menemukan akulturasi antara Jawa, Hindu-Budha dan Eropa. Di masjid demak, juga terdapat akulturasi antara Islam, Jawa dan Hindu. Salah satu masjid tertua ini dibangun dengan gaya khas Majapahit,⁸⁰ namun juga membawa corak Hindu. Perpaduan ini semakin menarik dengan langgam rumah khas Jawa Tengah.

Pertengkaran yang terjadi dalam komunitas sosial sering dimotivasi oleh watak keserakahan individu dan juga kolektif untuk meraih materi dan kemewahan duniawi. Motif tersebut kadang diperparah dengan mengatasnamakan Tuhan (Allah SWT). Jalaluddin Rumi berpesan, "jangan pernah bertengkar dan berdebat, karena bagi Tuhan tidak ada pertengkaran dan alasan, bagi Sang Maha Esa segalanya adalah cinta; segala sesuatu dalam bentuk cinta, kasih, dan kebenaran. Semoga Tuhan memberkahi kamu untuk bisa hidup dalam keadaan itu". Sejalan dengan hal itu, pemaknaan terhadap harmoni sosial bisa dipahami dari kata harmonis yang searti dengan kata serasi, selaras, rukun, dan sebagainya. Menjaga keharmonian sosial berarti menjaga agar kehidupan sosial selalu ada dalam keserasian, keselarasan, dan kerukunan. Berlawanan dengan hal itu, disharmoni yang merupakan kondisi di mana keserasian, keselarasan, dan

⁸⁰*Ibid*, h. 81.

kerukunan tidak terwujud dalam lingkungan sosial, yang ada yaitu pertikaian, perseteruan, kekerasan, dan penghancuran.

Penerapan istilah harmoni dalam konteks sosial harus jelas dan profesional, sebab harmoni yang sebenarnya dapat terjadi, jika semua intraksi sosial berjalan secara wajar dan tanpa adanya tekanan-tekanan atau pemaksaan-pemaksaan yang menyumbat jalannya kebebasan. Berarti, secara tegas dapat dinyatakan harmoni sosial mensyaratkan adanya jaminan kebebasan bagi setiap individu dalam masyarakat, untuk menyalurkan aspirasinya secara terbuka, dan tidak dengan cara pemaksaan maupun dengan cara menyumbat suara rakyat melalui katup-katup pengaman. Bahkan tidak dengan suara sepihak yang berupa ancaman-ancaman. Sehingga, masyarakat itu ungguh-sungguh berkembang dan menjadi harmonis oleh karena ada keadilan, kemerdekaan, pemerataan, dan hak-hak asasi manusia yang dihormati dengan baik oleh semua komponen masyarakat dalam proses dinamika sosial.

Berorientasi pada pemenuhan hak individu dan komunitas sosial tentu saja diharapkan jangan sampai terjadi benturan dengan hak-hak orang lain, sehingga perlu diprioritaskan pada kewajiban individual dengan sebaik-baiknya agar dapat mendorong terwujudnya hidup harmonis terhadap sesama dalam kehidupan masyarakat. Sebab sebenarnya interaksi kehidupan sosial antar individu akan melibatkan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Islam diajarkan agar setiap umat

berlomba-lomba dalam kebaikan, secara sportif, fair, dan jujur. Jika terjadi kalah atau menang bagi setiap individu harus diterima dengan lapang dada dan dikembalikan pada ketentuan takdir. Penerimaan secara tulus ini akan membenuk harmoni, dan harmonitas kehidupan yang telah ada harus dimaknai secara sportif, fair, dan jujur.

Konteks itu mempertegas, untuk memulai akan kesadaran terhadap hak orang lain, terhadap diri individu dan komunitasnya, seorang muslim harus mampu memaknai keimanannya dalam konteks sosial sebagai ajakan: (1) Agar mendorong sesama, betapun secara materi amat terbatas; (2) Agar senantiasa berdoa untuk perdamaian bagi sekalian manusia, dan (3) Agar melaksanakan keadilan kepada sesama dan memperlakukan mereka secara adil. Kesadaran itu memang harus dibangun dari individu, keluarga, kerabat, komunitas dan warga kelompok sosial dalam masyarakat yang dinamis,

Memaknai harmoni sosial tentu tidak terlepas dari upaya untuk menghindari, mengkaji dan menyelesaikan konflik yang dapat saja terjadi berkepanjangan. Berarti, pemaknaan harmonis secara psikologis-sosiologis lebih tepat dibandingkan dengan memaknai dalam perspektif politis. Ajaran dalam *fastabiqul khairat*, bergegas-gegaslah dalam kebajikan, memberikan motivasi bagi seseorang untuk melakukan yang terbaik, memulai, dan menjadi contoh terhadap kebaikan tersebut. Terhadap individu yang melakukan kebajikan seperti

ini nantinya orang lain akan melihat kenyataan dan realitas hidupnya, bukan melihat pada argumen-argumen kosong yang disampaikan.

Harmoni dalam kehidupan yang dimulai dari kejujuran dan sikap portif ini dalam perspektif teologis, masyarakat Muslim Jawa yang Sunni, pada dasarnya memiliki sikap lebih lunak dalam menghadapi masalah atau bersikap *tawasuth*, *tasamuh*, dan *tawazun* (moderat) dibanding dengan aliran-aliran dalam Islam seperti Khawarij dan Syi'ah dalam menghadapi berbagai masalah sosial. Sikap moderat mereka termanifestasikan dalam kehidupan, diantaranya; tidak mudah memberikan vonis, sehingga tampak seakan-akan cenderung membiarkan keadaan atau mempunyai sikap tidak peduli.

Jika ditelusuri lebih mendalam ternyata sikap moderat Muslim-Sunni-Jawa lebih tampak jelas dalam pemikiran fiqhnya yang apresiatif terhadap budaya lokal. Hal ini di antaranya disebabkan karena Muslim Jawa yang mayoritas kelompok tradisionalis Nahdatul Ulama ini dalam merumuskan masalah hukum berpegangan pada prinsip *maqashid al-syariah*, tujuan diundangkannya hukum, karena tidak terikat oleh teks-litera-struktural. Mereka lebih memerhatikan kaidah-kaidah hukum yang lebih bersifat nilai (*legal value*) seperti keadilan, kejujuran, persamaan di muka hukum, perlindungan hukum terhadap masyarakat tak seagama, serta menjunjung tinggi supremasi hukum Allah Swt. dalam keyakinan dan kehidupan sehari-hari.

Memang semestinya kita harus bisa saling belajar, terutama disaat provokasi terus menggeliat, disaat ujaran kebencian terus mengemuka di media sosial, semangat toleransi dan saling menghargai seharusnya tetap terjaga. Sejarah telah menunjukkan, bentuk saling menghargai itu telah ditunjukkan melalui peninggalan tradisi, budaya dan bangunan peninggalan masa lalu. Jika masa lalu harmoni dalam keberagaman itu bisa berjalan baik, semestinya *ketika peradaban terus modern seperti sekarang ini, harmoni itu juga masih bisa terjaga.*

Menarik mengkaji dialog Islam-Jawa, dialog Islam-Lampung, yang dapat membuahkan kearifan lokal atau kearifan tradisional, yaitu sebuah wawasan yang memuat kebijaksanaan orang Jawa dalam mengatasi berbagai persoalan hidup. Kearifan tradisional tersebut biasanya bersumber dari wawasan batin para cendekiawan terdahulu.⁸¹ Sebab, dialog Islam-Jawa juga memunculkan mitologi Jawa yang sangat banyak ragam dan jumlahnya. Masing-masing mitos dan simbol-simbol dalam budaya lokal tentu saja ada pendukungnya yang bersifat lokal. Misalnya mitos Kanjeng Ratu Kidul, Ki Ageng Sela, Gunung Tangkuban Perahu, Jaka Seger.⁸² Terkait hal itu, berarti manusia baik sebagai perorangan maupun sebagai komunitas, tidak dapat hidup tanpa mitos dan mitologi. “Mitos dipahami sebagai suatu

⁸¹Moh. Roqib, *Op Cit*, h. 88

⁸²*Ibid*, h. 91

yang diperlukan manusia untuk mencari kejelasan tentang alam lingkungannya juga sejarah masa lampaunya”.⁸³

Perumusan konsep komunitas etnik Jawa Muslim dan etnik Lampung Muslim yang selanjutnya di definisi operasionalkan untuk penelitian ilmiah ini, tentu diharuskan mengacu ke teori akulturasi budaya. Kata akulturasi diartikan sebagai proses percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing terhadap suatu masyarakat, sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu atau hasil pertemuan kebudayaan atau bahasa di antara anggota dua bahasa masyarakat, ditandai oleh peminjaman atau *bilingualism*.

Selain itu, ada konsep *inkulturasi* yang secara etimologi berasal dari bahasa latin “*in*” dan “*culture-cultura*”. Kata depan *in* mengandung pengertian “masuk atau kedalam”, sedangkan kata *Cultur* atau *cultura* berasal dari kata kerja “*colore*” yang berarti mengolah tanah. Pengertian kultur adalah segala karya yang membantu kehidupan manusia. Sinonimnya dengan kata lain adalah “kebudayaan” dari “budi-daya” dan peradaban dari kata Arab “*adaba*” yang berarti mendidik. Yang memiliki ruang lingkup masing-masing di setiap pembentukan dalam interaksi sosial yang

⁸³ *Ibid.*,

dilakukan sehingga menghasilkan keberagaman komunitas dan kelompok-kelompok dalam budaya.

Telaah konsep harmoni sebagai nilai etika sosial yang hidup dan berkembang dalam budaya lokal mengacu pada pandangan hidup yang dinamis dalam suatu komunitas sosial, baik berbasis dalam masyarakat Jawa maupun Lampung, yang dibatasi oleh unsur kedaerahan, geografis, dan pengalaman sejarah yang unik. Oleh karenanya, budaya lokal tidak dipandang sebagai dua entitas yang berhadapan, melainkan sebagai unsur ‘adonan’ yang membentuk identitas suatu komunitas budaya. Budaya Harmoni sebagai kegiatan manusia secara etis, moral, mental dan spiritual, dapat dimulai dari proses usaha akan penertiban diri sebagai pribadi dan kebersamaan dalam kelompok masyarakat. Sehingga *harmoni* membudaya dalam totalitas kehidupan masyarakat. Belajar dari konsep itu dapat dipahami, budaya *harmoni* dalam komunitas lokal merupakan pengertian, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah ada di pikiran manusia tentang budaya. Dalam pengertian umum, budaya lokal dimaksudkan sebagai budaya yang bukan saja berasal dari penduduk asli Lampung, tetapi juga budaya Jawa, Sunda, dan lainnya yang dibawa para pendatang dimana terjadi akulturasi secara dinamis. Oleh karena itu, budaya masyarakat lokal adalah esensi atau hakikat suatu budaya yang bersifat abstrak karena didasarkan atas pandangan dan pengalaman hidup.

Perumusan konsep harmoni sebagai etika dalam budaya lokal dapat difungsikan sebagai kajian untuk suatu perencanaan atau strategi pembangunan secara menyeluruh yang mengaitkan modal sosial berbasis daya kekuatan masyarakat lokal berdasar tanggung jawab manusiawi. Jika mengkaji *harmoni* sebagai etika pembangunan kesadaran aktivis sosial dan pelaku budaya dalam pembangunan daerah, tentu dibutuhkan kebijaksanaan berdasar pemahaman tentang etika yang tidak hanya menyebut peraturan-peraturan yang tidak pernah berubah. Melainkan secara kritis dapat dipertanyakan, bagaimana para aktivis sosial dan pelaku budaya lokal bertanggung jawab terhadap hasil-hasil keputusannya sendiri. Pertanggung jawaban moral itu tentu tidak saja dihadapkan kepada masyarakat, tetapi juga dihadapkan kepada pemerintah dan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah SWT sebagai Tuhan seru sekalian alam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. Amin, *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*, Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2003
- Abdullah, Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Alam, Nafis. "Islamic venture philanthropy: A tool for sustainable community development." *Available at SSRN 1565859* (2010).
- Alatas, S. F. (2013). Ibn Khaldun. India: Oxford, University Press. Diakses dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38576990/2.Ibn_Ihaldun.pdf?1440596507=&response-content-isposition=inline%3B+filename%3DIbn_Khaldun.pdf
- Alfitri, *Community Development: Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Anshori, M. Afif., *Pemetaan Resolusi Konflik di Lampung: Sebuah Penelitian Awal*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2013
- Armahedi Mahzar, *Revolusi Integralisme Islam: Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami*, Mizan, Bandung, 2004
- Ariyani, Farida, dkk. 2014. *Konsepsi Piil Pesenggiri Menurut Masyarakat Adat Lampung Way Kanan di Kabupaten Way Kanan (Sebuah Pendekatan Discourse Analysis)*. Bandar Lampung: Aura Printing & Publishing.
- Arikunto, Suharsini, 1998, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta, Rineka Cipta
- Arifin, Ali Imron, (Editor), 1996, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang, Kalimasahada Press
- Asy'ari, Musa, *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan*, LESFI, Yogyakarta, 2000
- Awang, Azam, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa: Suatu Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

- Aziz, Munawir, 2017, *Merawat Kebinekaaan: Pancasila, Agama, dan Renungan Perdamaian*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Azhar bin Jaafar @ Ramli, 2016, *Pengaruh Globalisasi Budaya dan Pemberdayaan FELDA Terhadap Akhlak Remaja Muslim di Kuantan-Pahang-Malaysia*, Bandar Lampung, Disertasi (Tidak Diterbitkan), , Bandar Lampung Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.
- Bailey, N. (2010). Understanding community empowerment in urban regeneration and planning in England: putting policy and practice in context. *Planning Practice & Research*, 25(3), 317-332.
- Bakker, J.W.M, , *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*, Kanisius, Yogyakarta, 1984
- Baldwin. R John, Perry. D Stephen, Moffit. Anne Mary, 2004 *Communication Theories for Everyday Life*, Pearson Education, Inc., Boston, USA.
- Barnett, Tony. *Sociology and development*. Routledge, 2003.
- Bell, S., Morse, S., 1999. Sustainability Indicators: Measuring the Immeasurable. Earthscan, London.
- Bogdan & Taylor. 1992. Terjemahan Arief Furchan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif; Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bungin B. *Sosiologi Komunikasi*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Burgoon & Huffer. 2002. *Human Communication*. London: Sage Publication.
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publications.
- _____, 2018. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*, (Edisi Ke-3), C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, 1988
- Departemen Agama RI., *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Jakarta, 1980
- _____, *Al-Quran dan Terjemah*, Tim Penterjemah, Jakarta, 1997 Dwiyanto, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2002.

- Eklund, L. (1999). *Dari partisipasi warga menuju pemberdayaan masyarakat*. Tampere University Press.
- Effendy Onong Uchjana, *Komunikasi dan Modernisasi*, Bandung: Alumni, 2000.
- Evi Afrina, Lusi, (Editor), *Penelusuran Sejarah Kolonisasi Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Afdeeling Telok Betong (1905-1930)*, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesawaran, 2017
- Fauzie, Nurdin, A., *Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat*, Gama Media, Yogyakarta, 2009
- _____, *Pemberdayaan Da'i dalam Masyarakat Lokal*, Gama media, Yogyakarta, 2009
- _____, *Integralisme Islam dan Budaya Lokal: Relevansi Nilai-Nilai Filosofis Kebudayaan Bagi Pembangunan Daerah*, Gama Media, Yogyakarta, 2010
- _____, *Sosiologi Pembangunan*, Panta Rhei Books, Jogjakarta, 2014
- _____, *Pemberdayaan Komunitas dalam Pengelolaan Resolusi Konflik*, Panta Rhei Books, Jogjakarta, 2014
- Faisal Ismail, *Pijar-pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur*, LESFI, Yogyakarta, 2002
- Fukuyama, Francis, Trust, *Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Qalam, Yogyakarta, 1995.
- Fukuyama, Francis, *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatahan Sosial*, Penerjemah: Ruslani, Cetakan Pertama, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2002
- Fukuyama, Francis, *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatahan Sosial*, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2002
- Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014
- Friedman, John, *Empowerment, the Politic of Alternative Development*, Blackwell, Massachusset, 1992.
- Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, The Free Press of Glencoe, New York, 1960

- _____. *Involusi Pertanian: proses perubahan ekologi di indonesia*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1983
- Goldberg AA dan Larson CE. *Komunikasi Kelompok: Proses-proses Diskusi dan Penerapannya*. Alih bahasa Koesdarini Soemiati. Jakarta, UI Press., 2006
- Giddens, Anthony, *Jalan Ketiga dan Kritik-Kritiknya*, Penerjemah: Imam Khoiri, Penerbit IRCiSoD., Yogyakarta, 2003
- Hardiman, F. Budi., *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta, 2003
- Harsono, T. Dibyo, *Adaptasi Budaya Masyarakat Lampung terhadap Lingkungan di daerah Kalianda dan Sukadana*, dalam Ria Andayani dan Sindu Galba, *Adaptasi Budaya Masyarakat Lampung*, Bandung, Balai Kajian sejarah dan Nilai Tradisional, 2006
- Hettne, Bjorn, *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Hubeis Vitayala Aida dkk. 2010. *Dasar-Dasar Komunikasi*. Bogor. Sains KMP IPB Press.
- Ife, J. W., & Smith, M. (1995). *Community development: Creating community alternatives vision, analysis and practice* (pp. 1-3). Melbourne: longman.
- Ife, Jim, dan Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat: Community Development*, Penerjemah: Joko Supriyanto, Nurul Yakin, M. Nursyahid, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world*. Cambridge University Press.
- Isbandi Rukuminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- Iwansyah, Henry, *Segregasi sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara (Studi di Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2013
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2005.
- Kiely, Ray. *The Sociology of Development: The Impasse and Beyond*. Routledge, 2014.

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1979

_____, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1982

_____, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1981

_____, *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Cetakan kedua, Jakarta, Gramedia, 1984

Kodiran, "Kebudayaan Jawa", dalam: Koentjaraningrat, 2004, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan

Kurnia Syah, Dedi, *Komunikasi Lintas Budaya: Memahami Teks Komunikasi, Media, Agama, dan Kebudayaan Indonesia*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2016

Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1987.

Ledwith, Margaret. *Community development: A critical approach*. Policy Press, 2020.

Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995

Liliweri, Alo, *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*, Cet. IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen A. *Teori Komunikasi (edisi 9): Theories of Human Communication*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009.

Long, Norman. "A perspective on the sociology of development." *Sociologia Ruralis* 24, no. 3-4 (1984): 168-184.

Long, Norman. "From paradigm lost to paradigm regained? The case for an actor-oriented sociology of development." *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe/European Review of Latin American and Caribbean Studies* (1990): 3-24.

Khomsahrial Romli, *Dinamika Hubungan Antara Masyarakat Transmigran Jawa dan Masyarakat Lampung di Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung : Studi Komunikasi Antar Budaya*. Bandung, UNPAD, Disertasi, Tidak diterbitkan, 2008

_____, *Dinamika Masyarakat Transmigrasi Jawa Islam dan Masyarakat Islam Lampung di Kabupaten Pesawaran (Studi Komunikasi Antarbudaya)*,

Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014

Kodiran, *Kebudayaan Jawa*, dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit Djambatan, cet.20, Jakarta, 2004.

M. Amral Sjamsu. *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1905-1955*. Djambatan. Jakarta. 1956.

Machrus Syamsuddin, Abd. Syukur, 1985, *Penemuan Teori Grounded Beberapa Segi Penelitian Kualitatif*, Surabaya, Usaha Maju

Mahadi, Ujang, *Komunikasi Antarbudaya: Strategi Membangun Komunikasi Harmoni pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017

Mahzar, Armahedi, *Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami, Revolusi Integralisme Islam*, Cetakan I, Bandung, Mizan, 2004

Melfa, Wendy, dan Solihin Siddiq, *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, Matakata, Bandar Lampung, 2007

Mikkelsen B, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999

Moeljarto, T., *Politik Pembangunan, sebuah analisis, arah dan strategi*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1987

Moleong, Lexy., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999

Miles, M.B., & Huberman, A.M. *Qualitative Data Analysis: an Expanded Source Book*. Thousand Oaks CA: SAGE Publication Inc., 1992

_____, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi, UI-Press, Jakarta, 2007

Mulyana D., Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010

_____, *Komunikasi Lintas Budaya: Pemikiran, Perjalanan, dan Khayalan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010

- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*: Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018
- Nasrullah, Rulli, *Komunikasi Antarbudaya: Di Era Budaya Siberia*, Cetakan ke-3. Jakarta, Prenadamedia Group, 2018
- Nasution, S. , *Qualitative Evaluation Methods*, SAGE Publication, Inc., Beverly Hill, 1980
- Nasdian, Fredian Tonny, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta, Pustaka Obor Indonesia, 2014
- Nawawi, Hadari, dan Mini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1994
- Nugroho, D. Riant., *Analisis Kebijakan*, Gramedia, Jakarta, 2007
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 2014
- Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, Ghalilia Indonesia, Jakarta, 1999
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Pamuji.s., *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Patton, M. Q., *Qualitative Evaluation Methods*, SAGE Publication, Inc., Beverly Hill, 1980
- Piliang, Yasraf Amir. *Post-Realitas; Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*. Yogyakarta: Penerbit Jalasutra, 2004
- Pranarka, A.M.W. dan Vidhyandika Moeljarto, "Pemberdayaan (*Empowerment*)", dalam Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarka (Penyunting), *Pemberdayaan: Konsep Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, 1996.
- Pretty, J.N., 1995. Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development* 23 (8), 1247–1263.
- Prijono Onny, dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, 2014.
- Ritzer, George, Goodman, Douglas J., *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Kencana, Jakarta, 2003

- Samovar, Larry A., Porter, Richard E., McDaniel, Edwin R., *Komunikasi Lintas Budaya: Communication Between Cultures* Penerjemah: Indri Margaretha Sidabalok, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2014
- Sayuti, Husin dan Ali Imron, *Situs Kolonisasi dan Transmigrasi di Propinsi Lampung*, dalam Muhajir Utomo (ed), *90 Tahun Kolonisasi 45 Tahun Transmigrasi*, Jakarta, Pustaka Swara, 1997
- Sendjaja SD., *Komponen Konseptual dan Jenis-jenis Teori Komunikasi. Dalam, Teori komunikasi*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2007
- Shoelhi, Mohammad, *Komunikasi Lintas Budaya dalam Dinamika Komunikasi Internasional*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2015
- Sihabudin, Ahmad, *Komunikasi Antar budaya: Satu Perspektif Multi- dimensi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013
- Soekartawi, *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*. Jakarta: UI Press., 2005
- Sudjarwo, *Interaksi Sosial Pada Masyarakat Majemuk (Studi di Provinsi Lampung)*, Pusat Penelitian Lembaga Penelitian UNILA, Bandar Lampung, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*, Edisi ke-3, Alfabeta, Bandung, 2017
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Sumarti T. "Interaksi dan Struktur Sosial". Dalam, *Sosiologi Umum*. Bogor: Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB., 2003
- Suparjan dan Suyatno, Hempri, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Aditya Media, Yogyakarta, 2003
- Susetiawan, *Pemberdayaan Masyarakat*, Aditya Media, Yogyakarta 2003
- Sumartiningsih, Agnes (ed.), *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Kanisius, Yogya- karta, 2004
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987
- Slamet Purbaadiwidjojo, *Mencari Suatu Sistem untuk Melaksanakan Pemindahan Penduduk Secara Besar-besaran*, dalam, Sri Edy Swasono dan Masri Singarimbun, *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, Jakarta UI Press, 1986
- Tim PUSPAR UGM (Penyunting), *Wawasan Budaya untuk Pembangunan: Menoleh Kearifan Lokal*, Yogyakarta, 2004

Tonny Nasdian, Fredian, *Pengembangan Masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014

Ufford, Philip Quarles van & Ananta Kumar Giri (editor), *Kritik Moral Pembangunan*, Kanisius, Yogyakarta, 2004

Usman, Sunyoto, *Pembangunan dan Optimalisasi Peran Masyarakat Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.

Warsito, Rukmadi Dkk., Kata Pengantar dalam buku: *Transmigrasi dari Daerah Asal sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*”, Cetakan pertama, Universitas Kristen Satya Wacana, Rajawali, Jakarta, 1984

Webster, Andrew. *Introduction to the Sociology of Development*. Macmillan International Higher Education, 1990.

Vredenburg, J., *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, 1983

Artikel

Abbott, J. (1995). Community participation and its relationship to community development. *Community Development Journal*, 30(2), 158-168.

Acciaioli, G. (2001). Grounds of conflict, idioms of harmony: custom, religion, and nationalism in violence avoidance at the Lindu Plain, Central Sulawesi. *Indonesia*, (72), 81-114.

Adamson, D., & Bromiley, R. (2008). Community empowerment in practice. *Lessons from Communities First*. <https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/2157-community-wales-empowerment.pdf>.

Adamson, D. (2010). *Community empowerment*. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 30(3/4), 114–126. doi:10.1108/01443331011033319.

Adhiati, M., & Bobsien, A. (2001). Indonesia's transmigration programme-an update. *Report prepared for Down to Earth*, pp. 1-44. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55048056/Transmigration_update_2001.pdf

- Adamson, D. (2010), "Community empowerment: Identifying the barriers to "purposeful" citizen participation", *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 30 No. 3/4, pp. 114-126. <https://doi.org/10.1108/01443331011033319>.
- Andrej, U. L. E. (2019). Harmony as an ethical and political idea. *Asian Studies*, 7(1), 115-128.
- Ansari, S., Munir, K., & Gregg, T. (2012). Impact at the 'bottom of the pyramid': The role of social capital in capability development and community empowerment. *Journal of Management Studies*, 49(4), 813-842.
- Angelia, N., Batubara, B. M., Zulyadi, R., Hidayat, T. W., & Hariani, R. R. (2020). Analysis of Community Institution Empowerment as a Village Government Partner in the Participative Development Process. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1352-1359.
- Agustina, E. (2019). The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the Regional Autonomy Era. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 34-39.
- Aidulsyah, F. (2020). The Paradigm of Al-Quran As The Main Element of Islamic Civilization. *TSAQAFAH*, 16(1), 127-146.
- Ansari, S., Munir, K., & Gregg, T. (2012). Impact at the 'bottom of the pyramid': The role of social capital in capability development and community empowerment. *Journal of Management Studies*, 49(4), 813-842.
- Askari, H., Iqbal, Z., Krichene, N., & Mirakhor, A. (2014). Understanding development in an Islamic framework. *Islamic Economic Studies*, 22(1).
- Banban, D. (2018). Harmony in diversity: an empirical study of harmonious co-existence in the multi-ethnic culture of Qinghai. *International Journal of Anthropology and Ethnology*, 2(1), 1-23.
- Bannister, J., & O'Sullivan, A. (2013). Civility, community cohesion and antisocial behaviour: policy and social harmony. *Journal of Social Policy*, 42(1), 91-110.

- Bellomo, N., Herrero, M. A., & Tosin, A. (2012). On the dynamics of social conflicts: looking for the black swan. *arXiv preprint arXiv:1202.4554*.
- Ben-Meir, J. (2004), "Create a new era of Islamic-Western relations by supporting community development", *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 24 No. 12, pp. 25-43. <https://doi.org/10.1108/0144333041079080>
- Bryndin, E. (2020). Harmonization-Civilization Improvement Process. *Global Journal of Human Social Science: Sociology & Culture*, 20(1c), 15-19.
- Bryndin, E. G. (2012). Spiritual and moral basis interconfession consent, unities of the people and universal peace and good. *Journal «International scientific researches*, 4(3), 58-60.
- Bryndin, E. G. (2019). Synergetic paradigm of system development of universe and social harmony. *Social Science Learning Education Journal*, 4(8), No-19.
- Butler, G. (2017). Fostering community empowerment and capacity building through tourism: perspectives from Dullstroom, South Africa. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 15(3), 199-212.
- Carruthers, G., Tinning, G., 2003. Where, and how, do monitoring and sustainability indicators fit into environmental management systems? *Australian Journal of Experimental Agriculture* 43, 307–323.
- Candland, C. (2001). Faith as social capital: Religion and community development in Southern Asia. In *Social Capital as a Policy Resource* (pp. 129-148). Springer, Boston, MA.
- Chung, K. Y., Eichenseher, J. W., & Taniguchi, T. (2008). Ethical perceptions of business students: Differences between East Asia and the USA and among “Confucian” Cultures. *Journal of Business Ethics*, 79(1), 121-132
- Clark, D., Southern, R., & Beer, J. (2007). Rural governance, community empowerment and the new institutionalism: A case study of the Isle of Wight. *Journal of Rural Studies*, 23(2), 254-266.

- Clauss, W., Evers, H. D., & Gerke, S. (1988). The formation of a peasant society: Javanese transmigrants in East Kalimantan. *Indonesia*, (46), 79-90.
- Christie, N. (1977). Conflicts as property. *The British journal of criminology*, 17(1), 1-15.
- Craig, G. (2007), “Community capacity-building: something old, something new...?”, *Critical Social Policy*, Vol. 27 No. 3.
- Coleman, J. S. (1990). Commentary: Social institutions and social theory. *American Sociological Review*, 55(3), 333-339.
- Davis, J. J., Schübeler, F., & Hobi, S. F. (2020). A Reflection on Future Strategies for Farming, the Use of Technology & Environmental Restoration: Towards Social Harmony and General Wellbeing. *Journal of Consciousness Exploration & Research*, 11(6).
- Delle Fave, A., Brdar, I., Wissing, M. P., Araujo, U., Castro Solano, A., Freire, T., ... & Soosai-Nathan, L. (2016). Lay definitions of happiness across nations: The primacy of inner harmony and relational connectedness. *Frontiers in psychology*, 7, 30.
- Dhesi, A. S. (2000). Social capital and community development. *Community development journal*, 35(3), 199-214.
- Dreier, P. (1996). Community empowerment strategies: The limits and potential of community organizing in urban neighborhoods. *Cityscape*, 121-159.
- Ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id., Transmigrasi: Masa Doeloe, Kini, dan Harapan Kedepan, 2015, Diakses pada tanggal 07 februari 2021 dari <https://ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id/resources/files/a2e27404a080382134857e7ef4874c6f.pdf>
- <https://www.jdh.lampungprov.go.id/Product-Hukum/Provinsi/1/Pdf/Bentuk-Lambang-Daerah>, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021
- Donner, F. M. (1998). Narratives of Islamic Origins. *Studies in late Antiquity and early Islam*, 14, 241-308.

- Elesin, ' . M. J. (2017). The Role of Al-Awqāf (Islamic Endowments) in Poverty Alleviation and Community Development in the Nigerian Context. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 37(2), 223-232.
- Elhady, A. (2017). Islamic reform movement in Indonesia: role of Muhammadiyah in social empowerment. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(8), 340-350.
- Esmer, Y. (2002). Is there an Islamic civilization?. *Comparative Sociology*, 1(3-4), 265-298.
- Eversole, R. (2012). Remaking participation: challenges for community development practice. *Community development journal*, 47(1), 29-41.
- Faily, Lukman, Social Harmony: An Iraqi Perspective, 2016, http://eprints.lse.ac.uk/68498/2/Social_Harmony_an_Iraqi_perspective_english.pdf, (accessed 10 November 2019).
- Fearnside, P. M. (1997). Transmigration in Indonesia: lessons from its environmental and social impacts. *Environmental management*, 21(4), 553-570.
- FEDOR, Catalin-George. "Social Capital and Community Development: Case Study." *Social Research Reports* 11, no. 1 (2019): 65-77.
- Fraser, E. D., Dougill, A. J., Mabee, W. E., Reed, M., & McAlpine, P. (2006). Bottom up and top down: Analysis of participatory processes for sustainability indicator identification as a pathway to community empowerment and sustainable environmental management. *Journal of environmental management*, 78(2), 114-127.
- Fraser, E., 2002. Urban ecology in Bangkok, Thailand: Community participation, urban agriculture and forestry. *Environments* 30 (1), 37–49.
- Freebairn, D.M., King, C.A., 2003. Reflections on collectively working toward sustainability: indicators for indicators!. *Australian Journal of Experimental Agriculture* 43, 223–238
- Geldof, D., Schrooten, M., & Withaecx, S. (2017). Transmigration: the rise of flexible migration strategies as part of superdiversity. *Policy & Politics*, 45(4), 567-584.

- Glasford, D. E., & Calcagno, J. (2012). The conflict of harmony: Intergroup contact, commonality and political solidarity between minority groups. *Journal of Experimental Social Psychology*, 48(1), 323-328.
- Gohori, O., & van der Merwe, P. (2021). Tourism and Community Empowerment: The Perspectives of Local People in Manicaland Province, Zimbabwe. *Tourism Planning & Development*, 1-19.
- Ibrahim, A. (2019). The fundamentals of Hisbah strategic in developing of Human Civilization. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 25(1), 1-5.
- Hartoyo, H., Sindung, H., Teuku, F. and Sunarto, S. (2020), "The role of local communities in peacebuilding in post-ethnic conflict in a multi-cultural society", *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, Vol. 12 No. 1, pp. 33-44. <https://doi.org/10.1108/JACPR-06-2019-0419>.
- Hastuti, T. K., & Yuliati, U. (2017). A model for mangrove forest management based on community empowerment in Bantul regency. *Journal of Environmental Management & Tourism*, 8(6 (22)), 1232-1237.
- Ho, M.T. Studying social harmony with mindsponge and cultural additivity, pp. 1-4. Ritsumeikan Asia Pacific University Beppu, Oita, Japan September 12, 2020.
- Ho, L. C. (2017). Social Harmony and Diversity: The Affordances and Constraints of Harmony as an Educational Goal. *Teachers College Record*, 119(4), n4.
- Ibad, S. (2017). Local Wisdom of Community Empowerment in The Management And Sustainable Development of Fishery Resources (Study in Situbondo District). *Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan*, 8(1), 24-31.
- Hoey, B. A. (2003). Nationalism in Indonesia: Building imagined and intentional communities through transmigration. *Ethnology*, 109-126.
- Ikeke, M. O. Confucius' Philosophy of Zhengming ("Rectification of Names"): Implications for Social Harmony in Africa. *Faculty of Humanities and Social Sciences of "Aurel Vlaicu", Arad*,

129.[http://www.jhss.ro/downloads/22/articles/10%20vol%2011%20no%20%20\(22\)%202020%20BT-129-142.pdf](http://www.jhss.ro/downloads/22/articles/10%20vol%2011%20no%20%20(22)%202020%20BT-129-142.pdf).

Ip, Po-Keung, Harmony as Happiness? Social Harmony in Two Chinese Societies, in "Social Indicators Research" 117(3), 2014, p. 719-741, www.jstor.org/stable/24720967 (accessed 20 November 2019).

Iwan Nurdaya Djafar, <http://ulunlampung.blogspot.com/2014/03/mengapa-sai-bumi-ruwa-jurai>, di akses pada tanggal 07 juli 2021

Karjuni Dt. Maani, Jurnal Demokrasi (Vol X, No 1, 2011), Sarah Cook dan Steve Macaulay, dalam Perfect Empowerment (1996).

Kay, A. (2006). Social capital, the social economy and community development. *Community Development Journal*, 41(2), 160-173.

Kimengsi, J. N., & Gwan, S. A. (2017). Reflections on decentralization, community empowerment and sustainable development in Cameroon. *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, 1(2), 53-60.

Kurniadi, A., Legionosuko, T., & Poespithadi, W. (2019). Conflict Transformation Between Balinese And Lampung Ethnic In Realizing Sustainable Peace In Balinuraga Village, Way Panji District, Lampung Selatan Regency. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara/ April*, 9(1).

Kim, H. Y. (2018). Effects of social capital on collective action for community development. *Social Behavior and Personality: an international journal*, 46(6), 1011-1028.

Lakis, J. (2009), "Social conflicts and the culture of cooperation in transitional society", *Baltic Journal of Management*, Vol. 4 No. 2, pp. 206-220. <https://doi.org/10.1108/17465260910958818>

Lam, T., & Yeoh, B. S. (2004). Negotiating 'home' and 'national identity': Chinese-Malaysian transmigrants in Singapore. *Asia Pacific Viewpoint*, 45(2), 141-164.

Lajunen, Dylan Wade, Music, Inner Peace and Social Harmony: How Music and the Popular Musician Assist in the Cultivation of Inner Peace and Social

harmony, 2017, <https://pdfs.semanticscholar.org/3a62/5e6385dc031b569a08e46273a9697a953d.pdf>, (accessed 10 May 2019)

Laverack, G. (2001). An identification and interpretation of the organizational aspects of community empowerment. *Community development journal*, 36(2), 134-145.

Laverack, G. (2006). Using a 'domains' approach to build community empowerment. *Community Development Journal*, 41(1), 4-12.

Laverack, G. (2006). Using a 'domains' approach to build community empowerment. *Community Development Journal*, 41(1), 4-12.

Lee, Y. J. (2017). Building resilient cities through community empowerment: principles and strategies for Taiwan. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 5(2), 35-46.

Lewin, K. (1948). Resolving social conflicts; selected papers on group dynamics.

_____ (1997). *Resolving social conflicts and field theory in social science*. American Psychological Association.

Leung, K., Brew, F. P., Zhang, Z. X., & Zhang, Y. (2011). Harmony and conflict: A cross-cultural investigation in China and Australia. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 42(5), 795-816.

Liu, C. M., & Guan, B. (2009). Power of harmony-against the background of chinese culture. *Journal of Tianjin University (Social Sciences)*, 11(5), 453-457.

Mahmuda, M., & Sarwan, S. (2020). Pemberdayaan melalui Zakat Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 3(1), 23-42.

Marsh, Charles, Social Harmony Paradigms and Natural Selection: Darwin, Kropotkin and the Metatheory of Mutual Aid, in "Journal of Public Relations Research", 25(5), 2017, p. 426-441, DOI: 10.1080/1062726X.2013.795861, (accessed 10 November 2019)

- Mayaka, M. A., Lacey, G., & Rogerson, C. M. (2020). Empowerment process in community-based tourism: Friend relationship perspective. *Development Southern Africa*, 37(5), 791-808.
- Modi, Narendra, PM Modi's Independence Day Speech Focuses on Social Harmony, 2016, <https://www.livemint.com/Politics/m0bLzG2dDe5Jn44KybfdLJ/PM-NarendraModis-Independence-Day-speech-Its-our-duty-to.html> (accessed 10 November 2019)
- Montanari, I. J. (1995). Harmonization of social policies and social regulation in the European Community. *European Journal of Political Research*, 27(1), 21-45.
- Morling, B., & Fiske, S. T. (1999). Defining and measuring harmony control. *Journal of Research in Personality*, 33(4), 379-414.
- Morse, S., 2004. Putting the pieces back together again: an illustration of the problem of interpreting development indicators using an African case study. *Applied Geography*, 1-22
- Nucci, L. P., & Turiel, E. (2000). The moral and the personal: Sources of social conflicts. *Culture, thought, and development*, 115-137.
- Nuridin, B. V., & Bustami, R. (2015). Food Culture, Food Security and the Harmonization of Interethnic Groups: A Case Study of Karta Village in the Transmigration Area of Lampung Province, Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 2(1), 18-24.
- Kumbara, A. A. N. A., & Dewi, A. S. K. (2018). Managing potential conflicts and maintaining tolerance of inter-religious relations in multi-religious communities: case studies of ekasari village, jemberana district, bali province. In *seminar proceeding of international seminar culture change and sustainable development in multidisciplinary approach* (p. 12).
- Osimiri, Peter, Holistic Ontology, Social Capital and the Quest for Social Harmony in Africa, Ihafa, in "A Journal of African Studies", 8(1), 2016, p. 35- 53.

- Perkins, D. D., Hughey, J., & Speer, P. W. (2002). Community psychology perspectives on social capital theory and community development practice. *Community Development*, 33(1), 33-52.
- Rahmat, A., & Izudin, A. (2018). Impact evaluation of community empowerment programs with the farmer managed extension model.
- Ryan, N. (2015). Civilizing humans with shame: How early Confucians altered inherited evolutionary norms through cultural programming to increase social harmony. *Journal of Cognition and Culture*, 15(3-4), 254-284.
- Sabirin, M., Zainuddin, M., Zulyadi, T., Husna, N., & Drani, S. The Assistance Model of the Baitul Mal in Promoting The Community of Home Industry.
- Samah, A. A., & Aref, F. (2011). The theoretical and conceptual framework and application of community empowerment and participation in processes of community development in Malaysia. *The Journal of American Science*, 7(2), 186-195.
- Sanchez, Dan, The Profound Significance of Social Harmony, 2011, <https://mises.org/library/profound-significance-social-harmony>, (accessed 20 November 2019).
- Savory, R. M. (Ed.). (1976). *Introduction to islamic civilization*. Cambridge university press.
- Singagerda, F. S., Alfian, F., Sari, N., & Akbar, M. F. (2020). Islamic Integralism and Muakhi Culture: The Relevance of Philosophical Values of Local Culture and Lampung Community Development. https://www.researchgate.net/profile/Faurani_Singagerda/publication/346875945_Islamic_Integralism_and_Muakhi_Culture_The_Relevance_of_Philosophical_Values_of_Local_Culture_and_Lampung_Community_Development/links/5fd1a449299bf188d406de6e/Islamic-Integralism-and-Muakhi-Culture-The-Relevance-of-Philosophical-Values-of-Local-Culture-and-Lampung-Community-Development.pdf
- Schulze, K. E. (2017). The “ethnic” in Indonesia’s communal conflicts: violence in Ambon, Poso, and Sambas. *Ethnic and racial studies*, 40(12), 2096-2114.
- Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 193-209.

- Sutanto, J. E. (2015). The Success Of Transmigrants From East Java In Migrant Location And Its Impact On The Behavior Of The Society From The Origin. *International Journal of Academic Research*, 7.
- Shabbir, M. S., Kassim, N. M., Faisal, M., Abbas, M., & Sabti, Y. M. (2018). Poverty reduction through Islamic modes of finance; The way forward. *The Journal of Social Sciences Research*, 58-65.
- Septanti, D., Santosa, H. R., Setijanti, P., Bahri, A. S., Setyawan, W., & Utami, A. S. P. R. (2020, February). Environmental and waste management based on community empowerment in Surabaya. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 447, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.
- Syani, A. (2013). Falsafah Hidup Masyarakat Lampung Sebuah Wacana Terapan. Sumber: <http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/02/falsafahhidup-masyarakat-lampung-sebuah-wacana-terapan/diakses>, 10.
- Revell, P., & Dinnie, E. (2020). Community resilience and narratives of community empowerment in Scotland. *Community Development Journal*, 55(2), 218-236.
- Rozak, R., Dalimunthe, R. P., & Supianudin, A. (2017). Preventing Radicalism And Managing Cultural Diversity In Transmigration Areas In Indonesia. *International Journal Of Civil Engineering And Technology (IJCIET)*, 8(8), 1068-1080.
- Roseland, M. (2000). Sustainable community development: integrating environmental, economic, and social objectives. *Progress in planning*, 54(2), 73-132.
- Tomba, L. (2009). Of quality, harmony, and community: Civilization and the middle class in urban China. *positions: east asia cultures critique*, 17(3), 591-616.
- Van Der Wijst, T. (1985). Transmigration in Indonesia: An evaluation of a population redistribution policy. *Population Research and Policy Review*, 4(1), 1-30.

- Viterna, J., & Robertson, C. (2015). New directions for the sociology of development. *Annual Review of Sociology*, 41, 243-269.
- Vuong, Q. H. (2016). Global mindset as the integration of emerging socio-cultural values through mindsponge processes: A transition economy perspective. In: J. Kuada (ed.) *Global Mindsets: Exploration and Perspectives* (pp. 109-126). Routledge, UK.
- Vuong, Q.H., Napier, N.K. (2015). Acculturation and global mindsponge: an emerging market perspective. *International Journal of Intercultural Relations* 49, 354-367.
- Vuong, Q.-H., Ho, M.-T., Nguyen, H.-K. T., et al. (2020). On how religions could accidentally incite lies and violence: folktales as a cultural transmitter. *Palgrave Communications*, 6(1), 82.
- Vuong, Q.-H., Bui, Q.-K., La, V.-P., et al. (2018). Cultural additivity: behavioural insights from the interaction of Confucianism, Buddhism and Taoism in folktales. *Palgrave Communications*, 4(1), 143.
- Wang, L., & Juslin, H. (2009). The impact of Chinese culture on corporate social responsibility: The harmony approach. *Journal of Business Ethics*, 88(3), 433-451.
- Wallerstein N. Powerlessness, empowerment, and health: implications for health promotion programs. *Am J Health Promot* 1992;6:197-205.
- Warikoo, K. Religion, Culture and Harmony in South Asia. *CENTRAL ASIAN STUDIES*, 80.
- Watt, S., Higgins, C., & Kendrick, A. (2000). Community participation in the development of services: a move towards community empowerment. *Community Development Journal*, 35(2), 120-132.
- Withaeckx, S., Schrooten, M., & Geldof, D. (2015). Living across borders: The everyday experiences of Moroccan and Brazilian transmigrants in Belgium. *Crossings: Journal of Migration & Culture*, 6(1), 23-40.
- Winfield, B. H., Mizuno, T., & Beaudoin, C. E. (2000). Confucianism, collectivism, and constitutions: Press systems in China and Japan. *Communication Law and Policy*, 5(3), 323-347.

- Webster, A. (1990). *Introduction to the Sociology of Development*. Macmillan International Higher Education.
- Wekke, I. S., Ladiqi, S., & Bustami, R. (2019). Bugis and Madura migration in Nusantara: Religiosity, harmony, and identity from eastern Indonesia. *Ulul Albab*, 20(1), 1.
- Weilie, Z. (2007). Islamic Civilization and the World [J]. *World Economics and Politics*, 7.
- Yamanaka, K. (2005). Changing family structures of Nepalese transmigrants in Japan: split-households and dual-wage earners. *Global Networks*, 5(4), 337-358.
- Yanmesli, Y., Rijanta, R., Sutikno, S., & Harahap, N. (2014). Livelihood Strategies and the Welfare of Transmigrants. *Indonesian Journal of Geography*, 46(1), 44-51.
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory. In *Handbook of community psychology* (pp. 43-63). Springer, Boston, MA.
- Zimmerman MA, Rappaport J. Citizen participation, perceived control, and psychological empowerment. *Am J Community Psychol* 1988;16:725-43.
- Zuo'an, W. (2013). Religious harmony: A fresh concept in the age of globalization. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 77, 210-213.
- ZHENG, H. S., & LI, L. L. (2005). Social Structure and Social Harmony [J]. *Journal of Renmin University of China*, 2.